



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, disusunlah LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2011-2015.

LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2011– 2015, menggambarkan capaian kinerja tentang penyelenggaran Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan secara utuh, transparan dan akuntabel berdasarkan indikator-indikator kinerja utama setiap aspek pembangunan. Disamping itu, LKPJ tersebut merefleksikan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mencapai Visi Kabupaten Bone Bolango, serta menyajikan informasi yang obyektif tentang upaya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Bone Bolango.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah ditempuh sesungguhnya merupakan kolaborasi kerjasama antara eksekutif dan legislatif berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta norma yang telah disepakati bersama. Selanjutnya melalui LKPJ-AMJ ini juga dijelaskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,





produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Akhirnya penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015, disampaikan sepenuhnya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena itu, atas perhatian Dewan yang terhormat sejak awal hingga berakhirnya sidang, saya menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya agar kita dapat bekerja dan mengabdikan lebih baik lagi bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

Wassalam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bone Bolango, Juli 2015

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
1. Umum	1
2. Tujuan dan Sasaran	2
3. Landasan Penyusunan	2
B. Gambaran Umum Daerah	6
1. Kondisi Geografis	6
2. Gambaran Umum Demografis	16
3. Kondisi Sosial Ekonomi	20
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	25
A. Visi dan Misi	25
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah	26
C. Prioritas Daerah Tahun 2011-2015	26
D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015	26
E. Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	28
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	31
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	32
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	32
2. Realisasi Pendapatan	33
3. Permasalahan dan Solusi	37
B. Pengelolaan Belanja Daerah	38
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	38
2. Target dan Realisasi Belanja	39
C. Realisasi Pembiayaan Daerah	40
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43
A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan	43
1. Urusan Wajib Pendidikan	44





2. Urusan Wajib Kesehatan	54
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum	72
4. Urusan Wajib Perumahan	100
5. Urusan Wajib Penataan Ruang	105
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	106
7. Urusan Wajib Lingkungan Hidup	111
8. Urusan Wajib Sosial	116
9. Urusan Wajib Tenaga Kerja	121
10. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM	123
11. Urusan Wajib Penanaman Modal	128
12. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	130
13. Urusan Wajib Statistik	141
14. Urusan Wajib Kebudayaan	143
15. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	145
16. Urusan Wajib Kearsipan	148
17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi	149
18. Urusan Wajib Perpustakaan	151
19. Urusan Wajib Keluarga Berencana	153
20. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan	156
21. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik	159
22. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	166
23. Urusan Wajib Perhubungan	171
24. Urusan Wajib Pertanahan	174
25. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat	173
26. Urusan Wajib Ketahanan Pangan	178
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	185
1. Urusan Pilihan Pertanian	185
2. Urusan Pilihan Kehutanan	200
3. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	202
4. Urusan Pilihan Pariwisata	204
5. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	207
6. Urusan Pilihan Perdagangan	216
7. Urusan Pilihan Perindustrian	218
8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian	221
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	223
A. Dasar Hukum Tugas Pembantuan	224
B. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Pusat	224





1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	225
2. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan	225
C. Tugas Pembantuan yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi	240
D. Tugas Pembantuan Kepada Desa	241
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	242
A. Kerjasama Antar Daerah	242
1. Kebijakan	243
2. Kegiatan	243
3. Realisasi Pelaksanaan	243
B. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Instansi Vertikal	244
1. Kebijakan	244
2. Kegiatan	244
3. Realisasi Pelaksanaan	245
C. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga	245
1. Kebijakan	245
2. Kegiatan	245
3. Realisasi Pelaksanaan	246
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	248
1. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	248
2. Potensi Bencana yang Dihadapi dan Solusi	248
E. Pembinaan Batas Wilayah	249
1. Kebijakan dan Kegiatan	249
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	250
3. Permasalahan dan Solusi	250
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	250
G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	251
1. Gangguan yang Terjadi	251
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum	252
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	252
4. Penanggulangan	252
BAB VII PENUTUP	254
A. Kesimpulan	254
B. Saran	255

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Gambaran Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango	7
Tabel 1.2	Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango Menurut Kecamatan	8
Tabel 1.3	Luas Penggunaan lahan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014	10
Tabel 1.4	Potensi Sumber Daya Hutan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014	12
Tabel 1.5	Potensi Pertambangan Non Logam di Kabupaten Bone Bolango	13
Tabel 1.6	Potensi Pertambangan Logam di Kabupaten Bone Bolango	13
Tabel 1.7	Sumber Energi Listrik di Kabupaten Bone Bolango	14
Tabel 1.8	Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014	15
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014	17
Tabel 1.10	Rata-rata Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013	18
Tabel 1.11	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012-2013	19
Tabel 1.12	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	22
Tabel 1.13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	23
Tabel 1.14	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar harga Berlaku (%) Tahun 2011-2014	23
Tabel 1.15	Laju Pertumbuhan PDRB Bone Bolango Per Sektor Tahun 2010-2014	24
Tabel 1.16	Beberapa Agregat PDRB Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2014	24
Tabel 2.1	Korelasi Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2011-2014	30
Tabel 3.1	Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014	33
Tabel 3.2	Rekapitulasi Belanja Daerah kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	39
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014	41
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Output Program Pendidikan Anak Usia Dini	45
Tabel 4.2	Capaian Kinerja kinerja Output Peningkatan Sarana dan Prasarana	





	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	46
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Output Peningkatan Saranadan prasarana Pendidikan Menengah	48
Tabel 4.4	Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan	51
Tabel 4.5	Capaian Kinerja APM, APK dan APS	52
Tabel 4.6	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	67
Tabel 4.7	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA)	68
Tabel 4.8	Penurunan Angka Kesakitan	68
Tabel 4.9	Penurunan Angka Gizi Buruk	68
Tabel 4.10	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	69
Tabel 4.11	Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2011	73
Tabel 4.12	Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2012	74
Tabel 4.13	Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2013	75
Tabel 4.14	Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2014	77
Tabel 4.15	Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2015	80
Tabel 4.16	Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2011	83
Tabel 4.17	Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2012	83
Tabel 4.18	Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2013	84
Tabel 4.19	Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2014	84
Tabel 4.20	Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2015	85
Tabel 4.21	Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Pada tahun 2011	85
Tabel 4.22	Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Pada tahun 2012	86
Tabel 4.23	Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Pada tahun 2013	87
Tabel 4.24	Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Pada tahun 2014	88





Tabel 4.25	Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Pada tahun 2015	89
Tabel 4.26	Capaian Output Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Selang tahun 2011-2014	90
Tabel 4.27	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada tahun 2015	91
Tabel 4.28	Capaian Output Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Selang tahun 2011-2014	93
Tabel 4.29	Capaian Output Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum tahun 2015	96
Tabel 4.30	Capaian Output Program Pengendalian Banjir selang tahun 2011-2014	97
Tabel 4.31	Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014	97
Tabel 4.32	Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014	98
Tabel 4.33	Data Rumah Bantuan Tahun 2011-2015 Kabupaten Bone Bolango....	102
Tabel 4.34	Data Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015	103
Tabel 4.35	Capaian Output Pada Program Perlindungan Sosial Selang Tahun 2011-2014	119
Tabel 4.36	Realisasi Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif tahun 2011-2014	123
Tabel 4.36	Realisasi Output Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Tahun 2011-2014.....	124
Tabel 4.37	Realisasi Output Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Tahun 2011-2014	125
Tabel 4.38	Realisasi Output Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi tahun 2011-2014	125
Tabel 4.39	Koperasi Aktif tahun 2011-2012 Kabupaten Bone Bolango	126
Tabel 4.40	Daftar Perusahaan/Investor di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011- 2014	129
Tabel 4.41	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural	137
Tabel 4.42	Peraturan Daerah yang dihasilkan pada tahun 2011-2014	139
Tabel 4.43	Data Perizinan Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2012	139
Tabel 4.44	Data Masyarakat telah memiliki dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	147
Tabel 4.45	Cakupan Kepesertaan Program KB Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014	155
Tabel 4.46	Kesejahteraan dan kesetaraan gender Tahun 2011-2014	158
Tabel 4.47	Pengurangan Angka Kriminalitas	165





Tabel 4.48	Persentase Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014	169
Tabel 4.49	Data Perkembangan Tanaman Pangan Di Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014	180
Tabel 4.50	Data Perkembangan Tanaman Holtikultura di Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014	180
Tabel 4.51	Data Perkembangan Tanaman Perkebunan di Kab. Bone Bolango Tahun 2010-2014	182
Tabel 4.52	Data Perkembangan Potensi dan Fungsi Daerah Irigasi di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014	183
Tabel 4.53	Data Perkembangan Jumlah Konsumsi Per-Komoditas di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014	183
Tabel 4.54	Data Perkembangan Jumlah Alat-Alat Pertanian di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014	198
Tabel 4.55	Pengadaan jaringan listrik dan lampu jalan Tahun 2011-2015	203
Tabel 4.56	Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2011-2014 dan Target tahun 2015	203
Tabel 4.57	Jumlah Kunjungan wisata tahun 2011-2014	206
Tabel 4.58	Fasilitasi Bibit/Benih Ikan Tahun 2011-2015	210
Tabel 4.59	Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap Tahun 2011 – 2015	211
Tabel 4.60	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Prasarana Transmigrasi.....	222
Tabel 5.1	Anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat	225
Tabel 5.2	Capaian Output pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan selang tahun 2011	226
Tabel 5.3	Capaian Output pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan selang tahun 2012	227
Tabel 5.4	Capaian Output pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan selang tahun 2013	229
Tabel 5.5	Capaian Output pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan selang tahun 2014	234
Tabel 5.6	Capaian Output pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan selang tahun 2011	236
Tabel 5.7	Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango	238
Tabel 5.8	Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango.....	238
Tabel 5.9	Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango	239





Tabel 5.10	Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango.....	239
Tabel 5.11	Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango.....	240
Tabel 5.12	Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan Yang di Terima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo	240
Tabel 5.13	Alokasi Dana Untuk Desa	241

DAFTAR GRAFIK





Grafik 1.1	Perkembangan Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 – 2013	17
Grafik 1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Gorontalo Kab. Bolango Tahun 2010 – 2013.....	21
Grafik 1.3	Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Gorontalo, Kab.Bolango Tahun 2010 – 2013.....	21
Grafik 1.4	IPM Nasional, Provinsi Gorontalo Kabupaten BoneBolango Tahun 2011 – 2013	22
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Asli DaerahKabupaten Bone Bolango	35
Grafik 3.2	Komposisi Realisasi Belanja Kabupaten Bone Bolango	40
Grafik 4.1	Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango	69
Grafik 4.2.	Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango	70
Grafik 4.3	Trend Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango	70
Grafik 4.4	Trend Angka Gizi Buruk Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango	71
Grafik 4.5	Kinerja Bidang Perumahan Tahun 2010-2014	103
Grafik 4.6	Trend Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2010 – 2014 ...	138
Grafik 4.7	Peningkatan Komptensi Aparatur Tahun 2012 – 2014	139
Grafik 4.8	Indikator Pembangunan Desa Kab. Bone Bolango	177
Grafik 4.9	Capaian kinerja outcome program Produksi Perikanan Tangkap	213
Grafik 4.10	Capaian kinerja outcome program Produksi Perikanan Budidaya	214
Grafik 4.11	Tingkat Komsumsi ikan kab. Bone Bolango	214

DAFTAR GAMBAR





Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango 6
Gambar 1.2	Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango 8
Gambar 1.3	Peta Daerah Alirasn Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango 9
Gambar 1.4	Peta Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Bone Bolango 10





BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Umum

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah, diamanatkan bagi setiap Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ AKHIR MASA JABATAN) dihadapan paripurna DPRD. Berpedoman kepada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ-AMJ Bupati Bone Bolango merupakan instrument pertanggungjawaban Kepala Daerah serta bahan evaluasi pencapaian target RPJMD 2011-2015 yang memuat capaian kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara





makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan selama periode 2011-2015.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Bone Bolango adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam bidang administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan di daerah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi Sumber daya Alam (SDA) berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

3. Landasan Penyusunan

Di samping itu, penyusunan LKPJ AKHIR MASA JABATAN ini juga berpedoman pada peraturan perundangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);





5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.





15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- B. Gambaran Umum Daerah
 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia.
 3. Kondisi Ekonomi;
 - a. Potensi Unggulan Daerah
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Solusi





- B. Pengelolaan Belanja Daerah
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2011-2014
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2011-2014
 - 3. Permasalahan dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan yang Diterima
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
 - 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Solusi
- B. Tugas Pembantuan yang Diberikan
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan tugas pembantuan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah



1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Solusi
- D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

BAB VII PENUTUP

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

❖ Letak Geografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km² berada pada ketinggian 0 – 1500 meter dari permukaan laut, terletak antara 0,27' – 1.01' Lintang Utara dan antara 121.23' – 122.44' Bujur Timur.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011



❖ **Batas Wilayah**

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara serta Kota Timur Kota Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kawasan penyangga (buffer area) ekosistem lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkar dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

Tabel 1.1
Gambaran Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Bone Bolango

BATAS WILAYAH	BERBATASAN
Sebelah Utara	Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulut
Sebelah Timur	Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulut
Sebelah Selatan	Kec. Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo
Sebelah Barat	Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo Kecamatan Kota Utara, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

❖ **Luas Wilayah**

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1.984,58 Km² yang tersebar pada 18 kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut ini.





Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Menurut Kecamatan

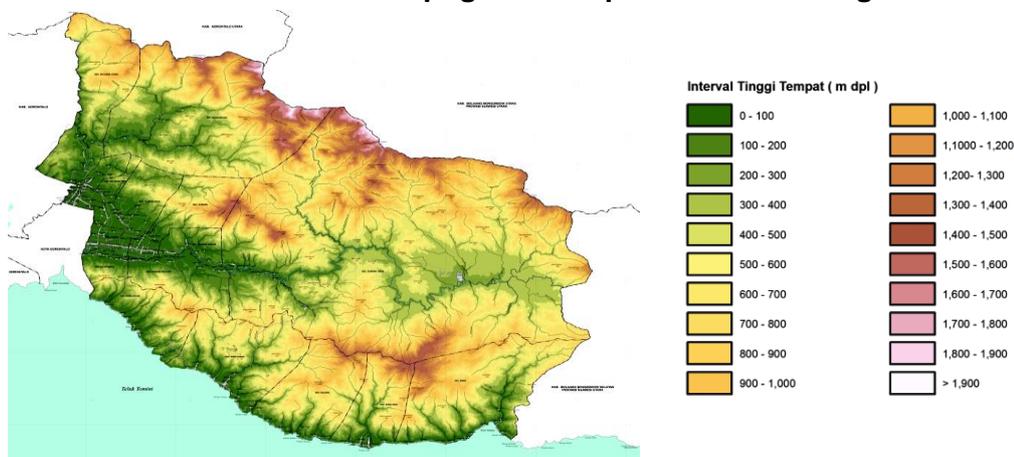
KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1. Tapa	64,41	3,26
2. Bulango Utara	176,09	8,87
3. Bulango Selatan	9,87	0,50
4. Bulango Timur	10,82	0,55
5. Bulango Ulu	78,41	3,95
6. Kabila	193,45	9,75
7. Botupingge	47,11	2,37
8. Tilongkabila	79,74	4,02
9. Suwawa	33,51	1,69
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28
11. Suwawa Timur	47,11	2,37
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26
13. Kabila Bone	143,51	7,23
14. Bonepantai	161,82	8,15
15. Bulawa	111,01	5,59
16. Bone Raya	64,12	3,23
17. Bone	72,71	3,66
18. Pinogu	406,78	20,50
JUMLAH	1984,58	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

❖ Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan).

Gambar 1.2
Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011



Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Dilihat dari ketinggian wilayah dari permukaan laut, umumnya Kabupaten Bone Bolango merupakan dataran tinggi dan pegunungan seperti pada Gambar 3. Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).

Gambar 1.3
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah \pm 265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

❖ Pola Penggunaan Lahan

Pola Penggunaan Tanah pada hakekatnya adalah merupakan gambaran didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.4.

Gambar 1.4
Peta Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Tabel 1.3
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	LUAS (Ha)
		2014
1.	Hutan	
	1. Taman Nasional	104.740
	2. Hutan Lindung	15.930
	3. Hutan produksi tetap	824
	4. Hutan produksi terbatas	18.824
2.	Hutan Basah	
	1. Sawah yang diolah	2.044
	2. Sawah yang belum diolah	-
	3. Tambak	-
	4. Kolam dan Danau	74



No	Penggunaan Lahan	LUAS (Ha)
	5. Rawa-rawa yang ditanami	4
3.	Lahan Kering	
	1. Tegalan	7.169
	2. Ladang/huma	6.444
	3. Lahan kering sementara tidak diusahakan	6.444
	4. Perkebunan	15.758
	5. Penggembalaan/ padang rumput	2.936
4.	Bangunan dan lain-lain	
	1. Pekarangan/tanah untuk bangunan	487
	2. Taman Nasional	7.355
	3. Hutan Lindung	9376
	Total	198.431

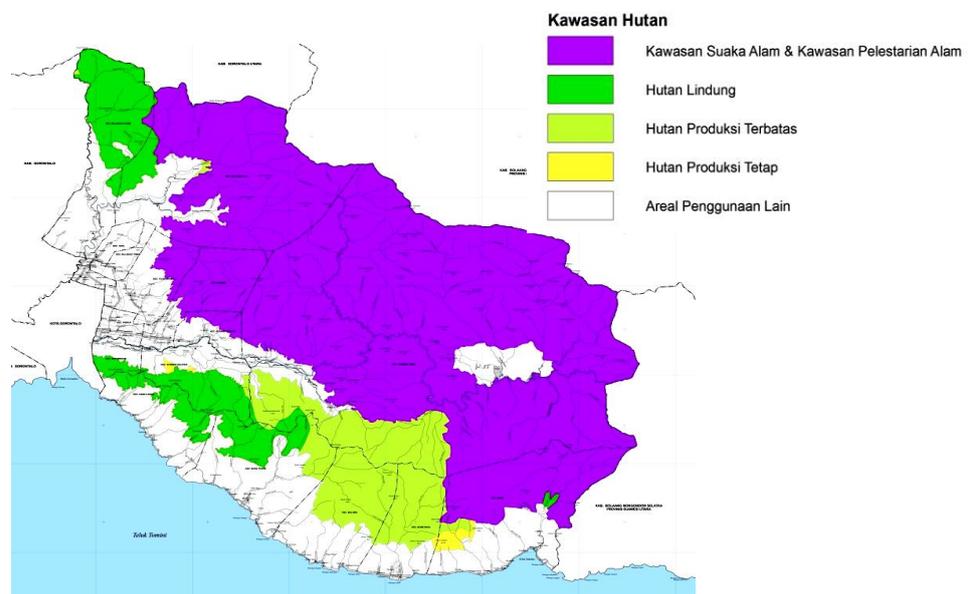
Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

(*) Data masih sementara dalam pengolahan dan perampungan

❖ Potensi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

Gambar 1.5
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan dimana dapat membawa bencana alam bagi daerah lain.





Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango, yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi.

Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango 140.098,40 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.4
Potensi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2011 s/d 2014

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)
		2014
1	Hutan Lindung	15.718,25
2	Hutan Produksi Terbatas	18.803,29
3	Hutan Produksi Tetap	836,45
4	Hutan Produksi Konversi	-
5	Hutan Taman Nasional	104.740,15

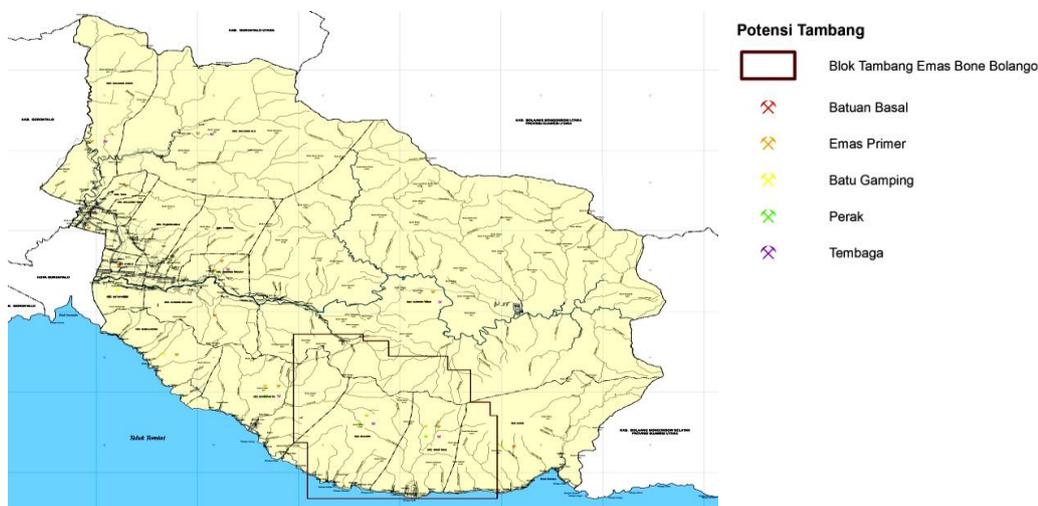
Sumber Data : BPKH Wil XVI Gorontalo, (SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010)

❖ **Potensi Pertambangan dan Energi**

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan dimana masih seringnya terjadi penggunaan bahan-bahan radioaktif yang tidak direkomendasikan dalam usaha pertambangan rakyat. Untuk itu diperlukan kearifan lokal dalam pengambilan kebijakan pemberian izin pengolahan hasil pertambangan dengan mempertimbangkan nilai hayati serta potensi yang tersedia.



Gambar 1.6
Peta Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011

Potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7, .8 dan 1.9 berikut ini:

Tabel 1.5
Potensi Pertambangan Non Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Tambang	Potensi Pertambangan Non Logam
1.	Granit (Ton)	
2.	Andesit (Ton)	62.500.000
3.	Batu Gamping ((Ton)	67.000.000
4.	Sirtu (Ton)	24.600.880

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014

Tabel 1.6
Potensi Pertambangan Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No.	Jenis Tambang	Lokasi (Kec/ Desa)	Potensi (Ton)
1.	Emas	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	3.2
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Tulabolo	119.310
		Kecamatan Bone Raya Desa Tombulilato Kiri	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur	119.310



No.	Jenis Tambang	Lokasi (Kec/ Desa)	Potensi (Ton)
		Sungai Mak	
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Kayubulan	119.310
2.	Tembaga	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	232,200
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Dumbaya Bulan	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	1891,500
		Kecamatan Bonepantai Cabang Kiri	1891,500

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014

Sedangkan perkembangan potensi sumber energi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.9

Tabel 1.7
Sumber Energi Listrik
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Sumber Daya Energi	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Jumlah Sumber Daya Energi (unit)
1.	PLTA	Suwawa Timur	-
2.	PLTU	Kecamatan Kabila Bone	
3.	GEOTERMAL	Suwawa Tengah Suwawa Selatan	
4.	PLTD	-	-
5.	PLTS	Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo Barat, - Desa Tulabolo Timur, - Desa Pinogu - Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Selatan - Desa Molintogupo - Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Tengah - Desa Tapadaa Kecamatan Kabila Bone - Desa Biluango - Desa Olele Kecamatan Tilongkabila - Desa Tunggulo Kecamatan Bone Pantai -Desa Pelita Hijau	100 Unit 145 Unit 450 Unit 71 Unit 1 Unit 45 Unit 71 Unit 50 Unit 50 Unit 48 Unit -
6.	PLTMH	Kecamatan Bulango Ulu - Desa Owata Kecamatan Bulango Timur - Desa Kopi Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo (Piko Hydro)	1 Unit 1 Unit 15 Unit

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014





❖ **Potensi Pariwisata**

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi wisata berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Selain itu sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram / Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Tabel 1.8
Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 – 2014

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata				Jumlah Sanggar Seni dan Budaya
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah	
2010	1	1	1	3	6
2011	1	1	3	3	8
2012	1	1	1	3	6
2013	1	1	3	3	8
2014	1	1	4	4	8

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

Kawasan Strategis Wisata Alam

Kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman dalam perspektif ekologis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penentuan kawasan ini di Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan dalam dua tipe yaitu :



- (1). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata bahari yaitu Pantai Olele
- (2). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata daratan yaitu :
 - Kawasan Air Panas Lombongo, di perbukitan Lombongo, Desa Lombongo, Kec. Suwawa Tengah
 - Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kec. Suwawa Selatan ;
 - Air Terjun Ilohuuwa Desa Ilohuuwa, Kec. Bone ;
 - Kawasan Danau Perintis, Kec. Suwawa ;
 - Kawasan Taman Laut Olele ,Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Botutonuo, Desa Botutonuo, Kec. Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Molotabu, Desa Molotabu, Kec. Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Bulawa, Kec. Bulawa
 - Kawasan Wisata Alam Meranti, Desa Langge, Kec. Tapa

Kawasan wisata telah banyak menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah. Oleh karena kawasan wisata alam di Kabupaten Bone Bolango harus mendapat perhatian serius karena memiliki nilai potensi dikembangkan. Kawasan ini bisa menjadi sumber utama PDRB Hijau. Pengembangan wisata alam perlu dilakukan melalui suatu rencana dan strategi, sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan disesuaikan dengan kapasitas ekologis;
 - Pemberdayaan masyarakat lokal melalui *management of colaboration*;
 - Pembangunan infrastruktur penunjang;
 - Pengendalian dampak antropogenis;
 - Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha wisata;
 - Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan;
- Pembuatan payung hukum;

2. Gambaran Umum Demografis

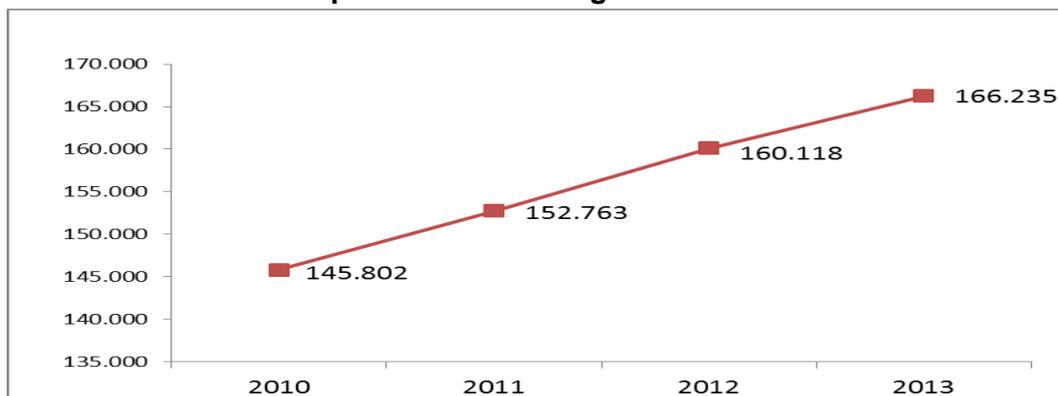
❖ Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun sampai dengan 2013 sebanyak 166.235 jiwa (angka sementara) berdasarkan data BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bone Bolango yang tersebar pada 18 Kecamatan sudah termasuk Kecamatan Pinogu sebagai



Kecamatan terbaru yang diresmikan menjadi kecamatan otonom pada 30 Juli 2012 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2012.

Grafik 1.1
Perkembangan Penduduk dan Kepadatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 – 2013



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Sipil Kab. Bone Bolango Tahun 2013 (sampai 2014)

❖ Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk disetiap kecamatan dari tahun 2010 serta tahun 2013 (Data Adminduk) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desa Per-Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Tapa	7.563	8.235	8.235
2.	Bulango Utara	7.291	8.011	8.011
3.	Bulango Selatan	10.168	11.141	11.141
4.	Bulango Timur	5.292	5.873	5.873
5.	Bulango Ulu	3.878	4.168	4.168
6.	Kabila	22.332	24.435	24.435
7.	Botupingge	6.120	6.644	6.644
8.	Tilongkabila	17.034	18.613	18.613
9.	Suwawa	11.898	13.030	13.030
10.	Suwawa Selatan	5.158	5.587	5.587
11.	Suwawa Timur	7.184	5.651	5.651
12.	Suwawa Tengah	6.151	6.602	6.602
13.	Pinogu	*	2.224	2.224
14.	Kabila Bone	10.817	11.730	11.730
15.	Bonepantai	10.789	11.430	11.430
16.	Bulawa	5.228	5.513	5.513
17.	Bone Raya	6.486	7.135	7.135
18.	Bone	9.374	10.213	10.213





No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desa Per-Tahun		
		2011	2012	2013
Jumlah Total		141.915	152.763	166.235

Sumber Data : BPS dan Dinas Capil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango

(*) Data belum diolah

Rata-rata luas wilayah dan penduduk per desa dan per Km² berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Rata-rata Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013

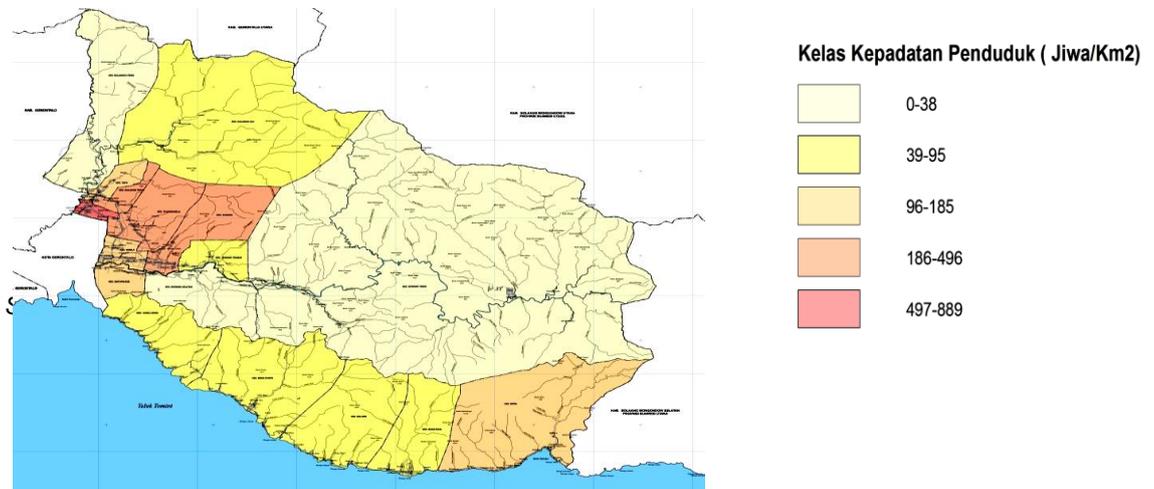
No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		KM ²	%	2013	%	
1.	Tapa	64,41	3,25	8.235	4,98	127,9
2.	Bulango Utara	176,10	8,87	8.011	4,77	45,5
3.	Bulango Selatan	9,87	0,50	11.141	6,69	1128,8
4.	Bulango Timur	10,82	0,55	5.873	3,49	542,8
5.	Bulango Ulu	78,41	3,95	4.168	2,50	53,2
6.	Kabila	193,45	9,75	24.435	14,63	126,3
7.	Botupingge	47,11	2,37	6.644	3,99	141,0
8.	Tilongkabila	79,74	4,02	18.613	11,18	233,4
9.	Suwawa	33,51	1,69	13.030	7,80	388,8
10.	Suwawa Selatan	184,09	9,28	5.587	3,37	30,3
11.	Suwawa Timur*	489,20	24,65	5.651	3,37	11,6
12.	Suwawa Tengah	64,70	3,26	6.602	3,96	102,0
13.	Pinogu	-		2.224	1,38	*
14.	Kabila Bone	143,51	7,23	11.730	7,15	81,7
15.	Bonepantai	161,82	8,15	11.430	6,99	70,6
16.	Bulawa	111,01	5,59	5.513	3,40	49,7
17.	Bone Raya	64,12	3,23	7.135	4,21	111,3
18.	Bone	72,71	3,66	10.213	6,13	140,5
Jumlah Total		1.984,58	100	168.235	100,00	83

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

(*) Data belum tersedia/Luas Kecamatan Pinogu masih digabung dengan luas wilayah Kecamatan Suwawa Timur



Gambar 1.7
Peta Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)



Sumber : Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011

❖ **Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 166.235 jiwa, jika dilihat laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah kecamatan Bulango Ulu dan Kecamatan Bone Raya yakni sebesar 2,73 dan 2,56 persen sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah kecamatan Bulango Timur yakni sebesar -0,64 persen

Tabel 1.11
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2012 –2013

Kecamatan	Laju Pertumbuhan	
	2012	2013
1. Tapa	2,00	2,28
2. Bulango Utara	1,85	2,09
3. Bulango Selatan	2,83	3,04
4. Bulango Timur	2,11	2,38
5. Bulango Ulu	2,68	2,73
6. Kabila	2,86	3,03
7. Botupingge	2,85	2,99
8. Tilongkabila	2,54	2,74
9. Suwawa	3,40	3,53
10. Suwawa Selatan	2,63	2,79
11. Suwawa Timur	1,98	-0,58**
12. Suwawa Tengah	2,67	2,71



Kecamatan	Laju Pertumbuhan	
	2012	2013
13.Pinogu*	-*	-*
14.Kabila Bone	3,00	3,23
15.Bonepantai	2,92	2,98
16.Bulawa	1,78	1,97
17.Bone Raya	2,43	2,56
18.Bone	2,88	3,04
Rata-rata	2,55	2,56

Sumber Data : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Bone Bolango

(*) : Data Belum tersedia/belum diolah

(**) : Laju pertumbuhan Kec. Suwawa timur telah dikurangi dengan jumlah penduduk Kec. Pinogu

3. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kondisi Sosial Masyarakat

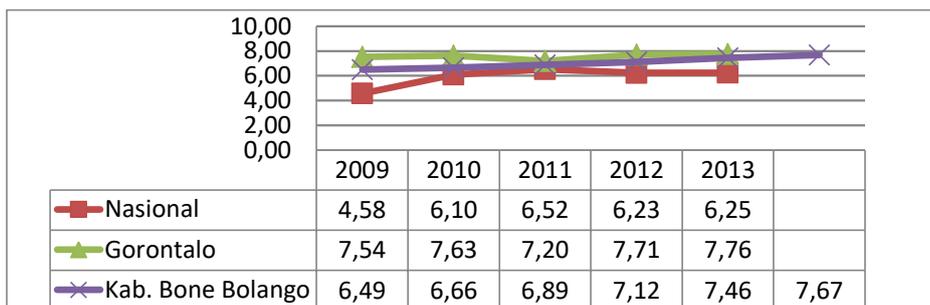
Kinerja makro ekonomi daerah Kabupaten Bone Bolango tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan regional. Berbagai langkah strategis yang dilakukan dalam rangka penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat difokuskan pada kebijakan alokasi dan distribusi fiskal daerah serta mendorong tumbuhnya investasi daerah disamping merekomendasikan strategi kebijakan ekonomi lainnya yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, membangun basis-basis ekonomi daerah, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor sekunder dan tersier.

Secara agregat, perekonomian kabupaten Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik walaupun diakui bahwa pertumbuhan tersebut dibawah tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Dalam selang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango mencapai 6,66% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mencapai 6,89%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 naik sebesar 0,23% atau mencapai 7,12%, tahun 2013 naik menjadi 7,46%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo 7,63% pada tahun 2010 dan 7,20% pada tahun 2011, dan 7,71 tahun 2012 dan tahun 2013 7,76%. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango berada dibawah rata-rata Provinsi namun sudah berada diatas rata-rata nasional.



Angka pengangguran Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 3,88% dibandingkan tahun 2012 6,94%. Hal ini menunjukkan trend yang baik.

Grafik 1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Gorontalo
Kab. Bolango Tahun 2010 – 2013



Sumber Data : BPS RI

Grafik 1.3
Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Gorontalo Kab.Bolango Tahun
2010 – 2013



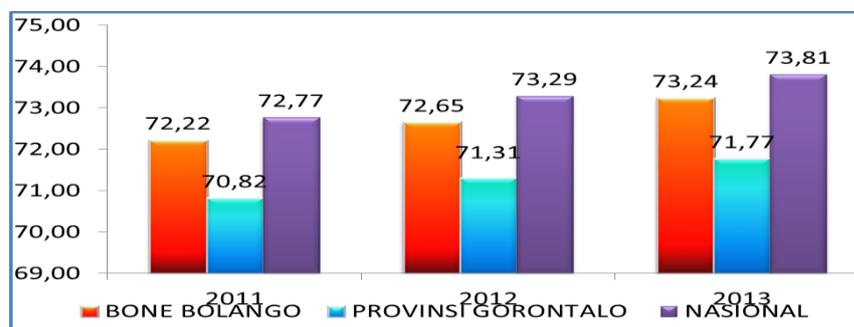
Sumber Data : BPS RI

Dilihat dari aspek kinerja peningkatan kualitas hidup penduduk berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan presentase penduduk miskin, kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2012 menunjukkan trend yang cukup baik. IPM kabupaten Bone Bolango pada tahun 2012 meningkat menjadi 73,24 dibanding pada tahun 2011 sebesar 72,65. Angka ini masih diatas rata-rata Propinsi yang pada tahun 2012 mencapai 71,31 dan pada tahun 2013 mencapai 71,77. Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 naik menjadi 17,19% dibanding pada tahun 2012 sebesar 16,66%.





Grafik 1.4
IPM Nasional, Provinsi Gorontalo Kabupaten BoneBolango Tahun 2011 – 2013



Sumber Data : BPS RI

b. Kondisi Perekonomian Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel 1.12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 – 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	371.309,9	403.420,4	440.896,0	492.639,5	544.913,9
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.941,2	6.815,0	7.289,1	8.008,5	8.893,5
3.	Industri Pengolahan	113.617,6	120.747,6	126.745,6	134.601,4	157.448,6
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.921,7	3.268,2	3.512,1	3.841,5	4.174,6
5.	Bangunan	43.766,9	50.635,0	58.101,7	68.461,2	87.252,2
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	107.660,7	114.222,6	121.333,7	128.612,0	146.539,3
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	36.220,7	38.733,5	40.622,5	43.151,2	46.727,3
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	102.778,7	113.067,0	124.222,3	134.812,0	145.971,1
9.	Jasa-Jasa	146.583,1	168,603	185,313	203,441	217.939,6
	PDRB	930.800,5	1.019.512,3	1.108.036,0	1.217.565,5	1.359.860,1
	PDRB TANPA MIGAS	930.800,5	1.019.512,3	1.108.036,0	1.217.565,5	1.359.860,1

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Struktur perekonomian Bone Bolango didominasi oleh tiga sektor utama Tabel 1.17, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.





Tabel 1.13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011 - 2013 (Jutaan Rupiah)

No.	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	87,262	93,452	100,509	109,292	na
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,659	3,666	3,784	3,923	na
3.	Industri Pengolahan	37,2	38,942	40,784	42,875	na
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,045	1,118	1,199	1,306	na
5.	Bangunan	22,037	24,971	28,075	32,218	na
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,859	28,601	30,265	31,809	na
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	24,345	25,178	26,309	27,477	na
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	44,017	47,891	51,607	55,015	na
9.	Jasa-Jasa	33,144	36,092	38,722	41,296	na
PDRB		280.568	299.911	321.255	345.211	na
PDRB TANPA MIGAS		280.568	299.911	321.255	345.211	na

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dari tahun 2011-2013 didominasi oleh tiga sektor utama (Tabel 1.18), yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, keuangan, dan industri pengolahan.

Tabel 1.14
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Tahun 2011- 2014

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	38,93	39,57	39,79	40,46	40,07
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,67	0,66	0,66	0,65
3.	Industri Pengolahan	12,40	11,84	11,44	11,05	11,58
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
5.	Bangunan	4,78	4,97	5,24	5,62	6,42
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,75	11,20	10,95	10,56	10,78
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,95	3,80	4,77	3,54	3,44
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,22	11,09	11,21	11,07	10,73
9.	Jasa-Jasa	16,00	16,54	16,72	16,71	16,03
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
PDRB TANPA MIGAS		100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango





Tabel 1.15
Laju Pertumbuhan PDRB Bone Bolango
Persektor Tahun 2010 – 2014

No.	Sektor	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	8,21	6,85	7,55	8,74	6,95
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,61	2,72	3,23	3,66	4,40
3.	Industri Pengolahan	4,37	4,68	4,73	5,13	10,44
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,58	7,03	7,26	8,91	9,71
5.	Bangunan	4,84	13,31	12,43	14,76	16,17
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,65	5,67	5,82	5,10	10,11
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,35	3,42	4,49	4,44	5,00
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,90	8,80	7,76	6,60	3,88
9.	Jasa-Jasa	5,31	6,65	7,29	6,65	5,29
PDRB		6,66	6,89	7,12	7,46	7,67
PDRB TANPA MIGAS		6,66	6,89	7,12	7,46	7,67

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.17
Beberapa Agregat
PDRB Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2014

No.	Rincian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	PDRB atas dasar harga berlaku (Jutaan Rupiah)	930.800,5	1.019.512	1.108.036	1.217.568	1.359.860,1
2.	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	141.915	145.015	147.692	148.471	na
3.	PDRB Perkapita (Rupiah)	6.445.347	7.030.392	7.502.343	8.171.188	8.742.136*

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

*" Terwujudnya Pemerintahan Yang Amanah,
Demi Terciptanya Masyarakat Madani "*

Visi ini mengandung arti :

- **Pemerintahan Yang Amanah**, yang hendak di wujudkan adalah praktek penyelenggaraan pemerintahan yang secara melembaga tercegah dan terjaga dari keinginan dan kehendak bekerja hanya untuk merauk keuntungan secara individu, kelompok atau golongan tertentu. Pemerintahan amanah merupakan bentuk pemerintahan yang senantiasa terpanggil mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta propesionalisme.
- **Masyarakat madani (civil society)**, adalah bentuk masyarakat demokratis, dimana anggotanya menyadari akan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan kepentingannya. Masyarakat madani tidak terbentuk secara sepihak hanya berupa masyarakat atau rakyatnya, melainkan dipersyaratkan harus memiliki bentuk pemerintahan yang demokratis (democratic govement), masyarakat yang memiliki karakteristik kehidupan yang bermartabat, memiliki kepekaan social yang tinggi, menjunjung tinggi nilai dan norma adat, norma hukum, hidup bermasyarakat dan bersahaja, budaya gotong royong, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandasan sendi – sendi keimanan serta memiliki toleransi hidup beragama.

Untuk mencapai visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bone Bolango 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan pemerintah yang bersih, taat hukum dan demokratis**
2. **Menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan.**





B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah

Strategi pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2010-2015 yang diharapkan mampu menjembatani upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan; (2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; (3) Mewujudkan pengembangan potensi ekonomi lokal dan sumber daya alam; serta (4) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana serta penataan ruang wilayah.

- ❖ **Mewujudkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan**
- ❖ **Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**
- ❖ **Mewujudkan pengembangan potensi ekonomi lokal dan SDA**
- ❖ **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana serta penataan wilayah**

C. Prioritas Daerah Tahun 2011-2015

Berdasarkan Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan langkah pembangunan sesuai Prioritas Daerah yang disusun, meliputi :

- 1). Mewujudkan pemerintahan yang bersih, taat hukum dan demokratis
 - a. Reformasi borikrasi
 - b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
 - c. Peningkatan mutu pelayanan publik
 - d. Penegakkan supremasi hukum
- 2). Menciptakan Masyarakat mandiri dan berkeadilan
 - a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - c. Pemerataan pelayanan kesehatan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas
 - e. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan lokal
 - f. Penyetaraan gender, perlindungan anak dan manula
 - g. Pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkesinambungan
 - h. Pengembangan objek wisata

D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2014 dilakukan secara sinergis dengan arah kebijakan ekonomi makro dalam jangka menengah yang diharapkan akan memberikan dukungan pada (1) peningkatan kinerja sektor-sektor riil, (2) penyehatan APBD dengan meningkatkan secara bertahap





kapasitas fiskal daerah serta memperbaiki kinerja anggaran untuk peningkatan pelayanan publik, (3) pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran secara terpadu dengan kebijakan lainnya, (4) pengembangan ekonomi kerakyatan (5) serta pengintegrasian perekonomian daerah dengan perekonomian yang lebih luas.

Kebijakan ekonomi makro dalam periode 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan produktifitas daerah serta peningkatan ketahanan ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Pengembangan sektor-sektor ekonomi diarahkan untuk menjadi pendorong peningkatan produktifitas ekonomi dimasa datang dengan memberikan perhatian khusus pada sektor yang berperan strategis dalam memenuhi konsumsi masyarakat, sektor yang mempunyai kandungan dan nilai tambah lokal serta berpotensi ekspor, sektor yang memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta memberikan '*multiplier effect*' yang cukup besar terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya. Beberapa sektor tersebut antara lain sektor pertanian, peternakan dan perikanan kelautan, pertambangan, industri dan jasa perdagangan.

Tantangan pokok yang dihadapi daerah dalam jangka pendek dan menengah masih tertumpu pada ketergantungan ekonomi daerah pada sektor fiskal. Oleh karena itu dalam jangka pendek kebijakan ekonomi daerah harus didukung oleh tumbuhnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor investasi masyarakat melalui perbaikan stabilitas politik daerah, peningkatan kepastian hukum, berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*) untuk (1) mengurangi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang menghambat tumbuhnya iklim usaha yang sehat, (2) mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat (3) perbaikan citra daerah sebagai satu kesatuan utuh untuk membangun daya saing dan promosi daerah.

Sebagai bagian integral dari pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan ekonomi 2011-2015 diharapkan juga dapat memperkuat kelembagaan ekonomi yang akan tercermin pada:

1. Peningkatan kualitas pertumbuhan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik pada tahun 2014 diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin.





2. Peningkatan produktifitas daerah

Sumber pertumbuhan harus diarahkan tidak hanya bertumpu pada akumulasi modal tetapi juga harus merupakan kontribusi produktifitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan produktifitas daerah yang meningkat akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*).

3. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah.

Pada sisi produksi, penguatan sektor-sektor ekonomi akan merupakan sumber pertumbuhan yang beragam dan memperkuat basis perekonomian daerah. Pada sisi pembiayaan, kekuatan ekonomi daerah harus didukung oleh berkembangnya diversifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangun. Stimulus fiskal melalui APBD/APBN harus berkembang seiring dengan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya. Peranan inverstasi swasta dan masyarakat serta peranan lembaga-lembaga keuangan harus juga ditumbuhkembangkan sebagai pilar penting bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam periode mendatang, kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu elemen strategis kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk lebih dapat memberikan stimulus fiskal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan pengelolaan anggaran diarahkan pada upaya pencapaian pengelolaan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*). Fiscal sustainability harus dapat menjamin terwujudnya ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang serta tumbuhnya produktifitas sektor-sektor riil yang dapat menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan (*economic sustainability*).

Kebijakan anggaran sedapat mungkin dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan menghindari terjadinya defisit anggaran dengan mengedepankan keseimbangan rasionalitas pendapatan dan belanja atau menargetkan surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan bagi pembentukan dana cadangan untuk membiayai program-program strategis multi years.

E. Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015

Prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015. diarahkan Untuk lebih mempercepat pencapaian target utama dari program-program prioritas tersebut, maka 3 (tiga) sektor fokus yang diharapkan dapat menjadi sektor basis (*base sectors*) pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:





- ✓ Sektor pendidikan.
- ✓ Sektor kesehatan.
- ✓ Sektor infrastruktur wilayah.

Pengembangan ketiga sektor Utama ini diarahkan untuk menjadi penopang dan pembuka peluang bagi berkembangnya sektor-sektor pembangunan daerah lainnya.

Sedangkan untuk memperkuat daya tumbuh bagi pembangunan ekonomi daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, program strategis Kabupaten Bone Bolango yang akan menjadi program unggulan (*leading program*), yakni:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Pengembangan Pariwisata Daerah.
3. Pengembangan Usaha Pertanian dan Perikanan.
4. Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sumber Daya Lokal (Resources Base).

Mencermati isu-isu strategis nasional dan regional serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, maka tema pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tema Pembangunan Tahun 2011 **“Desa Tumbuh Daerah Maju”**
2. Tema Pembangunan Tahun 2012 **“Desa Tumbuh Daerah Maju”**
3. Tema Pembangunan Tahun 2013 **“Desa Tumbuh Daerah Maju” (Kambungu Tumumulo Lipu Lumayi’o)**
4. Tema pembangunan Tahun 2014 **“Memperkuat Kemampuan Lokal (Strengthening Local Capability) Menuju Desa Tumbuh Daerah Maju”**.
5. Tema Pembangunan Tahun 2015 **“Memantapkan Kondisi Perekonomian Daerah Melalui Peningkatkan Kualitas Sdm Dan Pendayagunaan Sda Yang Berwawasan Lingkungan Menuju Desa Tumbuh Daerah Maju”**

Tema-tema pembangunan daerah tersebut, kesemuanya diarahkan pada penguatan kemampuan daerah agar lebih berdaya saing dan tumbuh lebih baik berbasis potensi keunggulan lokal dengan mengedepankan desa sebagai basis pertumbuhan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Penguatan kemampuan lokal membutuhkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang lebih baik serta sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

Disamping itu Percepatan pembangunan desa menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang dilakukan secara bersama-sama





antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat berlandaskan pada semangat kegotongroyongan (*huyula*). Kebijakan *Desa Tumbuh Daerah Maju* diarahkan pada pencapaian kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa, perbaikan infrastruktur desa, penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan ekonomi desa berbasis keunggulan lokal.

Percepatan Rencana pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berkesinambungan, sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Korelasi Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah
Tahun 2011-2015

No	Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2009 – 2014)	No	Program Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2011-2015)	No	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2014)
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1.	Reformasi Birokrasi	1.	Perluasan upaya penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pencapaian sasaran MDG's 2015.
2.	Pendidikan	2.	Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2.	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
3.	Kesehatan	3.	Peningkatan pelayanan publik	3.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah yang merata dan berkualitas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
4.	Penanggulangan Kemiskinan	4.	Penegakan supremasi hukum	4.	Peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan memperkuat keunggulan daerah.
5.	Ketahanan Pangan	5.	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu	5.	Peningkatan kapasitas birokrasi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
6.	Infrastruktur	6.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		
7.	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	7.	Penyetaraan gender, perlindungan anak dan manula		
8.	Energi	8.	Peningkatan pendapatan masyarakat		
9.	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	9.	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan lokal		
10.	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	10.	Optimalisasi pengelolaan obyek wisata sebagai sumber pendapatan daerah		
11.	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	11.	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas		
12.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	12.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan		
13.	Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat				

Sinergitas sasaran, prioritas pembangunan daerah, provinsi dan nasional terus dijaga konsistensinya agar terjaga kesinambungan, keseimbangan serta keterpaduan dalam pelaksanaan sehingga efektivitas program pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.





BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Tahun Anggaran 2014 penyusunan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana





telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2011 - 2015 dan sesuai dengan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan, maka dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi;





- b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis punggutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
- c. Pemanjapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- f. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- g. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

2. Realisasi Pendapatan

Tabel 3.1
Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	PAD :	15.645.914.574,33	15.949.603.066,28	20.749.610.697,98	44.670.045.826,72
	Pajak Daerah	1.368.706.120,00	1.972.031.988,00	3.002.222.157,00	5.193.103.143,00
	Retribusi Daerah	2.770.503.810,00	1.313.661.174,00	925.619.084,00	729.769.545,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	113.700.775,00	746.489.804,00	419.540.958,00
	Lain - Lain PAD yang Sah	11.506.704.644,33	12.550.209.129,28	16.075.279.652,98	38.327.632.180,72
2	Dana Perimbangan :	318.637.523.275,00	376.550.311.400,00	431.415.589.695,00	480.946.361.552,00
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan Pajak	23.921.816.275,00	24.245.161.400,00	21.406.697.695,00	19.691.551.552,00
	Dana Alokasi Umum	267.662.207.000,00	318.414.380.000,00	367.000.042.000,00	408.500.750.000,00
	Dana Alokasi Khusus	27.053.500.000,00	33.890.770.000,00	43.008.850.000,00	52.754.060.000,00
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah :	110.973.843.807,00	45.081.353.957,00	89.004.120.278,00	79.161.896.517,00
	HIBAH	80.520.000,00	-	-	2.000.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Daerah Lainnya	6.044.287.367,00	4.977.851.767,00	9.008.170.278,00	12.981.632.317,00
	Dana Penyesuaian	104.849.036.440,00	37.288.508.000,00	72.858.457.000,00	57.228.505.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	5.879.300.000,00	3.325.424.700,00
	Lain - Lain PAD yang Sah	-	2.814.994.190,00	1.258.193.000,00	3.626.334.500,00
	Jumlah	445.257.281.656,33	437.581.268.423,28	541.169.320.670,98	604.778.303.895,72
	TOTAL REALISASI PENDAPATAN DAERAH PERIODE 2011 - 2015			2.028.786.174.646,31	





Jika dilihat dari tabel 3.2 tersebut terlihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango pada periode tahun 2011 – 2015 sebesar Rp.2.729.138.888.089,69 dengan realisasi hingga tahun 2014 sebesar Rp.2.028.786.174.646,31 atau sebesar 74,74,34%.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain PAD yang Sah.

Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango berdasarkan tabel 3.2 pada Tahun 2011 direalisasikan sebesar Rp. 15,645,914,574.33 atau mencapai 141.28% dari target sebesar Rp.11,074,161,153.00. Tahun 2012 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.15,949,603,066.28 atau 131,63% dari target sebesar Rp.12,116,969,000.00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp.303,688,491.95 atau naik sebesar 1.94% dibanding realisasi tahun 2011. Tahun 2013 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 20,749,610,697.98 atau 125.63% dari target sebesar Rp. 16,516,211,250.44 yang berarti pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,800,007,631.70 atau naik sebesar 30.09% dibanding realisasi tahun 2012. Tahun 2014 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.44,670,045,826.72 atau 101.57% dari target sebesar Rp.43,977,484,925.47. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.23,920,435,128.74 atau naik sebesar 115.28% dibanding realisasi tahun 2013. Berdasarkan data tersebut maka PAD Kabupaten Bone Bolango mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dimana pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.303.688.491,95 atau sebesar 2%. Pada tahun 2012 naik sebesar 4.800.007.631,70 atau sebesar 30% dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 23.920.435.128,74 atau sebesar 115%. Kenaikan PAD pada tahun 2014 ini disebabkan oleh realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 realisasi pajak daerah sebesar Rp.3.002.222.157 dan tahun 2014 sebesar Rp.5.193.103.143 atau meningkat sebesar 72,98%. Trend peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik III-1 berikut :





Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 mengalami peningkatan PAD yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh hasil penjualan asset yang dipisahkan sebesar Rp.446.142.080,00 penerimaan jasa giro sebesar 958.717258,94, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Toto Kabila sebesar Rp.23.843.896.667,02 dan dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan realisasi penerimaan BLUD Rumah Sakit Toto Kabila disebabkan oleh meningkatnya pelayanan yang diberikan dengan bertambahnya vasilitas gedung rumah sakit. Realisasi dana kapaitasi JKN di tahun 2014 sebesar 5.729.085.500,00 sedangkan pada tahun 2013 tidak terdapat dana kapitasi JKN.

b. Dana Perimbangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari atas: (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak





terdiri atas: a). Bagi Hasil Pajak yang meliputi: (1) DBH. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) DBH. PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 (WPOPDN); dan DBH. PPh Pasal 21 (3) DBH Sumbangan Pendukung PBB. b). Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meliputi; (1) Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan; (2) Alokasi DBH. Sumber Daya Alam Perikanan; dan (3) DBH. Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan (6) DBH Cukai Hasil Tembakau.

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Penerimaan daerah dari Dana Perimbangan pada periode tahun 2011–2015 direncanakan sebesar Rp.2.125.455.111.804,84 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.607.549.785.922,00 atau sebesar 75,63%. Kecilnya persentase realisasi dana perimbangan disebabkan oleh realisasi dana perimbangan pada tahun 2015 belum dapat dihitung.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Hibah

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Provinsi.

2. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari a). Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi yang meliputi: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (AP) (5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok.

3. Bantuan Penyesuaian

Penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

4. Bantuan Keuangan dari provinsi

Penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperoleh dari Provinsi Gorontalo.





3. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama dan solusi berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Permasalahan :

Walaupun pencapaian PAD melebihi target yang ditetapkan, namun masih terdapat kendala-kendala diantaranya adalah sebagai berikut ;

- a) Sejumlah isu yang mengemuka dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, antara lain berkaitan dengan aspek kebijakan.
- b) Belum seluruhnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mempunyai Perda sebagai payung hukum pemungutan PDRD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Sebagian objek PDRD sebelumnya dilegalkan oleh daerah tetapi dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak diperbolehkan, seperti;
 1. Retribusi Jasa Ketatausahaan
 2. Retribusi Izin Lokasi
 3. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
- c) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kewajiban membayar PDRD.
- d) Kurangnya dukungan SDM yang memadai dalam menunjang pelaksanaan pemungutan.
- e) Kurangnya sarana/fasilitas yang tersedia untuk pemungutan retribusi daerah.
- f) Ada beberapa sektor potensi objek PDRD yang belum termonitoring/terkelola dengan baik

Solusi :

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam peningkatan realisasi PAD perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perlu melakukan investasi/penanaman modal pengembangan BUMD, pengelolaan pariwisata maupun pengelolaan PDAM.
- b) Menaikkan NJOP dan standar penetapan minimal PBB.
- c) Memaksimalkan pemungutan PDRD sesuai Perda Pajak Daerah tahun 2011, Retribusi Jasa Usaha tahun 2011 dan dalam tataran pelaksanaan harus ditunjang dengan Peraturan Bupati dan SOP.





- d) Melakukan sosialisasi tentang PDRD sesuai Perda Pajak Daerah tahun 2011, Retribusi Jasa Usaha tahun 2011 dan Peraturan Bupati serta SOP tentang PDRD.
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang untuk peningkatan pelayanan masyarakat baik sektor perhubungan, peternakan, perdagangan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain.
 - f) Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan dinas teknis yang terkait dengan pengelolaan PDRD.
 - g) Perlu melakukan pendampingan/magang ke KPPP untuk pengembangan SDM terkait pengelolaan PDRD.
 - h) Pengkajian potensi objek PDRD yang didukung dengan fasilitas dan teknologi.
- b. Dana Perimbangan
- Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya;

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.



Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Tahun 2011, target belanja daerah sebesar Rp.451.209.385.079,61 dapat direalisasikan sebesar Rp.411.641.648.311,00 atau 91.23%. Tahun 2012, target belanja daerah sebesar Rp.482.168.950.355,27 realisasi sebesar Rp.452.939.914.165,00 atau 93.94%. Pada Tahun 2013, target sebesar Rp.571.701.728.669,58 realisasi sebesar Rp.548.809.492.071,00 atau 96.00%. Target belanja daerah pada Tahun 2014 sebesar Rp.647.839.631.721,96 dengan realisasi sebesar Rp.571.770.370.417,80 atau 88.26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi belanja Kabupaten Bone Bolango di bawah ini :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

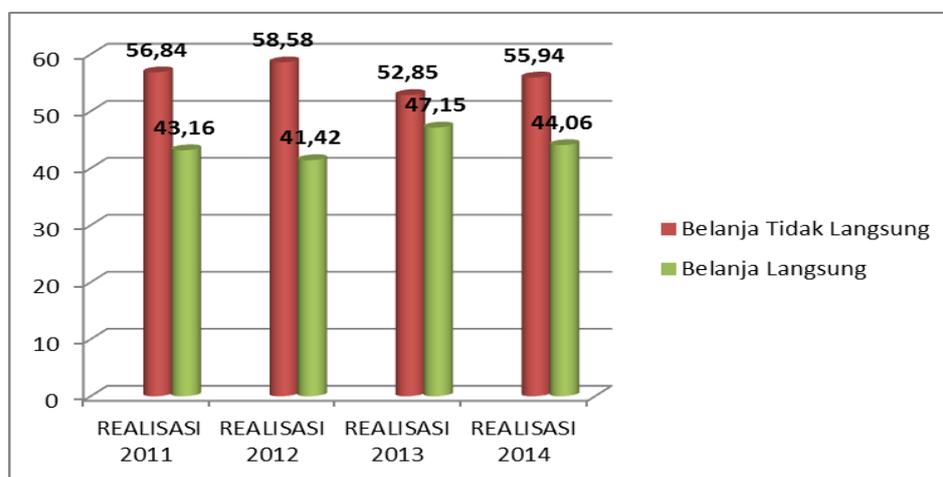
Uraian	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	TOTAL BELANJA DAERAH PERIODE 2011 - 2014	TARGET 2015
Belanja Tidak Langsung	230,671,822,348.00	265,346,907,682.00	282,970,500,865.00	316,021,233,338.00	1,095,010,464,233.00	417,094,351,348.00
- Belanja Pegawai	203,320,166,917.00	240,029,485,436.00	251,635,316,812.00	275,996,256,838.00	970,981,226,003.00	360,920,596,881.00
- Belanja Hibah	8,254,175,961.00	5,904,990,000.00	7,328,983,053.00	3,893,729,700.00	25,381,878,714.00	12,529,780,000.00
- Belanja Bantuan Sosial	9,005,156,789.00	4,670,374,000.00	6,337,534,000.00	10,531,246,800.00	30,544,311,589.00	6,400,000,000.00
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	25,600,000,000.00	25,600,000,000.00	36,591,070,967.00
- Bantuan Keuangan	9,766,369,506.00	286,098,500.00	768,667,000.00	-	10,821,135,006.00	-
- Belanja Tidak Terduga	325,953,175.00	14,455,959,746.00	16,900,000,000.00	-	31,681,912,921.00	652,903,500.00
Belanja Langsung	180,969,825,963.00	187,593,006,483.00	265,838,991,206.00	255,749,137,079.80	890,150,960,731.80	293,366,040,956.00
- Belanja Pegawai	21,156,254,647.00	27,386,613,060.00	38,603,151,126.00	39,985,878,284.00	127,131,897,117.00	48,568,934,000.00
- Belanja Barang dan Jasa	67,708,823,353.00	71,590,113,202.00	82,143,586,426.00	94,151,565,422.80	315,594,088,403.80	108,650,905,246.00
- Belanja Modal	92,104,747,963.00	88,616,280,221.00	145,092,253,654.00	121,611,693,373.00	447,424,975,211.00	136,146,201,710.00
TOTAL	411,641,648,311.00	452,939,914,165.00	548,809,492,071.00	571,770,370,417.80	1,985,161,424,964.8	710,460,392,304.00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango



Belanja sebagaimana yang dijelaskan pada table di atas, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang jika dilihat dari komposisinya masih dinilai baik. Untuk tahun 2011, komposisi belanja tidak langsung sebesar 56,84% dan belanja langsung sebesar 43,16%. Untuk tahun 2012, komposisi belanja tidak langsung 58,58% dan belanja langsung sebesar 41,42%. Selanjutnya pada tahun 2013, alokasi belanja tidak langsung menjadi 52,85% dan sisanya sekitar 47,15% dialokasikan untuk belanja langsung. Sementara pada tahun 2014, porsi anggaran belanja tidak langsung mencapai 55,94% dan belanja langsung sebesar 44,06%. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3-2 berikut :

Grafik 3.2
Komposisi Realisasi Belanja
Kabupaten Bone Bolango



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan penjelasan tentang realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah maka total realisasi pendapatan daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar Rp.2.028.786.174.646,31 sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.985.161.424.964,80. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sangat baik yakni sebesar 97,85 %.

C. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi



selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Total pembiayaan daerah periode 2011 – 2014 sebesar Rp. 100.670.669.322,82. Untuk lebih jelasnya tentang rincian pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014

URAIAN	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	TOTAL PEMBIAYAAN DAERAH PERIODE 2011 - 2014
Penerimaan Pembiayaan Daerah	19,499,059,071.61	47,879,724,201.71	30,564,969,538.26	19,224,798,138.24	117,168,550,949.82
Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari :					
- SiLPA - Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	711,867,444.55	0.00	711,867,444.55
- Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,264,526,270.96	0.00	584,652,000.00	152,903,500.00	4,002,081,770.96
- Kewajiban kepada pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0.00	0.00	4,445,777,778.52	1,421,569,331.34	5,867,347,109.86
- Kegiatan Lanjutan	16,234,532,800.65	47,879,724,201.71	24,824,350,468.65	17,650,325,306.90	106,588,932,777.91
- Koreksi SiLPA	0.00	0.00	(1,678,153.46)	0.00	(1,678,153.46)
- Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,199,601,387.00	3,098,280,240.00	3,700,000,000.00	7,500,000,000.00	16,497,881,627.00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Terdiri dari:					
- Penyertaan Modal pada PT Bank Sulut	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
- Penyertaan Modal pada BUMD Bone Bolango Cemerlang	0.00	650,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	3,650,000,000.00
- Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Bone Bolango	0.00	500,000,000.00	2,200,000,000.00	3,000,000,000.00	5,700,000,000.00
- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,199,601,387.00	1,948,280,240.00	0.00	0.00	4,147,881,627.00
JUMLAH	17,299,457,684.61	44,781,443,961.71	26,864,969,538.26	11,724,798,138.24	100,670,669,322.82

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2011 besarnya penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan kegiatan lanjutan, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok utang jatuh tempo. Pada tahun 2012 penerimaan pembiayaan daerah hanya diperoleh dari kegiatan lanjutan dan pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD Bone Bolango Cemerlang, penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Bone Bolango dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.





Tahun 2013 penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari SiLPA-Pelampauan Penerimaan PAD, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan kegiatan lainnya yang dikurangi dengan koreksi SiLPA. Untuk pengeluaran pembiayaan di digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Sulut, BUMD Bone Bolango Cemerlang dan PDAM Bone Bolango. Pada tahun 2014 penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan kegiatan lanjutan dan besarnya pengeluaran daerah dalam pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sulut, BUMD Bone Bolango Cemerlang dan PDAM Kabupaten Bone Bolango.





BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah menuju masyarakat Bone Bolango yang bermartabat.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan capaian kinerja hasil dan kinerja output serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Urusan dan bidang pemerintahan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang berjumlah 52 instansi. Disisi penganggaran telah dianggarkan urusan pemerintahan yang bersifat langsung sebesar Rp. 1.183.517.001.688 (*Satu Trilyun Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta seribu Enam Ratus Delapan puluh Delapan Rupiah*), yang terealisasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 890.150.960.732 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dan rencana realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 293.366.040.956 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) secara rinci terbagi dalam belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan dalam anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam pencapaian target-target kinerja selama 5 (lima) tahun sebagai berikut

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Pada pelaksanaan urusan wajib pemerintahan terdiri dari beberapa bidang pembangunan meliputi:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan
5. Bidang Penataan Ruang
6. Bidang Perencanaan Pembangunan





7. Bidang Perhubungan
8. Bidang Lingkungan Hidup
9. Bidang Pertanahan
10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Bidang Keluarga Berencana
13. Bidang Sosial
14. Bidang Ketenagakerjaan
15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Bidang Penanaman Modal
17. Bidang Kebudayaan
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
20. Bidang otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah
21. Bidang Ketahanan Pangan
22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
23. Bidang Statistiki
24. Bidang Kearsipan
25. Bidang Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib telah dianggarkan sebesar Rp. 1.035.033.837.487 dimana tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan sebesar Rp. 779.701.408.188 dan direncanakan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 255.332.429.299. adapun pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja urusan wajib pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Kebijakan nasional pembangunan difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, dengan maksud mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selain difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, juga difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang merupakan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Guna mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah Peningkatan mutu layanan pendidikan guna meningkatnya angka partisipasi pendidikan dan peningkatan mutu lulusan pada semua jenjang





pendidikan, perbaikan angka melek huruf, dan capaian prestasi bidang pendidikan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Urusan Wajib Pendidikan pada tahun 2011-2015 ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, 1 (satu) UPT dan 1 (satu) kecamatan yaitu Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Kecamatan Tilongkabila. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang pendidikan telah dianggarkan sebesar Rp. 146.582.292.741 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 120.530.991.241 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 26,051,301,500. Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Program pendidikan anak usia dini, dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini selama tahun 2011-2014 dan rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.1
Capaian Kinerja Output Program Pendidikan Anak Usia Dini*

NO	Kegiatan	Sat	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Target 2015	Total
1	Pembangunan PAUD	Unit	3	2	20	1	1	27
2	Kelompok Paud yang dibina	Klpk	148	156	160	165	165	634
3	Pengadaan Alat Peraga Edukatif	Unit	-	-	2	4	2	8

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango

Adapun kegiatan penunjang program selang tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan perlengkapan PAUD dengan anggaran terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,-
2. Insentif Tenaga Pendidik, Medis dan Penyelenggara PAUD dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 494.800.000
3. Penyelenggaraan PAUD (SKB) selama 5 tahun dengan anggaran terlealisasi sebesar Rp. 7.500.000
4. Penyelenggaraan Kegiatan HAI Jambore dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 11.320.000





5. Penyelenggaraan Kegiatan Hari AkHAN dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 44.840.000
6. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah taman bermain dan anak PAUD sebanyak 1 Unit dengan anggaran realisasi sebesar Rp.56.754.900
7. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 2.873.500
8. Pengadaan alat permainan edukatif (APE) Dalam dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 1.520.000
9. Pengadaan alat permainan edukatif (APE) Luar sebanyak 1 Paket dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 11.750.000

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dengan anggaran Rp. 53.908.000

2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011-2014 dan rencana kegiatan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.2
Capaian Kinerja Output Peningkatan Sarana
dan prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*

NO	Kegiatan	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Target 2015	Total
1	Pembangunan RKB SDN	Unit	3	36	20	2	1	62
2	Pembangunan RKB SMPN	Unit	N/A	4	6	5	16	31
3	Rehabilitasi Bangunan SDN	Unit	N/A	50	25	38	16	129
4	Rehabilitasi Bangunan SMPN	Unit	N/A	5	5	15	2	27
5	Pembangunan Perpustakaan SDN	Unit	N/A	5	9	-	1	15
6	Pembangunan Perpustakaan SMPN	Unit	N/A	1	4	-	-	5
8	Pembangunan Laboratorium SMPN	Unit	N/A	6	1	-	-	7
10	Pengadaan Alat Peraga SMPN	Set	N/A	27	-	139	108	274
12	Pengadaan Alat Laboratorium SMPN	Set	N/A	6	-	-	-	6

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango





Adapun kegiatan penunjang lainnya untuk menunjang program adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pelengkapan KBM Paket B sebanyak 6 Unit dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 10.000.000
2. Jasa perencanaan (DED) Pembangunan sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.395.000
3. Jasa perencanaan (DED) Rehab ruang kelas sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.451.206
4. Jasa perencanaan (DED) pembangunan RKB sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran teralisasi sebesar Rp. 71.696.654
5. sosialisasi dan Bimtek Peningkatan mutu Pendidikan Sebanyak 300 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 191.226.500
6. Penyelenggaraan Paket A sebanyak 300 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 11.334.000
7. Penyelenggaraan Paket B sebanyak 1 Kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 31.493.000
8. Kegiatan pengembangan minat, bakat siswaselama 4 Tahun dengan berbagai jenis lomba Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 506.6420.500
9. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan kreativitas siswa SD/SMP sebanyak 69 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.018.500
10. Pelaksanaan ujian Akhir (UAS) SD/MI dan SMP/MTs selama 4 tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 392.644.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan buku teks pelajaran siswa dan buku pegangan guru SD sebanyak 14071 tema per paket dengan anggaran Rp. 1.059.215.000
2. Pengadaan buku teks pelajaran siswa dan buku pegangan guru SMP sebanyak 4946 tema per paket dengan anggaran Rp. 557.800.000
3. Pengadaan Peralatan pendidikan matematika SD sebanyak 80 paket dengan anggaran Rp. 942.872.000
4. Pengadaan peralatan pendidikan seni budaya dan keterampilan SD sebanyak 90 paket dengan anggaran Rp. 381.375.000
5. Pelaksanaan UN/US paket B setara SMP dengan anggaran Rp. 6.097.000
6. Pelaksanaan program sekolah berbasis standar nasional pendidikan (SBSNP) terhadap 4 sekolah dengan anggaran Rp. 100.000.000
7. Pelaksanaan O2SN SD dengan anggaran Rp. 61.250.000





8. Pelaksanaan O2SN SMP dengan anggaran Rp. 48.275.000
9. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (SD/MI) dengan anggaran Rp. 14.400.000
10. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (SMP) dengan anggaran Rp. 14.400.000
11. Pelaksanaan lomba FLS2N SD dengan anggaran Rp. 19.400.000
12. Pelaksanaan lomba FLS2N SMP dengan anggaran Rp. 19.883.000
13. Pelaksanaan Ujian Akhir (UAS) SD/MI dengan anggaran Rp. 58.297.000

3) Program pendidikan menengah

Penyelenggaraan Pendidikan menengah selang tahun 2011-2014 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.3
Capaian Kinerja Output Peningkatan Sarana
dan prasarana Pendidikan Menengah*

NO	Kegiatan	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Target Tahun 2015	Total
1	Pembangunan RKB SMA/SMK	Unit	N/A	1	1	5	6	13
3	Rehabilitasi Bangunan SMA/SMK	Unit	N/A	N/A	3	7	2	12
5	Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK	Unit	N/A	1	5	3	-	9
6	Pembangunan Laboratorium SMA/SMK	Unit	N/A	N/A	5	8	8	21
7	Pengadaan Alat Peraga SMA/SMK	Set	N/A	N/A	1	5	9	15

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango

Adapun kegiatan penunjang untuk mendukung program antara lain :

1. Pengadaan marching band sebanyak 2 Paket dengan anggaran sebesar Rp. 293.600.000
2. Pengadaan perlengkapan sekolah sebanyak 15 Mapel/Pak denganrealisasi anggaran sebesar Rp. 370.990.000
3. Penyelenggaraan Paket C sebanyak 1 Kolompok dengan t anggaran sebesar Rp. 40.953.500
4. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK sebanyak 20 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.771.500





Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa sebanyak 4200 mapel per paket dengan anggaran Rp. 956.600.000
 2. Penyelenggaraan paket C dengan anggaran Rp. 19.622.000
 3. Pembelajaran kontekstual bagi guru mata pelajaran sebanyak 2 kegiatan dengan anggaran Rp. 50.000.000
 4. Pelaksanaan olimpiadelomba dan festival bakat dan kreatifitas siswa SMA/SMK dengan 6 kegiatan dan anggaran Rp. 130.691.500
 5. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional dengan anggaran Rp. 14.695.000
- 4) Program pendidikan non formal, Penyelenggaraan Pendidikan non formal selama 4 tahun telah dilaksanakan beberapa agenda kegiatan antara lain :**
1. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal sebanyak 350 Orang dengan anggaran realisasi saebesar Rp. 1.204.725.000
 2. Insentif pengelola dan pendidik PAUD sebanyak 350 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 897.225.000
 3. Penyelenggaraan kegiatan keaksaraan sebanyak 4 Kelompok dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.965.000
 4. Pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan formal sebanyak 2 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.850.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pemberdayaan honor tenaga pendidik non formal sebanyak 250 orang dengan anggaran Rp. 1.020.000.000
 2. Pemberian bantuan bagi lembaga kursus sebanyak 1 kelompok dengan anggaran Rp. 25.000.000
 3. Penyelenggaraan kegiatan Jambore PTK PNFI dengan anggaran Rp. 37.587.500
 4. Penyelenggaran hari aksara nasional dengan anggaran Rp. 36.687.500
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan selama 4 tahun telah dilaksanakan beberapa agenda kegiatan antara lain :**
1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik sebanyak 150 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.704.500
 2. Pelaksanaan sertifikasi guru sebanyak 4 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.660.100
 3. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi pendidikan sebanyak 150 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.103.500



4. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 150 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.690.500
5. Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas sebanyak 358 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.297.500
6. Pelaksanaan kegiatan lomba pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.203.000
7. Bimtek peningkatan mutu dan kualitas pendidik sebanyak 238 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.700.000
8. Penilaian angka kredit sebanyak 400 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.233.000
9. Penilaian angka kredit (PAK) Guru sebanyak 400 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.700.000
10. Pelaksanaan pemberian penghargaan PTK terpilih dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.000.000
11. Pelaksanaan rekrutmen guru kontrak untuk ditempatkan di SD, SMP, SMA dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 331.126.000

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelaksanaan pemilihan PTK berprestasi dengan anggaran Rp. 143.125.000
 2. Pelaksanaan penilaian angka kredit (PAK) guru dan pengawas dengan anggaran Rp. 60.175.000
 3. Pembayaran honor guru kontrak daerah terpencil serta operasional pengawas dan penilik dengan anggaran Rp. 3.241.800.000
- 6) Program manajemen pelayanan pendidikan, kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 tahun antara lain :**
1. Pelaksanaan UN/US, SD/Mi, SMP/MTs, SM selama 4 Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 147.996.750
 2. Penggunaan ICT dalam menunjang informasi pendataan online dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.700.000

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penghargaan untuk guru tingkat Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran Rp. 100.000.000
2. Penyusunan profil pendidikan tahun pelajaran 2015/2016 dengan anggaran Rp. 33.300.000
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran Rp. 75.060.000



b. Capaian Kinerja dari pelaksanaan program

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan pada urusan pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- Jika dilihat dari perkembangan angka melek huruf pada tahun 2014 ini dibandingkan 2 tahun sebelumnya terjadi peningkatan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

*Tabel 4.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan*

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	N/A	1.642	1.148	1.218
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	N/A	17.802	18.760	31.346
3	Angka melek huruf	N/A	95,81%	96,47%	96,5%

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

- Sedangkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, demikian pula untuk APS SMP/MTs.
- Kondisi ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, akan tetapi untuk SMP/MTs mengalami penurunan
- Meningkatnya kualitas bangunan sekolah serta tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai dapat mewujudkan suasana yang nyaman bagi siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar.
- Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum pendidikan karakter melalui pelaksanaan workshop guru dalam rangka pematapan pendidikan karakter;
- Meningkatnya layanan pendidikan luar sekolah setara SD, SMP, dan SMA dengan terlaksananya pembelajaran paket A, paket B, dan paket C;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, melalui workshop dan pembinaan guru lewat forum KKG/MGMP;
- Meningkatnya kualitas perencanaan program pendidikan, melalui rapat koordinasi awal tahun pelajaran;





- Terpetakannya kondisi kapasitas dan kompetensi guru bersertifikat;
- Meningkatnya pemahaman aturan dan regulasi pendidikan, melalui sosialisasi dan advokasi peraturan dan regulasi pendidikan;
- Untuk capaian indikator kinerja bidang pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Capaian Kinerja APM, APK dan APS

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014
ANGKA PARTISIPASI MURNI					
1	SD/MI/Paket A	95,34 %	97,96 %	96,52 %	91,06 %
2.	SMP/MTs/Paket B	40,84 %	50,39 %	49,65 %	55,11%
3.	SMA/MA/Paket C	30,31 %	52,76 %	47,52 %	52,13%
ANGKA PARTISIPASI KASAR					
1.	SD/MI/Paket A	114,6 %	102,97 %	100,62 %	
2.	SMP/MTs/Paket B	73,29 %	93,35 %	79,53 %	
3.	SMA/MA/Paket C	48,69 %	93,35 %	47,91 %	
ANGKA PUTUS SEKOLAH					
1.	SD/MI/Paket A	0,9	1,3	0,40 %	0,37%
2.	SMP/MTs/Paket B	0,56 %	1,6 %	0,57 %	0,79%
3.	SMA/MA/Paket C	0,69 %	0,52 %	0,89 %	0%
ANGKA KELULUSAN					
1.	SD/MI/Paket A	95,4 %	100 %	100 %	100 %
2.	SMP/MTs/Paket B	99,45 %	100 %	100 %	100 %
3.	SMA/MA/Paket C	93,68 %	99,73 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango





Adapun prestasi diperoleh di bidang pendidikan adalah:

1. Juara umum Marcing band tingkat regional perolehan 24 medali emas dari 25 kategori yang diperlombakan
2. Peringkat I, II, dan III Karikatur Tingkat SMP se- Provinsi pada tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan

- 1) Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Pendidikan SD/MI disebabkan beberapa kegiatan fisik berupa pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas atau gedung perpustakaan dilakukan secara swakelola, sedangkan tenaga yang ada dari sisi kompetensi masih rendah, maka diharapkan dalam pelaksanaannya panitia pembangunan yang dibentuk ditingkat sekolah melibatkan tenaga yang berkompetensi dari unsur Komite Sekolah;
- 2) Belum optimalnya Perencanaan pendidikan baik dalam penyusunan program seperti penyesuaian jadwal pembelajaran, liburan sekolah yang disesuaikan dengan target-target pembelajaran, disamping itu penentuan sasaran peyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah belum disesuaikan dengan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APS) sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sering mengalami keterlambatan
- 3) Belum optimalnya pembinaan bagi guru dalam meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan hal ini menghindari terjadinya penurunan mutu pendidikan yang disebabkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru yang tidak memenuhi standar kompetensi

b) Solusi

Adapun yang menjadi solusi berdasarkan permasalahan diatas adalah:

- 1) Perlu adanya dibangun database proyeksi pendidikan dimana didalamnya berisi data proyeksi pendidikan baik menyangkut ketenagaan, arus masuk dan keluar siswa setiap tahunnya sehingga penentuan program dan kegiatan lebih tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat waktu.
- 2) Seiring dengan perkembangan pendidikan dalam menghadapi eglobalisasi menuntut kompetensi guru yang lebih profesional dalam mengelola proses belajar mengajar yang lebih kreatif, inovatif serta sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa lebih cenderung





- memilih bersekolah diwilayahnya yang bisa dijangkau, tidak mengeluarkan biaya dibandingkan bersekolah ditempat lainnya.
- 3) Optimalisasi pemberian bantuan operasional bagi siswa yang kurang mampu sehingga terhindar dari drop out.
 - 4) Optimalisasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan untuk melihat tingkat efektivitas pemanfaatan prasarana sekolah termasuk didalamnya unit-unit pembelajaran, alat peraga, buku-buku pelajaran, serta proses belajar mengajar sehingga terhindar dari inefektivitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah kecamatan/provinsi dalam persiapan pelaksanaan terutama mengenai penetapan lokasi pembangunan sekolah, pembebasan lahan pembangunan sekolah
 - 6) Mendorong guru pada tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi kualitas sesuai Standar Pendidikan Nasional antara lain dengan melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pendidikan

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula dapat terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi salah satu sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 -2015. Kondisi pembangunan khususnya dibidang kesehatan sudah cukup baik, pemerintah daerah telah menyediakan semua sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang terjangkau. Saat ini pemerintah telah memberikan perhatian lebih kepada desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Bone Bolango, untuk mewujudkan pemerataan layanan terhadap masyarakat, termasuk kesehatan. Pembangunan Poskesdes dan ditempatkannya tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat di desa-desa terpencil tersebut, merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerataan jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango diberikan dengan maksud memberikan perlindungan kesehatan serta memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang kesehatan telah dianggarkan





sebesar Rp. 219,645,616,705 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 153,274,024,005 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 66,371,592,700. Terkait upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014 telah melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato, dengan rincian sebagai berikut

1) Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 20 PKM dengan total anggaran sebesar Rp.8.351.944.522,-
2. Pengadaan sarana prasarana Instalasi Farmasi sebanyak 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp.139.500.000,-
3. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat tentang POR sebanyak 330 Orang dengan anggaran sebesar Rp.14.989.525,-
4. Sosialisasi tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer sebanyak 163 Orang dengan anggaran sebesar Rp.92.649.525,-
5. Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat sebanyak 53 Orang dengan anggaran sebesar Rp.27.937.500,-
6. Operasional Pengelolaan Obat-obatan di 20 puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.159.420.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 2 Kali dengan anggaran sebesar Rp.4.326.000,-
2. Distribusi Obat sebanyak 1 Kali dengan anggaran sebesar Rp.8.600.000,-
3. Bimtek dan Monev Pengelolaan Obat di puskesmas Sebanyak 19 PKM dengan anggaran sebesar Rp.17.200.000,-

2) Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi/Penyuluhan/Diklat NAPZA dan HIV AIDS sebanyak 91 Orang dengan anggaran sebesar Rp.87.653.050,-





2. Pengadaan Bahan Logistik TFC sebanyak 1 Paket dengan total anggaran sebesar Rp.53.670.000,-
3. Kontrol Pasien Gizi Buruk Pasca Pulang oleh 3 Petugas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.20.760.000,-
4. Perbaikan Pasien Gizi Buruk pada 7 pasien dengan anggaran sebesar Rp.57.000.000,-
5. Operasional Perbikan Gizi Masyarakat diTFC yang dilaksanakan oleh 66 Petugas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.42.000.000,-
6. Sosialisasi Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 88 Orang dengan total anggaran sebesar Rp.58.195.500,- sebanyak 2 kali.
7. Peningkatan Kesadaran Gizi Masyarakat sebanyak 1 Kali dengan anggaran sebesar Rp.97.200.000,-
8. Pelatihan Surveillance Bagi Kader Desa Siaga 110 Orang dengan anggaran sebesar Rp.52.740.125,- sebanyak 3kali.
9. Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor dan Program Pembangunan MODS 56 Orang dengan anggaran sebesar Rp.17.862.050,-
10. Pertemuan Perencanaan Operasional Kegiatan Desa Siaga 56 Orang dengan anggaran sebesar Rp.17.862.050 sebanyak 2 kali.
11. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Model Operasional Desa siaga oleh 4 petugas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.29.620.000,-
12. Pelaksanaan Konsultasi dan Konsolidasi Proyek DHS oleh 4 petugas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.64.080.000,-
13. Pengambilan Sampel Depot Air Minum sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.57.185.000,-
14. Sosialisasi Program Pengembangan Kesehatan Terpadu sebanyak 81 Orang dengan anggaran sebesar Rp.12.922.500,-
15. Operasional Pengelolaan Rumah Sakit (Pembayaran Insentif tenaga ahli dan Honor Tenaga Medis Rumah Sakit) 740 Petugas Kesehatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.8.338.930.541,- untuk 2 Tahun.
16. Pelacakan Kasus Potensial KLB Di Masyarakat sebanyak 5 kali dengan anggaran sebesar Rp.51.912.500,-
17. Supervisi Tempat - Tempat Beresiko Tertularnya Penyakit Seksual sebanyak 1 kali dengan anggaran sebesar Rp.17.757.500,-
18. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program kesehatan sebanyak 52 Orang dengan anggaran sebesar Rp.32.642.000,-
19. Pelatihan Kader Jumatik sebanyak 45 Orang dengan anggaran sebesar Rp.18.126.000,-





20. Sosialisasi Tatalaksana Gigitan Hewan dan Penyebab Rabies dengan anggaran sebesar Rp.13.498.500,- sebanyak 1 Kali.
21. Pelatihan Survelance se Kab. Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp.14.981.000,- sebanyak 1 Kali.
22. Pembinaan dan Supervisi Ke Puskesmas sebanyak 8 Orang dengan anggaran sebesar Rp.15.870.000,-
23. Pelatihan Initiated Testing And Conseling HIV AIDS sebanyak 4 Orang dengan anggaran sebesar Rp.8.320.000,-
24. Operasional Puskesmas untuk 20 PKM dengan total anggaran sebesar Rp.1.441.329.800,- selama 4 Tahun.
25. Pelaksanaan Pembinaan Kepada Pemilik Sarana Air Bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan sebanyak 78 Depot Air Minum dengan total anggaran sebesar Rp.209.970.500,-
26. Penyusunan Dokumen Pemeriksaan sarana Air Minum Masyarakat (LAB PKA) dengan anggaran sebesar Rp.92.565.000,- 1 dokumen.
27. Pembinaan dan Supervisi Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.400.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pendampingan Pengembangan UKBM di PKM dalam mendukung gerakan mutiara berlian Sebanyak 19 PKM dengan anggaran sebesar Rp.19.705.000,-
2. Pemberian Dana Non Kapitasi JKN Sebanyak 1 PKM dengan anggaran sebesar Rp.101.722.500,-
3. Bimtek dan Monitoring Program survailans Sebanyak 20 PKM dengan anggaran sebesar Rp.26.600.000,-
4. pengambilan Sampel Air Depot Isi Ulang di wilayah Kerja PKM Sebanyak 1 kali dengan anggaran sebesar Rp.14.172.500,-
5. Operasional bagi Petugas Pengelola Gizi Masyarakat diTFC 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.18.579.200,-

3) Program pengawasan obat dan makanan

1. Bimbingan tentang pangan jajanan anak sekolah di 17 PKM dengan anggaran sebesar Rp.12.610.000,-
2. Pengawasan perijinan Pada sarana Pelayanan Swasta sebanyak 19 PKM dengan anggaran sebesar Rp.14.590.000,-
3. Pendataan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya sebanyak 20 PKM dengan anggaran sebesar Rp.14.800.000,-





Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengawasan Obat-obat Tradisional dan kosmetika di 17 PKM dengan anggaran sebesar Rp.17.390.000,-
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia**
 1. Lokakarya self Care dan pemanfaatan TOGA sebanyak 42 Orang dengan anggaran sebesar Rp.14.416.500,-
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**
 1. Sosialisasi/Penyuluhan Masyarakat Sadar AIDS sebanyak 49 Orang dengan anggaran sebesar Rp.28.651.000,-
 2. Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif sebanyak 126 Orang dengan anggaran sebesar Rp.102.619.000,-
 3. Penyusunan Dokumen Laporan Bimtek Monitoring dan Evaluasi sebanyak 3 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp.66.580.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Promosi Gerakan Mutiara Berlian melalui Elektronik Sebanyak 1 Bulan dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000,-
 2. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa Siaga Aktif Sebanyak 60 Orang dengan anggaran sebesar Rp.25.721.500,-
- 6) Program perbaikan gizi masyarakat**
1. Pelacakan Gizi Buruk sebanyak 25 PKM dengan total anggaran sebesar Rp.20.760.000,-
 2. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan gizi untuk 30 Orang dengan total anggaran sebesar Rp.107.575.000,-
 3. Pemberian MP ASI serta PMT untuk 50 Balita dengan total anggaran sebesar Rp.52.800.000,-
 4. Pelacakan Gizi Buruk sebanyak 2 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.57.500.000,-
 5. Pertemuan Sosialisasi Keluarga Sadar gizi (kadarzi) Bagi Pengurus PKK Kab. Bone Bolango & Kecamatan se Bone Bolango sebanyak 201 Orang dengan total anggaran sebesar Rp.35.715.000,-
 6. Sosialisasi Pos Daya oleh 11 Orang petugas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.11.897.000,-
 7. Kegiatan Pelacakan Anemia Bumil KEK sebanyak 1 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp.12.580.000,-



8. Bimtek Dan Monitoring Perbaikan Gizi sebanyak 1 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp.14.380.000,-
9. Pelaccakan Anemia Bumil KEK sebanyak 1 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp.19.360.000,-
10. Pemantauan Gizi Buruk Intervensi sebanyak 1 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp.20.180.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelaccakan Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK Sebanyak 19 Orang dengan anggaran sebesar Rp.16.480.000,-
2. Operasional TFC Sebanyak 60 orang dengan anggaran sebesar Rp.18.579.200,-

7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen hasil pengkajian pengembangan lingkungan sehat sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.34.900.000,-
2. Penyusunan Dokumen Sampel Hasil Pemeriksaan sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.21.800.000,-
3. Penyusunan Dokumen Pembinaan Sanitasi Bagi Petugas Pengolah Makanan dan Home Industri sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.197.050,-
4. Penyusunan Dokumen Pencegahan Penyakit Akibat Logam Berat dan Penataan Sanitasi di Wilayah Tambang sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.947.050,-
5. Konsultasi Lingkungan Sehat Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp.71.780.000,- sebanyak 1 Kali.
6. Pengambilan, Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel (Logam berat) sebanyak 2 Orang dengan anggaran sebesar Rp.11.560.000,-
7. Sosialisasi Pembinaan Sanitasi Bagi Petugas Pengolah Makanan dan Home Industri sebanyak 92 Orang dengan total anggaran sebesar Rp.12.760.000,-
8. Pemeriksaan Sampel Bakteriologis Sarana Air Bersih sebanyak 100 sampel dengan anggaran sebesar Rp.18.800.000,-
9. Sosialisasi/Penyuluhan/Diklat Dampak Mercury Bagi Masyarakat Penambang sebanyak 176 Orang dengan anggaran sebesar Rp.74.551.500,-
10. Monitoring Dan Evaluasi Program PL sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.55.830.000,-





Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pemeriksaan Sampel Air Bersih sebanyak 1 Kali dengan anggaran sebesar Rp.2.760.000,-
2. Road Show Penyuluhan 5 Pilar STBM di Pemukiman Sebanyak 17 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.11.480.000,-

8) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan kegiatan antara lain :

1. Fogging Sarang Nyamuk sebanyak 25 lokasi dengan anggaran sebesar Rp.86.622.000,-
2. Pelacakan penderita penyakit menular di 17 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.44.495.000,-
3. Pelaksanaan Surveillance Kabupaten di 17 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.93.995.000,-
4. Sosialisasi/Bimtek peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilaksanakan kepada 236 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.81.157.000,-
5. Pelatihan penanganan Kusta bagi 7 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.5.475.000,-
6. Pelaksanaan Training Manajemen Terpadu balita Sakit (MTBS) kepada 7 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.5.535.000,-
7. Pelatihan Kusta Bagi Petugas Pustu kepada 190 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.20.320.750,-
8. Training Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Puskesmas kepada 25 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.11.529.525,-
9. mengikuti Sosialisasi Program P2 10 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.26.080.000,-
10. Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.14.220.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Fogging Focus Sebanyak 15 lokasi dengan anggaran sebesar Rp.17.318.000,-
2. Pelacakan Penyakit Malaria Blood Survey (MBS) di 4 Desa dengan anggaran sebesar Rp.9.150.000,-

9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan antara lain :



1. Pertemuan Sinkronisasi Data Profil Dinas Kesehatan sebanyak 40 Orang dengan anggaran sebesar Rp.19.616.000,-
2. Pertemuan Pengurus Poskesdes sebanyak 56 Orang dengan anggaran sebesar Rp.89.601.000,-
3. Pelaksanaan Teknis SIKDA Generik Bagi Operator SIK Puskesmas Dan Dinas Kesehatan yang diikuti oleh 80 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.120.710.000,-
4. Pertemuan Sinkronisasi Data Profil Dinas Kesehatan yang diikuti oleh 64 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.22.520.500,-
5. Pertemuan Penilaian Pencapaian Program Melalui SPM yang diikuti oleh 166 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.129.940.000,-
6. Penilaian Pengolahan Data SIMPUS Bagi Operator Puskesmas dan Diknas yang diikuti oleh 48 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.120.960.000,-
7. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan se Kabupaten Bone Bolango yang diikuti oleh 92 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.45.960.000,-
8. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas yang diikuti oleh 6 petugas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.14.720.000,-
9. Sarana dan Prasarana Pendukung Pertemuan Penilaian Pencapaian Program Melalui SPM sebanyak 1 PKM dengan anggaran sebesar Rp.3.521.000,-
10. Sarana dan Prasarana Pendukung Penilaian Pengolahan Data SIMPUS Bagi Operator Puskesmas dan Diknas sebanyak 1 PKM dengan anggaran sebesar Rp.4.771.000,-
11. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan perencanaan dan Penganggaran Kesehatan se Kabupaten Bone Bolango sebanyak 1 PKM dengan anggaran sebesar Rp.9.241.000,-
12. Penyusunan dokumen naskah akademis standar pelayanan kesehatan sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.665.000,-
13. Penyusunan dokumen Penyusunan Profil Kesehatan 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.10.075.000,-
14. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2012 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.16.665.000,-





15. Penyusunan Dokumen Profil Kesehatan 2013 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.3.030.000,-
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kesehatan Berbasis Kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.13.242.500,-
17. Perencanaan Standar Pelayanan Kesehatan sebanyak 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.76.248.000,-
18. Monitoring Jaringan SIKDA Generik, Bimtek Penatausahaan Keuangan, Sinkronisasi Data Anggaran Belanja kesehatan dan Monitoring PAD di 20 Puskesmas dengan total anggaran sebesar Rp.139.670.000,-
19. Dokumen Validasi Data Tenaga Abdi, Kontrak dan Tenaga Honor, Monitoring, Evaluasi Kinerja Pegawai Tkt. Puskesmas, Distribusi Alat Kesehatan dan Monitoring/Pemeliharaan Jaringan SIMPUS sebanyak 4 dokumen dengan total anggaran sebesar Rp.231.035.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pertemuan Sinkronisasi Data profil Dinas Kesehatan Sebanyak 60 Orang dengan anggaran sebesar Rp.26.552.000,-
2. Pemutakhiran Data SIK Puskesmas sebanyak 20 PKM dengan anggaran sebesar Rp.16.990.000,-
3. Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi petugas Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.13.750.000,-

10) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

1. Penyediaan sarana Pendukung Puskesmas dan Jaringannya sebanyak 8 Paket dengan total anggaran sebesar Rp.286.210.300,-
2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas yang terdiri dari Lemari arsip, Jaringan Komputer, Meja kerja, Alat-alat kesehatan, Mobil Operasional TFC, Mesin Generator, Note Book, kamera sebanyak 17 Paket dengan total anggaran sebesar Rp.437.162.900,-
3. Pembangunan Poskesdes sebanyak 12 Unit dengan anggaran sebesar Rp.2.413.394.500,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Sebanyak 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.81.111.530,-





11) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

1. Penambahan Ruang Rumah Sakit sebanyak 3 Unit dengan anggaran sebesar Rp.3.364.966.405,-
2. Rehabilitasi Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit sebanyak 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.447.380.000,-
3. Pekerjaan Instalasi Limbah sebanyak 2 Paket dengan anggaran sebesar Rp.1.442.600.000,-
4. Ruang Rawat Inap dan Laboratorium yg Diperbaiki 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.369.568.000,-
5. Pemasangan Paving Block 2 Paket dengan anggaran sebesar Rp.134.715.000,-
6. Pengadaan Pertamanan RS 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.19.250.000,-
7. Penimbunan Halaman RS 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.96.102.000,-
8. Pengadaan Pelindung (Atap) Instalasi Pengolahan Air Limbah 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.9.041.000,-
9. Rehabilitasi Panel Listrik 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.35.625.000,-
10. Pengadaan Travo 100 KVA 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.98.864.300,-
11. Pengecetan Gedung Kantor 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.49.249.000,-
12. Rehabilitasi Gedung ICU/NICU 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.34.500.000,-
13. Rehab Gedung Aula RS 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.37.287.500,-
14. Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.3.394.954.500,-
15. Pengadaan lemari 1 Buah dengan anggaran sebesar Rp.4.500.000,-
16. Pengadaan Kursi Kerja 19 Buah dengan anggaran sebesar Rp.66.100.000,-
17. Pengadaan Tempat Tidur (Kasur) 15 Buah dengan anggaran sebesar Rp.3.750.000,-
18. Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.3.394.954.500,-
19. Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan sebanyak 5 Paket dengan anggaran sebesar Rp.13.443.237.210,-





20. Pengadaan Bahan Obat-obatan Rumah Sakit sebanyak 8 Paket dengan anggaran sebesar Rp.1.619.449.175,-
21. Pengisian Tabung sebanyak 75 Tabung dengan anggaran sebesar Rp.3.182.000,-
22. Bahan Reagen Laboratorium sebanyak 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.44.834.570,-
23. Pengisian Tabung O2 sebanyak 25 tabung dengan anggaran sebesar Rp.8.655.010,-
24. Pengadaan Kendaraan roda empat sebanyak 2 Unit dengan anggaran sebesar Rp.434.500.000,-
25. Pengadaan Tempat Tidur Pasien sebanyak 8 Unit dengan total anggaran sebesar Rp.120.200.000,-
26. Pengadaan Kursi Kerja sebanyak 66 Unit dengan total anggaran sebesar Rp.66.100.000,-
27. Pengadaan Lemari Arsip sebanyak 1 Unit dengan total anggaran sebesar Rp.4.500.000,-
28. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 19 Buah dengan anggaran sebesar Rp.285.397.750,-
29. Pengadaan AC 1/2 PK 2 Unit dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,-
30. Pengadaan AC Split 1 PK /Kulkas1 Pt 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp.27.250.000,-
31. Pengadaan TV 21" 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,-
32. Pengadaan Komputer/PC 2 Unit dengan anggaran sebesar Rp.13.950.000,-
33. Pengadaan Notebook 3 Unit dengan anggaran sebesar Rp.28.575.000,-
34. Pengadaan UPS/Stabilizer 3 Unit dengan anggaran sebesar Rp.98.000.000,-
35. Pengadaan Alat-alat Dapur 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.1.470.750,-
36. Pengadaan Radio HF/FM 10 Unit dengan anggaran sebesar Rp.19.950.000,-
37. Pengadaan Makanan dan Minuman Harian Pasien sebanyak 6.935 pasien dengan anggaran sebesar Rp.305.468.875,-
38. Pengadaan Makanan dan Minuman Harian Dokter sebanyak 502 Orang dengan anggaran sebesar Rp.35.864.000,-





39. Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Sakit sebanyak 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.51.768.800,-
40. Pengembangan Tipe Rumah Sakit sebanyak 5 Paket dengan anggaran sebesar Rp.1.247.650.100,-
43. Jasa Desain Master Plan Rumah sakit sebanyak 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.94.500.000,-
44. Penimbunan Lahan Rumah Sakit sebanyak 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.619.743.900,+26.950.000+35.950.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Laporan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit sebanyak 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.315.697.700,-

12) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

1. Biaya Cleaning Service sebanyak 12 Bulan dengan total anggaran sebesar Rp.462.006.900,-
2. Sarana dan Prasarana RS yang diperbaiki 32 Jenis dengan anggaran sebesar Rp.48.284.500,-
3. Peralatan Kebersihan Kantor 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.160.000.000,-
4. Belanja bahan baku bangunan Rumah Sakit 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.10.065.500,-
5. Belanja Bahan Pemeliharaan Rumah sakit 1 kali dengan anggaran sebesar Rp.5.362.500,-
6. Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik Rumah Sakit 1 Tahun dengan anggaran sebesar Rp.3.531.000,-
7. Belanja Pemeliharaan Ruang Rawat Darurat Rumah Sakit 1 Tahun dengan anggaran sebesar Rp.2.120.000,-
8. Pemeliharaan Kendaraan Ambulance sebanyak 6 Unit dengan total anggaran sebesar Rp.333.623.182,-
9. Pemeliharaan Perlengkapan rumah Sakit sebanyak 11 Unit dengan total anggaran sebesar Rp.65.045.000,-
10. Belanja BBM dan Pelumas sebanyak 3500 Liter dengan total anggaran sebesar Rp.17.045.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Bahan Bakar Genset yang diadakan sebanyak 3 Jenis dengan anggaran sebesar Rp.3.385.000,-





13) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1. Tenaga Pengelola RS/Tenaga Medis Sebanyak 35 Orang dengan total anggaran Rp.1.917.272.345,-
2. Sarana/prasarana/operasional RS Sebanyak 12 Orang dengan total anggaran Rp.477.417.145,-
3. Dokter Spesialis Sebanyak 1 Orang dengan total anggaran Rp. 50.000.000,-
4. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Sebanyak 15 Orang dengan total anggaran Rp.817.800.000,-
5. Peningkatan Kualitas Tenaga Paramedis Sebanyak 10 Orang dengan total anggaran Rp.163.500.000,-
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Pembantu Dokter dan Paramedis Sebanyak 15 Orang dengan total anggaran Rp.91.650.000,-
7. Peningkatan Kualitas Dokter Sebanyak 1 Orang dengan total anggaran Rp.1.028.147.500,-
8. Pelatihan / Spesialisasi / Bimtek / Bea Siswa Sebanyak 23 Orang dengan total anggaran Rp.378.500.000,-
9. Sewa Sarana Mobilitas Darat Sebanyak 5 Unit dengan total anggaran Rp.339.400.000,-
10. Bimtek Tenaga Dokter Keperawatan Jiwa Sebanyak 1 kali dengan total anggaran Rp.17.800.000,-
11. Operasional Dokter Spesialis Sebanyak 30 Orang dengan total anggaran Rp.817.800.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Kemitraan Pelayanan Dokter Spesialis FK-Unhas dan FK-Unsrat sebanyak 3 Orang dengan anggaran sebesar Rp.414.089.000,-
2. JKN kapitasi sebanyak 37.500 Orang dengan anggaran sebesar Rp.522.906.282,-

14) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1. Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Ashfiksia dan BBLR sebanyak 42 Orang dengan anggaran sebesar Rp.50.677.000,-
2. Pertemuan Audit Maternal Perinatal Tk. Kab. Bone Bolango 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.22.081.500,-
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terpadu Program KIA-KB 21 PKM dengan anggaran sebesar Rp.20.120.000,-
4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan P4K sebanyak 1 kali dengan anggaran sebesar Rp.20.120.000,-





Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Monitoring dan Bimtek Program KIA-KB Sebanyak 20 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.17.390.000,-

15) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1. Pendataan IRTP 17 PKM dengan anggaran sebesar Rp.25.040.000,-
2. Pengawasan Obat, Makanan, Minuman dan Kosmetika sebanyak 20 PKM dengan anggaran sebesar Rp.20.729.525,-
3. Pelaksanaan Investigasi KLB Keracunan Makanan oleh 20 PKM dengan anggaran sebesar Rp.12.104.525,-
4. Dokumen yang berisi Status Kesehatan Makanan di 17 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.80.060.000,-

16) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1. Sosialisasi Manajemen Jejaring Sistim Rujukan kepada 124 ibu hamil dengan anggaran sebesar Rp.34.366.500,-
2. Pelaksanaan Bimtek terpadu KIA-KB di 19 PKM dengan anggaran sebesar Rp.13.700.000,-
3. Sosialisasi/Penyuluhan/Diklat terhadap 1.013 Orang dengan total anggaran sebesar Rp.209.954.150

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Manajemen Jejaring Sistim Rujukan Sebanyak 67 Orang dengan anggaran sebesar Rp.24.526.000,-

Adapun capaian kinerja output bidang kesehatan dapat dilihat melalui capaian kinerja SPM sebagaimana yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:

*Tabel 4.6
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)*

No	Nama Indikator	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	80	78,1	90,2	87.6
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang di tangani	51	78,9	86,9	129.05
3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	78	76,4	99,8	
4	Cakupan Pelayanan Nifas	78	79,5	88,1	79.6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango





Tabel 4.7
Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA)

No	Nama Indikator	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014
1	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	7	17,4	81	92,1
2	Cakupan Kunjungan Bayi	81	76,7	76,2	77,1
3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	87	35,2	40,8	46,6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.8
Penurunan Angka Kesakitan

No	Nama Indikator	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014
1.	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	19	71,8	84,2	85,5
2.	Cakupan Penemuan dan Penderita Penyakit AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	13,6	6,46	4
3.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Pneumonia	22	42,6	48,8	72,4
4.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA+	105	94,9	81,3	82,8
5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100	100	100	100
6.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.9
Penurunan Angka Gizi Buruk

No	Nama Indikator	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014
1.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia – 24 Bulan	100	100	100	100
2.	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	30	66,7	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango





Tabel 4.10
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

No	Nama Indikator	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	68	6,07	5,91	5,99
2.	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat	89	100	95,1	90,6
3.	Cakupan Desa Siaga Aktif	62	60,8	68,7	74,7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

b. Capaian Kinerja/Outcome dari pelaksanaan program

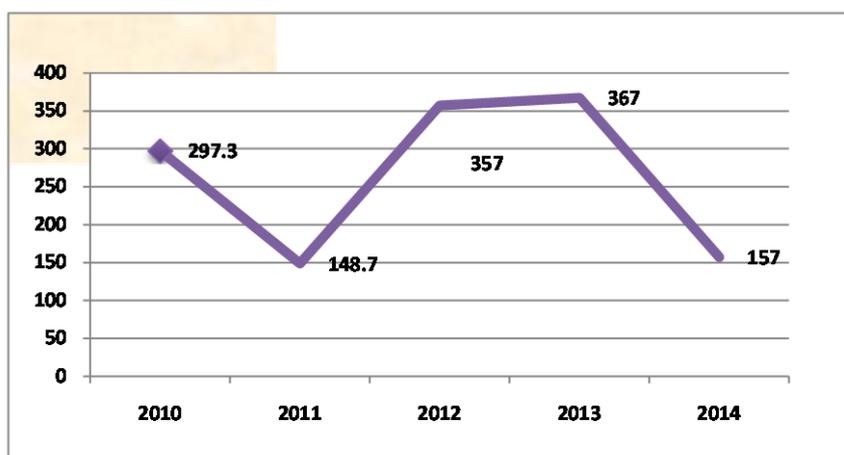
Disamping capaian kinerja SPM diatas untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan dapat dilihat dari capaian kinerja outcome (hasil). Adapun capain kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan bidang kesehatan adalah :

a. Penurunan angka kematian ibu

Kematian ibu masih menjadi permasalahan yang berpengaruh pada kondisi derajat kesehatan di Kabupaten Bone Bolango. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam penetapan kinerja Dinas Kesehatan.

Adapun trend AKI Kabupaten Bone Bolango selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1 Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango



Sumber data: Sie KIA-KB Dinkes Bone Bolango

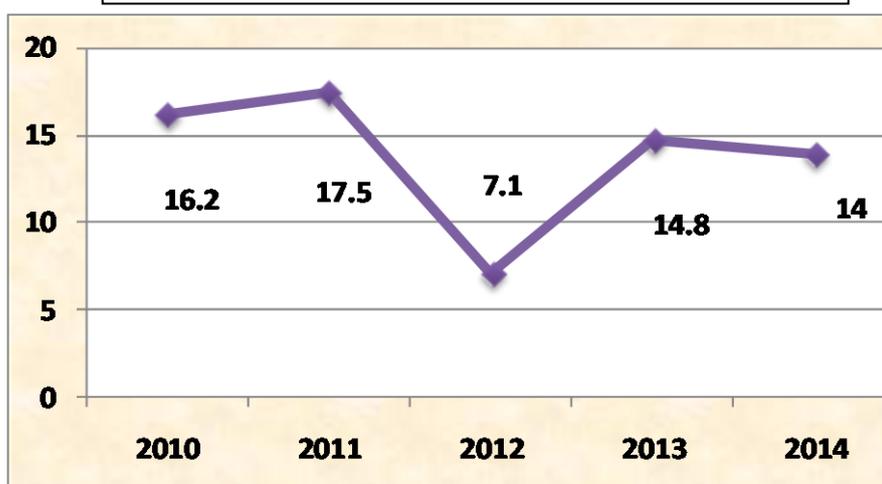


b. Penurunan angka kematian bayi

Kasus kematian bayi kebanyakan disebabkan oleh BBLR, kelainan kongenital, *hypotermi*, infeksi, diare dan *asfiksia* serta *aspirasi* dan *febris*. Jumlah kematian bayi menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun trend Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

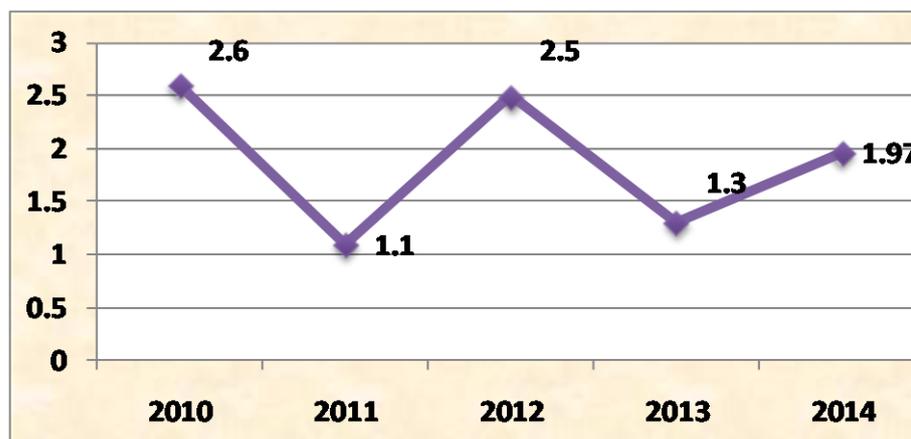
Grafik 4.2. Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango



Sumber data: Sie KIA-KB Dinkes Bone Bolango

Adapun trend Angka Kematian Balita (AKABA) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.3 Trend Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango



Sumber Data: Sie KIA-KB Dinkes Bone Bolango

c. Prevalensi gizi buruk

**Grafik 4.4 Trend Angka Gizi Buruk
Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango**



Sumber data: Sie KIA-KB Dinkes Bone Bolango

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dibidang kesehatan adalah

- Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan balita khususnya di wilayah yang jauh dari jangkauan tempat layanan rujukan
- Belum optimalnya pembinaan masyarakat dalam pengurusan dan penggunaan kartu jaminan kesehatan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penyakit
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi serta tindak tanggap darurat pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular dan berbahaya bagi masyarakat

2. Solusi

- Meingkatkan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat didaerah yang sukar dijangkau dan miskin
- Mengefektifkan penerapan izab qabul dan berlian dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi ibu hamil dan balita melalui kegiatan monitoring, pengendalian, dan evaluasi secara berkala serta tindakan preventif terhadap resiko dini bagi ibu hamil dan balita



3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Penyediaan infrastruktur yang memadai dengan melakukan pembangunan baru maupun rehabilitasi guna mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, dusun terpencil serta dalam upaya memacu kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan yang harus ditangani.

Di bidang kebinamargaan, telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan beberapa ruas jalan yang memberikan dampak yang luas, terutama bagi kelancaran pergerakan barang dan jasa maupun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan, yang tentunya akan terus dibangun dan dipelihara beberapa ruas jalan lainnya, agar tercipta aksesibilitas yang baik dari dan kewilayah Kabupaten Bone Bolango serta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di masa mendatang. Di bidang pengairan, pembangunan sarana dan prasarananya bertujuan untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku, telah berhasil meningkatkan fungsi jaringan irigasi, melalui perbaikan bendung, bangunan air dan pintu air. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang pekerjaan umum telah dianggarkan sebesar Rp. 253,771,934,035 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 179,427,879,236 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 74,344,054,799

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum pada tahun 2011-2014 ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta 18 kecamatan. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang pekerjaan umum telah dianggarkan sebesar Rp. 253,771,934,035 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 179,427,879,236 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 74,344,054,799

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) **Program pembangunan jalan dan jembatan**, adapun capaian kinerja output kegiatan yang dilaksanakan selang tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 4.11
Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2011

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2011	ANGGARAN (Rp)
	PEMBANGUNAN JALAN				
1	Pembangunan Jalan Desa Bonedaa- Bondawuna Tahap II	Kec. Suwawa Selatan	Meter	944,45	472,223,400
2	Pembangunan Jembatan Boludawa - Bulontala (Lanjutan)	Kec. Suwawa, Suwawa Selatan	Unit	2375,22	1,187,612,000
	PENINGKATAN JALAN				
1	Peningkatan Jalan Ruas Gorontalo-Suwawa - Tulabolo	Kec. Suwawa, Suwawa Timur	Meter	1,659	1,659,198,000
2	Peningkatan Jalan Ruas Ayula Selatan - Tolumopatu	Kec. Bulango Selatan, Tapa	Paket	967,20	967,200,000
3	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat Bone Raya	Kec. Bone Raya	Meter	1,418	1,418,906,000
4	Peningkatan Jalan Ds Timbuolo Tengah	Kec. Botupingge	Meter	473	473,267,000
	PEMBANGUNAN JEMBATAN				
1	Pembangunan Jembatan Akses SMK Tapa	Kec. Tapa	Unit	1	99,950,000
2	Pembangunan Jembatan Mongiilo - Piloheya	Kec. Bulango Ulu	Unit	1	149,955,000
3	Pembangunan Jembatan Akses Agropolita Ds Taludaa	Kec. Bone	Unit	1	99,950,000
4	Mobilisasi / Pembongkaran Jembatan Baile		Unit	1	180,000,000
10	Pembangunan Jembatan Ruas Toto Utara - Danau Printis	Kec. Tilong Kabila, Suwawa	Unit	1	725,483,000
11	Pembangunan Pengaman Jembatan Tolomoto		Unit	1	91,075,000
12	Pembangunan Jembatan Jln Lingkar Desa Bunuo	Kec. Bulango Utara	Unit	1	74,875,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2011	ANGGARAN (Rp)
13	Pembangunan Plat Duicker Desa Boidu	Kec. Bulango Utara	Unit	1	49,850,000
14	Pembangunan Plat Duicker Ds Panggulo	Kec. Botupingge	Unit	1	74,450,000
15	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan		Dokumen	24	5,253,805,910

Tabel 4.12
Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2012

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2012	ANGGARAN (Rp)
	PEMBANGUNAN JALAN				
1	Pembangunan Jalan Kecamatan Suwawa Selatan	Kec. Suwawa Selatan	Meter	350	255,999,000
2	Pembangunan Jalan Lingkar Pusat Desa Bilungala	Kec. Bone Pantai	Meter	890	460,000,000
3	Pembangunan Jalan Desa Iloheluma	Kec. Tilongkabila	Meter	600	165,600,000
4	Pembangunan Jalan Desa Ulantha	Kec. Suwawa	Meter	213	132,075,000
5	Pembangunan Jalan Desa Tanah Putih	Kec. Botupingge	Meter	500	89,675,000
6	Pembangunan Jalan SP Kramat - Lomaya (Kompleks Pesantren)	Kec. Tapa, Bulango Utara	Meter	227	106,250,000
	PENINGKATAN JALAN				
1	Peningkatan Jalan Rs Gorontalo-Suwawa-Tulabolo, Cs	Kec. Suwawa, Pinogu	Meter	1500	1,425,522,000
2	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat Bulango Timur	Kec. Bulango Timur	Meter	520	190,459,000
3	Peningkatan Jalan Permata -Huntu Selatan, Cs	Kec..Tilong kabila, Bulango Selatan	Meter	2800	2,684,036,000
4	Peningkatan Jalan Ruas Tulabolo-Pinogu	Kec. Suwawa Timur	Meter	650	2,200,000,000
5	Peningkatan Jalan Ds Boidu	Kec. Bulango Utara	Meter	200	99,659,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN
6	Peningkatan Jalan Ruas Bube -Moutong (SMK Suwawa)	Kec. Suwawa, Tilongkabila	Meter	200	239,261,000
7	Peningkatan Jalan Rs Ulanda-Ulanda Dalam	Kec. Suwawa	Meter	446	237,270,000
8	Peningkatan Jalan Panggulo	Kec. Botupingge	Meter	250	99,775,000
9	Peningkatan Jalan Ds Panggulo Barat	Kec. Botupingge	Meter	135	99,527,000
10	Peningkatan Jalan Lingkar Bunuo	Kec. Bulango Utara	Meter	414	187,185,000
11	Peningkatan Jalan Ruas Tupa - Ulapato	Kec. Bulango Utara	Meter	450	99,646,000

Tabel 4.13
Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2013

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2013	ANGGARAN (Rp)
	PEMBANGUNAN JALAN				
	-	-	-	-	-
	PENINGKATAN JALAN				
1	Peningkatan Jalan Ruas Toto - Kantor Bupati - Danau Perintis, Cs	Kec. Kabila, Kec. Suwawa	meter	1500	3,689,009,000
2	Peningkatan Jalan Ruas Gorontalo-Tapa-Atinggola, Cs	Kec. Tapa	meter	3791	3,531,774,000
3	Peningkatan Jalan Boludawa-Jembatan Bulobulontu	Kec. Suwawa	meter	251	405,888,000
4	Peningkatan Jalan Ruas Tulabolo-Pinogu (Lanjutan)	Kec. Suwawa Timur	meter	1120	1,900,000,000
5	Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Bone Raya, Cs	Kec. Bone Raya	meter	3000	3,300,781,000
6	Peningkatan Jalan Lapangan Sukma		meter	237	186,200,000
7	Peningkatan Jalan Ds Dutohe	Kec. Kabila	meter	550	274,923,370
8	Peningkatan Jalan Lingkar SMP Botupingge	Kec. Botupingge	meter	756	409,972,000
9	Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Tanah	Kec. Botupingge	meter	952	186,530,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2013	ANGGARAN (Rp)
	Putih				
10	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Bunuo	Kec. Bulango Utara	meter	230	137,300,000
11	Peningkatan Jalan Desa Kramat-Lomaya (Lanjutan)	Kec. Tapa, Kec. Bulango Utara	meter	350	137,700,000
12	Peningkatan Jalan SP Rs Ulantha - Ulantha Dalam	Kec. Suwawa	meter	302	186,190,000
13	Peningkatan Jalan Ds Bube Baru	Kec. Suwawa	meter	136	94,410,000
14	Peningkatan Jalan Ds Poowo Dusun II	Kec. Kabila	meter	306	186,790,000
15	Peningkatan Jalan Ds Poowo Barat	Kec. Kabila	meter	350	186,560,000
16	Peningkatan Jalan Ds Toto Utara	Kec. Tilongkabila	meter	470	186,670,000
17	Peningkatan Jalan Ds Toto Selatan Dusun II	Kec. kabila	meter	340	186,670,000
18	Peningkatan Jalan Ds Tunggulo	Kec. Tilongkabila	meter	233	186,146,000
19	Peningkatan Jalan Ds Taludaa-masiaga	Kec. Bone	meter	900	365,643,000
20	Peningkatan Jalan Ds Bulawa-Patoa	Kec. Bulawa	meter	1438	210,346,000
21	Peningkatan Jalan Kec Kabila	Kec. Kabila	meter	275	138,300,000
22	Peningkatan Jalan Kantor Camat Bulango Timur	Kec. Bulango Timur	meter	1061	637,078,000
23	Peningkatan Jalan Kantor Camat Tilongkabila	Kec. Tilongkabila	meter	550	645,476,000
24	Peningkatan Jalan Moutong-Iloheluma	Kec. Tilongkabila	meter	900	371,164,000
25	Peningkatan Jalan Ulantha-Ulantha Dalam	Kec. Suwawa	meter	708	420,774,000
26	Peningkatan Jalan Rs Talango-Bube	Kec. Bulango Timur, Suwawa	meter	343	252,388,000
27	Peningkatan Jalan Ds Duano	Kec. Suwawa Tengah	meter	200	138,350,000
28	Peningkatan Jalan LAPEM Mongiilo	Kec. Bulango Ulu	meter	1350	909,713,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2013	ANGGARAN (Rp)
29	Peningkatan Jalan Desa Tingkohubu Ds II	Kec. Suwawa	meter	300	139,650,000
30	Peningkatan Jalan Desa Iloheluma	Kec. Tilongkabila	meter	210	139,640,000
31	Peningkatan Jalan Ruas Desa Tumbihe-Talango	Kec. Kabila	meter	301	103,000,000

Tabel 4.14
Capaian Output Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2014

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2014	ANGGARAN (Rp)
	PEMBANGUNAN JALAN				
1	Pembangunan Jalan Perkantoran Dinas Catatan Sipil, Cs	Kec. Tilongkabila	Meter	240	1,480,000,000
2	Pembangunan Jalan dusun Poneo		Meter	350	129,360,000
3	Pembangunan Jalan Ruas Desa Tingkohubu Timur	Kec. Suwawa	Meter	340	179,360,000
4	Pembangunan Jalan Ruas Desa Bubeya	Kec. Suwawa	Meter	283	169,480,000
5	Pembangunan Jalan Iloheluma - Butu, CS	Kec. Tilongkabila	Meter	1,550	2,150,909,091
	PENINGKATAN JALAN				
1	Peningkatan Jalan Bube (Jembatan Merah) - Danau Perintis, Cs.	Kec. Suwawa	Meter	3,500	3,820,000,000
2	Peningkatan Jalan Ruas Toto-Kantor Bupati-Danau Perintis, Cs (Tahap II)	Kec. Kabila, Suwawa	Meter	4,600	7,205,999,000
6	Tingkohubu Duano Depan Polres (Cs Cakil)	Kec. Suwawa	Meter	475	
7	Peningkatan Jalan Moutong - Tunggulo - Toto, Cs	Kec. Tilongkabila	Meter	2,003	3,300,000,000
8	Peningkatan Jalan Tulabolo - Pinogu	Kec. Suwawa Timur	Meter	2,500	1,500,000,000
9	Peningkatan Jalan Lingkar Desa pangi		Meter	425	189,450,000
10	Peningkatan Jalan Desa Pauwo - Tumbihe	Kec. Kabila	Meter	500	171,600,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2014	ANGGARAN (Rp)
11	Peningkatan jalan Moutong - Dutohe Barat (lanjutan)	Kec. Tilongkabila, Kabila	Meter	350	199,480,000
12	Peningkatan Jalan Desa Timbuwolo Tengah	Kec. Botupingge	Meter	365	189,650,000
14	Peningkatan Jalan Desa Tingkohubu	Kec. Suwawa	Meter	200	119,400,000
15	Peningkatan Jalan Desa Timbuwolo Timur	Kec. Botupingge	Meter	364	189,500,000
16	Peningkatan Jalan Helumo-Danau Perintis	Kec. Suwawa	Meter	250	134,558,000
17	Peningkatan Jalan Ruas Kopi - Owata	Kec. Bulango Selatan, Tapa	Meter	150	226,986,000
18	Peningkatan Jalan Desa Mongiilo	Kec. Bulango Ulu	Meter	625	179,434,000
19	Peningkatan Jalan Desa Mongiilo Utara - Ilomata	Kec. Bulango Ulu	Meter	1,300	179,350,000
21	Peningkatan Jalan Tamboo - Mootilango	Kec. Tilong Kabila	Meter	213	89,450,000
22	Peningkatan Jalan Kantor Camat Botupingge	Kec. Botupingge	Meter	350	179,450,000
23	Peningkatan Jalan Tanggilingo - Dutohe Barat	Kec. Kabila	Meter	350	189,600,000
	Peningkatan Jalan Bandungan - Kramat	Kec. Bulango Utara, Tapa	Meter	300	259,300,000
	Peningkatan Jalan Talango - Toto Selatan	Kec. Kabila	Meter	212	89,650,000
	Peningkatan Jalan Ruas Kantor KPU - Danau Perintis	Kec. Suwawa	Meter	423	423
	Peningkatan Jalan Sp. Kantor Camat Bone Raya, Cs.	Kec. Bone Raya	Meter	650	1,097,558,200
	Peningkatan Jalan Desa Pinoman Tiga Kec. Bulawa	Kec. Bulawa	Meter	234	123,022,727
	Peningkatan jalan Desa Tulabolo	Kec. Suwawa Timur	Meter	250	90,571,818
	Peningkatan Jalan Desa Muara Bone	Kec. Bone	Meter	272	118,148,182
	PERENCANAAN JALAN				





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2014	ANGGARAN (Rp)
1	Perencanaan Jalan Bube - Danau Perintis,Cs.	Kec. Suwawa	Dokumen	1	39,900,000
2	Perencanaan Jalan Akses Kantor Camat Bone Raya,Cs.	Kec. Bone Raya	Dokumen	1	39,710,000
3	Perencanaan Jalan Iloheluma - Butu,Cs.	Kec. Tilongkabila	Dokumen	1	39,820,000
4	Perencanaan Jalan Lingkar Pangi,Cs.		Dokumen	1	39,870,000
5	Perencanaan Jalan Desa Bubeya,Cs.	Kec. Suwawa	Dokumen	1	39,900,000
6	Perencanaan Jembatan Iloheluma	Kec. Tilongkabila	Paket	1	49,894,000
7	Perencanaan Jembatan Huluduotamo,cs	Kec. Suwawa	Paket	1	49,687,000
8	Perencanaan Jalan Ruas Taluwaya-Bulotalangi Barat	Kec. Bulango Timur, Bulango Timur	Dokumen	1	49,750,000
9	UKL/UPL Peningkatan Jalan Ruas Toto - Kantor Bupati - Danau Perintis, Cs	Kec. Suwawa	Dokumen	1	34,842,000
10	UKL/UPL Peningkatan Jalan Bube (jembatan merah) - Danau Perintis, cs	Kec. Suwawa	Dokumen	1	34,716,000
11	UKL/UPL Peningkatan Jalan Akses Kantor Camat Bone Raya, cs		Dokumen	1	34,540,000
12	UKL/UPL Peningkatan Jalan Tulabolo - Pinogu		Dokumen	1	34,460,000
13	UKL/UPL Peningkatan Jalan Moutong - Tunggulo - Toto,Cs	Kec. Tilong Kabila	Dokumen	1	39,462,000
14	Perencanaan Teknis Jalan		Dokumen	6	260,000,000
15	UKL/UPL		Dokumen	5	150,000,000
	PENGAWASAN JALAN				
1	Pengawasan Jalan		Dokumen	4	343,537,000
	PEMBANGUNAN JEMBATAN				
1	Pembangunan Jembatan Iloheluma 1	Kec. Tilongkabila	Unit	1	313,732,727
2	Pembangunan Jembatan Iloheluma 2	Kec. Tilongkabila	Unit	1	321,056,364





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2014	ANGGARAN (Rp)
3	Pembangunan Jembatan Huluduotamo	Kec. Suwawa	Unit	1	277,423,636

Tabel 4.15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2015

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
	PEMBANGUNAN JALAN				
1	Pembangunan Jalan (DAK)	Desa Huluduotamo	Meter	5454	5,999,147,000
2	Pembangunan Jalan (Lanjutan)	Desa Huluduotamo	Meter	38	11,052,805,500
3	Pembangunan Jalan (DAK Lanjutan)	Desa Huluduotamo	Meter	8	4,725,163,724
4	Pembangunan Jalan Akses Dusun Bintape Suwawa	Desa Huluduotamo	Meter	400	200,000,000
5	Pembangunan Jalan Baru Akses Pertanian Desa Tunggulo	Desa Tunggulo	Meter	260	130,000,000
	PENINGKATAN JALAN				
1	Peningkatan Jalan Ruas Tulabolo - Pinogu	Kec. Pinogu	Meter	1000	1,000,000,000
2	Peningkatan Jalan Ruas Tunas Jaya	Kec. Bonepantai	Meter	400	200,000,000
3	Peningkatan Jalan Ruas Pelita Hijau	Kec. Bonepantai	Meter	400	200,000,000
4	Peningkatan Jalan Ruas Desa Ilohuwa	Kec. Bone	Meter	400	200,000,000
5	Peningkatan Jalan Dusun Dungilata	Kec. Bulawa	Meter	600	300,000,000
6	Peningkatan Jalan Desa Toto Selatan	Kec. Tilongkabila	Meter	300	150,000,000
7	Peningkatan jalan Desa Tunggulo	Kec. Tilongkabila	Meter	400	200,000,000
8	Peningkatan jalan Desa Boidu	Kec. Bulango Utara	Meter	200	200,000,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
9	Peningkatan Jalan Desa Bongoime	Kec. Tilongkabila	Meter	300	150,000,000
10	Peningkatan Jalan Lingkar Pangi	Kec. Suwawa Timur	Meter	300	150,000,000
11	Peningkatan Jalan Desa Boidu (SMP 2 Tapa)	Kec. Bulango Utara	Meter	300	150,000,000
12	Peningkatan Jalan Bulobulundu - Bulontala	Kec. Suwawa Selatan	Meter	400	200,000,000
13	Peningkatan Jalan Desa Limehu Duano	Kec. Suwawa Tengah	Meter	300	150,000,000
14	Peningkatan Jalan Desa Botutonuo	Kec. Kabila Bone	Meter	400	200,000,000
15	Peningkatan Jalan Desa Permata	Kec. Tilongkabila	Meter	200	100,000,000
16	Peningkatan Jalan Desa Tanah Putih	Kec. Botupingge	Meter	400	200,000,000
17	Peningkatan Jalan Desa Panggulo Barat	Kec. Botupingge	Meter	300	150,000,000
18	Peningkatan Jalan Desa Bulotalangi Timur Dusun Tutuwa	Kec. Bulango Timur	Meter	400	200,000,000
19	Peningkatan Jalan Desa Sukadamai	Kec. Bulango Ulu	Meter	300	150,000,000
20	Peningkatan Jalan Desa Tapadaa	Kec. Suwawa Tengah	Meter	300	150,000,000
21	Peningkatan Jalan Desa Tanggilingo	Kec. Kabila	Meter	400	200,000,000
22	Peningkatan Jalan Desa Dutohe	Kec. Kabila	Meter	400	200,000,000
23	Peningkatan Jalan Desa Toto Utara	Kec. Tilongkabila	Meter	300	150,000,000
24	Peningkatan Jalan Desa Huluduotamo depan Dinas PU	Kec. Suwawa	Meter	300	150,000,000
25	Peningkatan Jalan Desa Pauwo		Meter	300	150,000,000
26	Peningkatan Jalan Ruas Moutong-Tunggulo-Toto	Kec. Tilongkabila	Meter	1600	2,000,000,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
27	Peningkatan Jalan Ruas Bongopini - Mootilango, Cs	Kec. Tilongkabila	Meter	1600	2,000,000,000
28	Peningkatan Jalan Ruas Talango - Padengo (Lepin) - Poowo Barat, Cs	Kec. Kabila	Meter	2400	3,000,000,000
29	Peningkatan Jalan Ruas Ayula Tilango - Ayula Utara, Cs	Kec. Bulango Selatan	Meter	2400	3,000,000,000
30	Peningkatan Jalan Ruas Lomaya - Kopi - Bulango Ulu	Kec. Bulango Ulu	Meter	2000	2,000,000,000
31	Peningkatan Jalan Transdes wilayah Kabila, Tilongkabila Cs	Kec. Kabila-Tilongkabila	Meter	3636	2,000,000,000
32	Peningkatan Jalan Desa Tamboo - Bongoime - Tunggulo	Kec. Tilongkabila	Meter	400	200,000,000
33	Peningkatan Jalan Desa Bulotalangi	Kec. Bulotalangi Timur	Meter	400	200,000,000
34	Peningkatan Jalan Desa Meranti	Kec. Tapa		400	200,000,000
35	Peningkatan Jalan Desa Tingkohubu	Kec. Suwawa	Meter	400	200,000,000
36	Peningkatan Jalan Desa Ulanda - Huluduotamo	Kec. Suwawa	Meter	400	200,000,000
37	Peningkatan Jalan desa Toto Utara Dusun II	Kec. Tilongkabila	Meter	400	200,000,000
38	Peningkatan Jalan desa Bulotalangi Dusun IV	Kec. Bulango Timur	Meter	400	200,000,000
39	Peningkatan Jalan Desa Ulanda Dalam	Kec. Suwawa	Meter	500	250,000,000
	PEMBANGUNAN JEMBATAN				
1	Pembangunan Jembatan Huluduotamo (Lanjutan)	Kec. Suwawa	Unit	1	380,994,200
2	Pembangunan Jembatan	Kec. Suwawa	Unit	2	1,675,000,000
3	Pembangunan Jembatan (DAK Lanjutan)	Kec. Suwawa	Unit		85,085,100





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
	PERENCANAAN JALAN & JEMBATAN				
1	Administrasi Proyek Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan		Kegiatan	1	292,085,000
2	Perencanaan Jalan		Dokumen	1	150,000,000
3	Pengawasan Jalan		Dokumen	1	400,000,000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dokumen	1	110,017,000

2) Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, adapun capaian kinerja output kegiatan yang dilaksanakan selang tahun 2011-2014 serta rencana di tahun 2015 diuraikan pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.16
Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2011*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2011	ANGGARAN (Rp)
1	Rehabilitasi Pemeliharaan Ruas Jalan Bube Bulotalangi (CS)	Kec. Suwawa, Bulango Timur	Meter	5464	5,464,809,000
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bulango - Tapa	Kec. Bulango Selatan, Tapa	Meter	4672,6	700,890,000
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bongoime - Poowo Barat, (Cs)	Kec. Tilogkabila, Kabila	Meter	8,167.16	1,225,074,000

*Tabel 4.17
Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2012*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2012	ANGGARAN (Rp)
1	Pemeliharaan Berkala Ruas Bandungan - Longalo	Kec. Bulango Utara	Meter	4180	99,630,000
2	Pemeliharaan Jembatan Gantung Tulabolo	Kec. Suwawa Timur	Meter	1	41,930,000





Tabel 4.18
Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2013

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2013	ANGGARAN (Rp)
1	Rehab/Pemel Jembatan Ruas SP Huluduotamo - Kantor Bupati	Kec. Suwawa	meter	6	94,300,000
2	Pemeliharaan Berkala Ruas Oluhuta-Bulotalangi, Cs	Kec. Kabila, Bulango Timur	meter	1284	1,060,517,000
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Permata - RSUD Toto, Cs	Kec. Tilongkabila	meter	1194	869,080,000
4	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Moutong-Tunggulo-Toto	Kec. Iloheluma	meter	200	97,400,000
5	Pemel Berkala Jalan Rs Ayula Selatan - Tolumopatu	Kec. Bulango Selatan, Tapa	meter	300	466,498,000

Tabel 4.19
Capaian Output Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2014

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2014	ANGGARAN (Rp)
1	Pemeliharaan Ruas Bube Baru Tingkohubu -Sungai Bone, Cs	Kec. Suwawa	meter	2,465	2,892,685,000
2	Pemeliharaan jalan Pauwo-Poowo Dalam Cs	Kec. Kabila	meter	2,125	1,626,412,000
3	Pemeliharaan jalan Ruas Taluwaya-Bulotalangi Barat,Cs	Kec. Bulango Timur, Bulango Timur	meter	4,003	2,921,922,000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kec. Suwawa, Tilongkabila	Paket	1	200,000,000
5	Rehab/Pemel Jembatan Ds Ulantha	Kec. Suwawa	Unit	1	32,936,500
6	Rehab/Pemel Jembatan Bayley Ds Kopi	Kec. Bulango Utara	Unit	1	39,823,000
7	Rehab/Pemel Jembatan Gantung Tulabolo	Kec. Suwawa Timur	Unit	1	121,858,000
8	Rehab/Pemel Jembatan Gantung Desa Bandungan	Kec. Bulango Utara	Unit	1	39,260,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI 2014	ANGGARAN (Rp)
9	Rehab/Pemel Jembatan Gantung Desa Panggulo	Kec. Botupingge	Unit	1	99,582,000

*Tabel 4.20
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
pada Tahun 2015*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan		Kegiatan	1	500,000,000
2	Pemeliharaan Jalan (Lanjutan)	Kec. Suwawa		6	2,888,786,150
3	Pemeliharaan Jembatan		Unit	5	600,000,000
4	Rehab/Pemeliharaan Jembatan (Lanjutan)			5	377,438,075
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kegiatan	1	58,252,000

3) Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong, adapun capaian kinerja output kegiatan yang dilaksanakan selang tahun 2011-2014 dan rencana tahun 2015 diuraikan melalui tabel dibawah ini :

*Tabel 4.21
Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
Pada tahun 2011*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
1	Pembangunan Drainase Ayula Tilango	Kec. Bulango Selatan	Meter	258	
2	Pembangunan Drainase Desa Toto Utara Segmen I	Kec. Tilongkabila	Meter	213	
3	Pembangunan Drainase Desa Toto Utara Segmen II	Kec. Tilongkabila	Meter	200	
4	Pembangunan Drainase Desa Toto Utara Segmen III	Kec. Tilongkabila	Meter	137	
5	Pembangunan Drainase Desa Moutong	Kec. Tilongkabila	Meter	209.4	



NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
6	Pembangunan Drainase Desa Tupa	Kec. Tapa	Meter	168.68	
7	Pembangunan Drainase Desa Huangobotu	Kec. Kabila Bone	Meter	112	
8	Pembangunan Drainase Desa Timbuolo Induk	Kec. Botupingge	Meter	195	
9	Pembangunan Drainase dan Talud Kompleks Poligon	Kec. Botupingge	Meter	130.6	
10	Pembangunan Drainase Kantor Camat Bulango Utara	Kec. Bulango Utara	Meter	152	
11	Pembangunan Drainase Desa Tilangobula Kec. Suwawa Timur	Kec. Suwawa Timur	Meter	123	
12	Pembangunan Drainase Desa Timbuolo Tengah	Kec. Botupingge	Meter	200	
13	Pembangunan Drainase Desa Panggulo I	Kec. Botupingge	Meter	150.55	
14	Pembangunan Drainase Desa Buluntala	Kec. Botupingge	Meter	189.74	

Tabel 4.22
Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
Pada tahun 2012

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
1	Pembangunan Drainase Desa Tupa	Kec. Tapa	Meter	185.68	
2	Pembangunan Drainase Desa Timbuolo Induk	Kec. Botupingge	Meter	170.4	
3	Pembangunan Drainase Desa Panggulo	Kec. Botupingge	Meter	139.55	
4	Pembangunan Drainase Desa Timbuolo Timur	Kec. Botupingge	Meter	133	
5	Pembangunan Drainase Desa Tilongkabila	Kec. Tilongkabila	Meter		





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
6	Pembangunan Drainase SMP Molotabu	Kec. Kabila Bone	Meter	200	
7	Pembangunan Drainase Desa Padengo	Kec. Kabila	Meter	156.53	
8	Pembangunan Drainase Desa Bubeya	Kec. Suwawa	Meter	334.53	
9	Pembangunan Drainase Desa Panggulo Barat	Kec. Botupingge	Meter	203	
10	Pembangunan Drainase Bubeya Jembatan merah	Kec. Suwawa	Meter	151.2	
11	Pembangunan Drainase Polsek Botupingge	Kec. Botupingge	Meter	172	

Tabel 4.23
Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
Pada tahun 2013

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
1	Pembangunan Saluran Jalan Pauwo	Kec. Kabila	Meter	225	
2	Pembangunan Saluran Desa Bubeya Tahap II	Kec. Suwawa	Meter	408	
3	Pembangunan Drainase Suka Damai	Kec. Bulango Ulu	Meter	246	
4	Pembangunan Saluran Jalan Kompleks Pasar Kamis	Kec. Kabila	Meter	305	
5	Pembangunan Drainase Timbuolo Timur	Kec. Botupingge	Meter	279	
6	Pembangunan Drainase Botupingge	Kec. Botupingge	Meter	303	
7	Pembangunan Drainase Desa Bulonthala	Kec. Suwawa Selatan	Meter	205	
8	Pembangunan Drainase Desa Ulantha	Kec. Suwawa	Meter	346	





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
9	Pembangunan Saluran Desa Boludawa	Kec. Suwawa	Meter	151	
10	Pembangunan Drainase Kantor DPRD	Kec. Tilongkabila	Meter	405	
11	Pembangunan Drainase Desa Huangobotu	Kec. Kabila Bone	Meter	299	
12	Pembangunan Saluran Desa Duano	Kec. Suwawa Tengah	Meter	187	

Tabel 4.24
Capaian Output Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
Pada tahun 2014

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
1	Pembangunan Saluran Drainase Desa Buata Kec. Botupingge	Kec. Botupingge	Meter	154.5	
2	Pembangunan Saluran Drainase Depan Kantor DPRD Bone Bolango	Kec. Tilongkabila	Meter	215.1	
3	Pembangunan Saluran Drainase Desa Boludawa Kec. Suwawa	Kec. Suwawa	Meter	456.7	
4	Pembangunan Saluran Drainase Desa Tinelo Kec. Suwawa	Kec. Suwawa	Meter	186.9	
6	Pembanguna Saluran Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila	Kec. Tilongkabila	Meter	261.4	
7	Pembanguna Saluran Drainase Kec. Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Meter	189	
8	Pemb. Saluran Drainase Desa Bulondala Timur Kec. Suwawa Selatan	Kec. Suwawa Selatan	Meter	200	
9	Pembangunan Saluran Drainase Desa Suka Damai+ Platdeker Kec. Bulango Utara	Kec. Bulango Utara	Meter	141.3	
10	Pembangunan Saluran Drainase Desa Pauwo Kec. Kabila	Kec. Kabila	Meter	92.3	





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	KET
11	Pembangunan Saluran Drainase Desa Ayula - Tilango	Kec. Bulango Selatan	Meter	125.05	
12	Pembangunan Drainase Kec. Tapa	Kec. Tapa	Meter	100	
13	Pembangunan Drainase Kec. Suwawa	Kec. Suwawa	Meter	120	

*Tabel 4.25
Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
Pada tahun 2015*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	KET
1	Pembangunan Drainase Desa Berlian	Kec. Tilongkabila	Meter	167	
2	Pembangunan Drainase Desa Poowo Barat	Kec. Kabila	Meter	334	
3	Pembangunan Drainase Desa Ulantha	Kec. Suwawa	Meter	250	
4	Pembangunan Drainase Desa Taludaa	Kec. Bone	Meter	250	
5	Pembangunan Drainase Desa Molamahu	Kec. Bone	Meter	250	
6	Pembangunan Drainase Desa Bulotalangi Barat	Kec. Bulango Timur	Meter	250	
7	Pembangunan Drainase Desa Bongoime	Kec. Tilongkabila	Meter	250	
8	Pembangunan Drainase Desa Suka Damai	Kec. Bulango Ulu	Meter	125	
9	Pembangunan Drainase Desa Talulobutu Dusun II	Kec. Tapa	Meter	292	
10	Pembangunan Drainase Desa Tamboo	Kec. Tilongkabila	Meter	167	
11	Pembangunan Drainase Desa Boludawa Dusun II	Kec. Suwawa	Meter	250	
12	Pembangunan Drainase Desa Panggulo	Kec. Botupingge	Meter	167	





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	KET
13	Pembangunan Drainase Desa Tanggilingo	Kec. Kabila	Meter	250	
14	Pembangunan Drainase Desa Panggulo II	Kec. Kabila	Meter	230	
15	Operasi Dan Pemeliharaan Drainase Kab. Bone Bolango	Dokumen	Meter	1	
16	Biaya Pengelolaan Proyek Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen	Meter	1	
17	Monitoring Dan Evaluasi Pekerjaan Saluran Drainase	Dokumen	Meter	12	
18	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen	Meter	1	
19	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen	Meter	1	

4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, adapun capaian kinerja output selang tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Capaian Output Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Selang tahun 2011-2014

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Chekdam Desa Buata	Kec. Botupingge	Meter	483	856,816,000
2	Pembangunan Chekdam Desa Panggulo	Kec. Suwawa Selatan	Meter	484	857,913,000
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Pancuran	Kec. Suwawa Selatan	Meter	20	195,837,000
4	Pembangunan Bronjong Sungai	Kec. Suwawa	Meter	111	196,744,900





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
	Panggulo Hilir Dusun III	Selatan			
5	Pembangunan Bronjong Desa Tamboo Kec Bonepantai	Kec. Bonepantai	Meter	45	88,461,000
6	Pembangunan Tanggul Desa Oluhuta Kec Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Meter	33	132,335,000
7	Pembangunan Tanggul/ Bronjong belakang Kantor camat Suwawa Selatan	Kec. Suwawa Selatan	Meter	100	172,025,000
8	Pembangunan Talud Desa Tanah Putih Tahap II	Kec. Botupingge	Meter	110	195,165,000
9	Pembangunan Talud		Meter	56	98,507,000
10	Normalisasi Sungai Moodulio	Kec. Bonepantai	Meter	5	8,738,950
11	Pembangunan Talud Pengendali Banjir			160	49,534,000

*Tabel 4.27
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
pada tahun 2015*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Chekdam Desa timbuolo Timur	Kec. Botupingge	Paket	1	200,000,000
2	Pembangunan Bronjong Desa Pelita Hijau	Kec. Bonepantai	Paket	1	150,000,000
3	Rehab Tanggul dan Pengerukan Endapan S.Bolango Desa Boidu	Kec. Bulango Utara	Paket	1	100,000,000
4	Pembangunan bronjong Desa oluhuta	Kec. Kabila Bone	Paket	1	150,000,000
5	Pembangunan bronjong Desa molotabu		Paket	1	150,000,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
6	Normalisasi Sungai Desa Lombongo	Kec. Suwawa Tengah	Paket	1	200,000,000
7	Normalisasi Sungai Desa Bulontala	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	150,000,000
	Perkuat Tebing Talud Desa Biluango	Kec. Kabila Bone	Paket	1	150,000,000
8	Pembangunan bronjong Desa kaidundu Barat	Kec. Bulawa	Paket	1	200,000,000
9	Normalisasi Sungai Desa panggulo	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	200,000,000
10	Pembangunan Bronjong Desa Bulontala Timur	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	200,000,000
11	Pembangunan Talud Penahan Tebing Desa Timbuolo Timur	Kec. Botupingge	Paket	1	200,000,000
12	UKL/UPL Pembangunan Checkdam Desa panggulo Induk		Dokumen	3	37,500,000
13	DED Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		Dokumen	1	30,000,000
14	Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		Paket	1	30,000,000
15	Pembangunan Perkuatan Tebing desa panggulo	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	75,000,000
16	Normalisasi Sungai Desa Pancuran	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	200,000,000
17	Perencanaan Normalisasi dan perkuatan Tebing	Kec. Suwawa	Paket	1	50,000,000

5) **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**, kegiatan yang telah dilaksanakan selang tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 4.28
Capaian Output Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum Selang tahun 2011-2014

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembuatan SPAM Pedesaan Bonedaa (DAK/DAU)	Kec. Suwawa Tengah	Paket	1	940,733,000
2	Pengadaan dan Pemasangan SR SPAM Bonedaa (DAU)	Kec. Suwawa Tengah	Paket	1	57,929,592
3	Pembuatan Pagar SPL, Intake dan Bronjong Pengaman Intake SPAM Bonedaa (DAK/DAU)	Kec. Suwawa Tengah	Paket	1	72,000,000
4	Pemeliharaan Instalasi		Paket	1	99,750,000
5	Rehabilitasi Intake Ulantha (DPID)	Kec. Suwawa	Paket	1	99,500,000
6	Pembangunan Intake Tulabolo (DPID)	Kec. Suwawa Timur	Paket	1	79,500,000
7	Rehabilitasi Intake Tunggulo (DPID)	Kec. Tilongkabila	Paket	1	49,565,000
8	Pembangunan Bronjong Pengaman Pipa Transmisi Langge (DPID)	Kec. Tapa	Paket	1	99,250,000
9	Pembangunan Rumah Jaga Intake (Langge, Ulantha, Tulabolo dan Lombongo) (DPID)	Kec. Suwawa Timur	Paket	1	79,400,000
10	Pembangunan Bronjong / Talud Pengaman Intake Dumbaya Bulan (DPID)	Kec. Suwawa Timur	M ²	100	99,400,000
11	Pembangunan Talud Pengaman Instalasi IPA Taludaa (DPID)	Kec. Bone	M ²	60	29,999,000
12	Pengembangan Jaringan Distribusi Utama dan Pelayanan (Sharing RPIJM) (DPID)		M	2.221	468,970,000



NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
13	Pembangunan Pagar Pengaman Instalasi IPA dan Talud Penahan Desa Tulabolo	Kec. Suwawa Timur	M	70	99,440,000
14	Rehabilitasi Jembatan Pipa dan Pipa Transmisi (DPID)		Paket	1	99,350,000
15	Pembangunan Bronjong Pengaman Pipa Transmisi Langge (Lanjutan) (DPID)	Kec. Tapa			87,400,000
16	Pembangunan Bronjong Pengaman Intake Dumbaya Bulan (Lanjutan) (DPID)	Kec. Suwawa Timur	M ³	46	46,607,000
17	Pembangunan Talud Pengaman Instalasi IPA Taludaa (Lanjutan) (DPID)	Kec. Bone	M ²	30	30,000,000
18	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Tilong Kabila (DPID)	Kec. Tilongkabila	Unit	250	171,017,000
19	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Bulango Selatan (DPID)	Kec. Bulango Selatan	Unit	250	188,842,000
20	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Tapa (DPID)	Kec. Tapa	Unit	250	194,002,000
21	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Suwawa (DPID)	Kec. Suwawa	Unit	750	183,920,000
22	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Suwawa Tengah (DPID)	Kec. Suwawa Tengah	Unit	250	188,695,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
23	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Kabila (DPID)	Kec. Kabila	Unit	250	171,012,000
24	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Bone Pantai (DPID)	Kec. Bonepantai	Unit	250	178,695,000
25	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Botupingge (DPID)	Kec. Botupingge	Unit	250	188,911,000
26	Pengadaan / Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kec. Bulango Timur (DPID)	Kec. Bulango Timur	Unit	185	120,871,000
27	Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Batubarani Kec. Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Paket	1	
28	Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Olele Kec. Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Paket	1	
29	Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Oluhuta Kec. Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Paket	1	
30	Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Botutonuo Kec. Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Paket	1	
31	Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Desa Timbuolo	Kec. Botupingge	Paket	1	
32	Penataan Instalasi IPA Taludaa Kec. Bone	Kec. Bone			
33	Jalan Masuk dan Penataan Instalasi IPA Uabanga Kec. Bone Pantai	Kec. Bonepantai	M ²	142	
34	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Tongo Kec. Kabila Bone	Kec. Bonepantai			





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
35	Perencanaan / DED SPAM Perdesaan		Dokumen	1	99,750,000
36	Pengawasan SPAM Perdesaan		Dokumen	1	65,000,000
37	Perencanaan / DED SPAM Perdesaan		Dokumen	1	99,750,000
38	Pengawasan SPAM Perdesaan		Dokumen	1	
39	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Desa Batu Barani Kec Kabila Bone	Kec. Kabila Bone	Paket	1	66,622,897
40	Pembangunan SPAM Perdesaan Suwawa Selatan	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	869,807,100
41	Pembangunan Spam Perdesaan Suwawa Selatan	Kec. Suwawa Selatan	Paket	1	86,052,900
42	Pembangunan RIS SPAM Tahap II		Paket	1	194,500,000

Tabel 4.29
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum pada tahun 2015

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET 2015	ANGGARAN (Rp)
1	Pemasangan Pipa PVC Dia 100mm, 75mm Distribusi Pelayanan	Kec. Suwawa Timur	Paket	1	240,000,000
2	Penambahan Kapasitas Listrik SPAM Solar Cell	Kec. Suwawa Timur	Paket	1	700,000,000
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam + Instalasi Pesantren Hubulo	Kec. Tapa	Paket	1	60,000,000
4	Peningkatan SPAM Bulango Ulu	Kec. Bulango Ulu	Paket	1	1,500,000,000
5	Pembangunan SPAM Perdesaan Suka Makmur	Kec. Bulango Ulu	Paket	1	697,160,000
6	Pengawasan SPAM MBR	Kec. Bulango Ulu	Paket	1	45,000,000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
7	Updating Studi EHRA (PPSP)	Kec. Suwawa	Dokumen	1	45,000,000
8	DED IPAL Komunal Zona I	Kec. Suwawa	Dokumen	1	50,000,000
9	Biaya Operasional Pemeliharaan IPAL Komunal	Kec. Suwawa	Dokumen	1	50,000,000
10	Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	Kec. Kabila	Unit	5	2,386,285,000

6) Program Pengendalian Banjir, adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.30
Capaian Output Program
Pengendalian Banjir selang tahun 2011-2014*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan talud penahan banjir	Kab. Bone Bolango	Meter	146	100,000,000
2	Pembangunan Talud Penahan Banjir didesa Ilohuuwa	Kec. Bone	Meter	160	109,786,000
3	Pemabangunan Konstruksi Talud Pengaman Pantai	Kab. Bone Bolango	Meter	201	138,170,000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut:

- a) Terpeliharanya kondisi jalan kabupaten dengan total panjang jalan 325.184 meter. Adapun rekapitulasi dari kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 4.31
Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango
Tahun 2011-2014*

Kegiatan	Satuan	2011	2012	2013	2014	Target 2015	Total
Pembangunan Jalan	Meter	3319.67	2780	-	2763	6160	15022.67
Peningkatan Jalan	Meter	4517.20 0	7565	23410	20861	26236	82589.100





Kegiatan	Satuan	2011	2012	2013	2014	Target 2015	Total
Pemeliharaan Jalan	Meter	18303.76	4180	2978	8,593	7	25461.76
Pembangunan Jembatan	Unit	9	-	-	3	3	15
Pemeliharaan Jembatan	Unit	-	1	1	5	5	12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango

- b) Meningkatnya upaya penanggulangan bencana banjir dengan dilaksanakannya normalisasi sungai sepanjang 11.500 meter, dibangunnya drainase sepanjang 13.118 meter dan pembangunan bronjong sepanjang 365 meter;
- c) Terup-date data base jalan dan jembatan kabupaten sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan dan pembangunan;
- d) Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki dengan terbangunnya dan meningkatnya kapasitas trotoar;
- e) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan;
- f) Meningkatnya masyarakat perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan sarana air bersih dengan sistem perpipaan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.32
Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango
Tahun 2011-2014

Sarana Air Bersih	2011	2012	2013	2014
Sambungan Rumah	N/A	4479	6839	7994
Cakupan Pelayanan	N/A	33.20%	46.70%	48.10%
Sambungan Rumah Untuk MBR	N/A	N/A	1000	100

Sumber : PDAM Kab. Bone Bolango

- g) Meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, sehingga semakin luas lahan yang terairi dimana pada tahun 2014 ini dilaksanakan rehabilitasi irigasi sepanjang 2.050 meter dan pembangunan irigasi sepanjang 900 meter;
- h) Terwujudnya perencanaan dan pengawasan yang optimal dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan, normalisasi sungai, pembangunan drainase, pembangunan bronjong, rehabilitasi irigasi dan pembangunan irigasi





c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Tingginya laju tingkat kerusakan jalan pertahun di Kabupaten Bone Bolango menjadi kendala yang cukup besar dalam pencapaian target kinerja hal tersebut disebabkan karena pembebanan lalu lintas yang melebihi kapasitas pembebanan rencana/excessive overloading; kondisi geografis pada beberapa wilayah memiliki stabilitas dan daya dukung tanah yang rendah; kondisi topografi yang bergunung-gunung memiliki potensi rawan bencana, erosi, dan longsor; kapasitas sistem drainase jalan yang belum memadai; serta umur teknis jalan yang sebagian besar memang telah melampaui batas optimalnya. Solusi yang dilakukan dengan tingginya laju kerusakan jalan sebagai penyebab penurunan kondisi/deterioration dan penurunan kualitas jaringan jalan, adalah dengan upaya penanganan kerusakan jalan melalui program pemeliharaan berkala/overlay dan pemeliharaan rutin yang ditunjang dengan dioperasikan kendaraan multi fungsi/multi purpose vehicle untuk penutupan lubang/patching dan pelapisan ulang permukaan/surface dressing;
- b) Belum optimalnya perencanaan infrastruktur khususnya dalam penyediaan database jalan dan irigasi sehubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dasar baik menyangkut desain, pemeliharaan jalan dan jembatan, penanganan kawasan genangan banjir dan abrasi pantai
- c) Meningkatnya daya rusak air, maka perlu dilakukan upaya preventif/ pencegahan dengan mengadakan konservasi SDA; mengadakan pembangunan cek dam dan bendung yang dapat mengendalikan serta mengatur aliran sungai untuk kepentingan irigasi; dan mewujudkan pengadaan bahan banjir seperti sand bag dan kawat bronjong untuk antisipasi penanganan darurat pada daerah irigasi yang terkena banjir serta upaya represive/penanganan dengan mengadakan pembangunan tebing saluran dan sarana dan prasarana pada saluran yang longsor akibat bencana maupun pembangunan saluran pembuang guna mengatasi genangan banjir;
- d) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dasar yang menyebabkan keterlambatan serta tingkat efektivitas pembangunan jalan dalam mengurangi angka kecelakaan dan aksesibilitas perekonomian daerah.
- e) Belum optimalnya pembinaan aparatur dalam melaksanakan kegiatan





sesuai dengan jadwal, mekanisme pelaksanaan serta ketentuan lainnya yang harus dijalankan berdasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum

2. Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah :

- a) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait menyangkut perencanaan infrastruktur dengan Bagian Tata pemerintahan, dinas Perhubungan dan pariwisata, Pemerintah Pusat (Bappenas, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan) dalam rangka memenuhi target alokasi sumber dana APBN
- b) Meningkatkan koordinasi impementasi dengan phak terkait dalam rnangka meningkatkan struktur dan kapasitas jalan baik jalan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka pencegahan lalu lintas muatan lebih, menjaga fungsional jembatan, Pembangunan dan rehabilitasi daerah Irigasi dan daerah rawa
- c) Melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan studi dan inventarisasi sumber-sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
- d) Melakukan pengendalian pelaksanaan secara lebih ketat dan terkoordinir sejak proses pengadaan jasa konstruksi sampai tahap penyelesaian pekerjaan di lapangan. Secara kasus per kasus permasalahan kontrak dan pelaksanaan diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik.

Pembangunan perumahan dan permukiman,yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasanbaik di perkotaan maupun di perdesaan, merupakankegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus senantiasa memperhatikan ketersediaan sumberdaya pendukung serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun





penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, di samping dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Bone Bolango terus dilakukan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman, serta kemudahan akses masyarakat untuk beraktifitas. Selain itu peningkatan penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan terus ditingkatkan untuk memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sebagai upaya pemenuhan target dalam MDG's. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang perumahan telah dianggarkan sebesar Rp.14,817,138,650, dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 11,304,969,950 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 3,512,168,700 adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Urusan wajib perumahan yang dilaksanakan selang tahun 2011-2014 melalui beberapa program strategis sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dengan anggaran Rp. 90.412.000
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja dan Verifikasi BPS dengan peserta sebanyak 400 orang dan anggaran Rp. 101.798.500
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Perumahan dengan peserta sebanyak 1523 orang dan anggaran Rp. 125.920.500
4. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat kurang mampu sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 210.572.750
5. Bantuan Rumah layak huni sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp. 146.210.500
6. Pembangunan Rumah hunian pantas sebanyak 10 unit dengan anggaran Rp. 101.640.000





7. Pembangunan Rumah Layak Huni/Hunian Pantas sebanyak 5 unit dengan anggaran Rp. 84.636.250
8. Fasilitasi dan Stimulasi Rumah LayakHuni sebanyak 10 unit dengan anggaran Rp. 188.600.000
9. Fasilitasi perumahan bagi Rumah Tangga Miskin sebanyak 14 unit dengan anggaran Rp. 199.860.000
10. Pembangunan Jambanisasi bagi Masyarakat kurang mampu dengan anggaran Rp. 15.930.000

Adapun rencana pada tahun 2015 akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Koordinasi Pengembangan Perumahan yang akan diikuti oleh 200 peserta dengan anggaran Rp. 94.970.000
2. Sosialisasi pengembangan perumahan yang akan diikuti oleh 750 orang dengan anggaran Rp. 99.593.500
3. Belanja bahan baku rumah (BBR) untuk 540 unit dengan anggaran Rp. 1.350.000.000
4. Penyaluran bantuan hibah sanitasi untuk 60 sambungan rumah dengan anggaran Rp. 98.924.500

Adapun output kinerja bidang perumahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.33
Data Rumah Bantuan Tahun 2011-2015
Kabupaten Bone Bolango*

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015*)	
1	BSPS	100	1823	2090	1542	327	5882
2	HUNIAN PANTAS (APBD KAB)			25	31	103	159
3	RTLH (APBN)					100	100
4	BEDAH KAMPUNG			50			50
5	BBR			50		540	590

Sumber : Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kab. Bone Bolango

b. Capaian Kinerja/Outcome Program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja urusan perumahan selang tahun 2011-2014 adalah :

1. Meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang memiliki rumah layak huni. Adapun data perkembangan peningkatan rumah layak huni sejak tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dan dibawah ini :

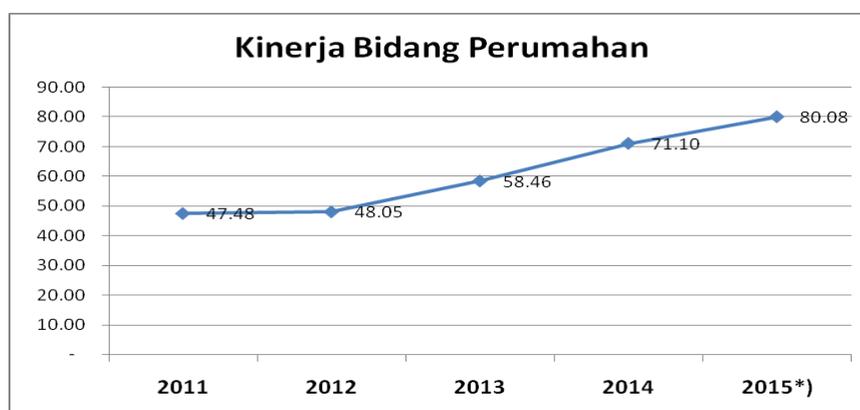


Tabel 4.34
Data Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015
Kabupaten Bone Bolango

Perkembangan Rumah Layak Huni	2011	2012	2013	2014	2015
	8319	8419	10242	12457	14030

Prosentase kinerja bidang perumahan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4.5 Kinerja Bidang Perumahan
Tahun 2010-2014 Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kab. Bone Bolango

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja di bidang perumahan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan trend positif dengan capaian kinerja di tahun 2015 sebesar 80%. Dengan demikian maka tantangan daerah pada periode mendatang tinggal 20%.

c. Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa permasalahan dan solusi dalam urusan perumahan, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Permasalahan

- Belum optimalnya perencanaan sasaran penerima bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin hal ini dapat dilihat masih terdapat eksklusion dan inklusion error sasaran program
- Belum optimalnya koordinasi implementasi program pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan



- c) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program yang menyebabkan tumpang tindih dalam implementasi, hal ini dapat dilihat dari penerima yang menerima bantuan perumahan lebih dari satu kali dalam setahun
- d) Terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Infrastruktur Perdesaan dan Pembangunan Air Minum Perdesaan, mengingat masih banyaknya desa-desa yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut
- e) Masih lemahnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni.

2. Solusi

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah diatas adalah

- a) Optimalisasi tim swakarsa masyarakat dalam menentukan sasaran prioritas penerima yang didasarkan pada besaran penghasilan, tanggungan dan kriteria lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku
- b) Optimalisasi tim koordinasi, monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan untuk menilai sejauhmana tingkat efektivitas program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengurangan beban keluarga yang disebabkan tingginya biaya pembangunan rumah layak huni
- c) Mengusulkan rencana pembiayaan yang proporsional terhadap pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Infrastruktur Perdesaan dan Air Minum Perdesaan, sekaligus merekrut tenaga pendamping masyarakat yang /kapabel
- d) Menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang dapat mendorong peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni secara signifikan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan Pembangunan/Perbaikan Rumah Murah Bagi Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah.
- e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) dan melakukan pelatihan SDM serta meningkatkan partisipasi *stakeholders* yang terkait dalam penyelenggaraan program Perumahan Bagi Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah.





5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

Urusan Wajib Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang penataan ruang telah dianggarkan sebesar Rp. 9,524,961,028 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 8,233,529,528 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,291,431,500 oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum antara lain :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1) **Program Perencanaan Penataan Ruang**, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai RTRW dengan peserta sebanyak 100 orang dan anggaran Rp. 27.387.000
2. Publikasi RTRT sebanyak 2 kegiatan dan anggaran Rp. 30.552.000
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW dengan anggaran Rp. 237.109.400
4. Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebanyak 3 dokumen dengan anggaran Rp. 157.673.666
5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kabila dengan anggaran Rp. 110.720.000
6. Perencanaan RDTR Ibu Kota Suwawa dengan anggaran Rp. 445.648.500
7. Penyusunan RDTR kawasan perdagangan dengan anggaran Rp. 198.897.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 100.000.000
2. Penyusunan dokumen RDTR Kecamatan Kabila Bone dengan anggaran Rp. 63.527.000

2) **Program Pemanfaatan Ruang**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Survey dan pemetaan batas wilayah dengan anggaran Rp. 580.000.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Suwawa dengan anggaran Rp. 780.000.000

b. Capaian Kinerja/Outcome Program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome program adalah sebagai berikut:



- 1) Meningkatnya kondisi ruang sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Tata ruang Wilayah
- 2) Meningkatnya ketertiban dalam implementasi ruang yang memungkinkan pengembangan wilayah secara utuh, teratur dan berkelanjutan

Prestasi yang diperoleh di bidang penataan ruang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 antara lain :

1. Penghargaan terhadap prestasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tercepat se- Provinsi Gorontalo Dari Kementerian PU Bidang Tata Ruang Tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya perencanaan kawasan dan tata ruang wilayah dalam mengatur serta mengendalikan pembangunan berdasarkan sasaran peruntukan ruang
- b) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas implementasi tata ruang oleh aparat yang ahli serta profesional dibidangnya khususnya penegakkan hukum tata ruang dan kawasan

2) Solusi

- a) Perlu adanya pengawasan yang continue melalui penerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang tata ruang kawasan dan wilayah terutama bagi wilayah yang belum diatur secara spesifik/detail tentang pemanfaatan ruang
- b) Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait menyangkut pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan wajib perencanaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 – 2014 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang penataan ruang telah dianggarkan sebesar Rp. 18,379,116,586 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 14,487,826,336 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 3,891,290,250 meliputi kegiatan sebagai berikut :





a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1). Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan meliputi :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebanyak 1 Dokumen
2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebanyak 1 Dokumen
3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan setiap tahun sebanyak 5 Dokumen
4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan setiap tahun sebanyak 5 Dokumen
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebanyak 5 Dokumen
6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) selama 5 tahun sebanyak 5 dokumen
7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan – Prioritas Platform Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) selama 5 tahun sebanyak 5 dokumen
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) selama 5 tahun sebanyak 5 dokumen
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebanyak 5 dokumen
10. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten (TAPKIN) sebanyak 5 dokumen
11. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan.
12. Penyusunan Dokumen 1 Dasawarsa Kabupaten Bone Bolango Sebanyak 1 Dokumen
13. Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah H2O sebanyak 2 dokumen
14. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
15. Penyusunan Dokumen evaluasi DAK da APBN

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan
2. Penyelenggaraan Forum SKPD
3. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten
4. Penyusunan Dokumen RKPD





5. Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan
6. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS
7. Penyusunan Dokumen KUPA-PPASP
8. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
9. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Daerah
10. Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan
11. Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 5 Tahunan (Akhir Masa Jabatan)
12. Penyusunan Dokumen Rancangan RPJMD 2016-2020
13. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2). Program Perencanaan Bidang Ekonomi, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kajian Sektor Prioritas Bidang Pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan energy, perindustrian yang masing-masing sebanyak 1 dokumen
2. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
2. Penyusunan dokumen pelaksanaan perencanaan bidang ekonomi

3). Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Kajian Evaluasi sector pendidikan
2. Kajian Evaluasi sector kesehatan
3. Penyusunan Buku Evaluasi Indikator Pembangunan Bidang Sosial Budaya
4. Penyusunan Laporan MDGs Kabupaten Bone Bolango

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan dokumen pelaksanaan perencanaan bidang sosial budaya

4). Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, meliputi kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen potensi sumber daya alam
2. Penyusunan Dokumen desain ekowisata di zona pemanfaatan TNBW

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan dokumen perkembangan pelaksanaan perencanaan bidang sarana prasarana wilayah





- 5). **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh**, dengan kegiatan meliputi :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perkantoran
- 6). **Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Besar dan Menengah**, meliputi kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen program sanitasi air minum masyarakat
 2. Penyusunan dokumen RAD-AMPL

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

 1. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan program sanitasi air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
 2. Penyusunan dokumen RAD-AMPL
- 7). **Program Pengembangan Data/Informasi**, meliputi kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen road map penelitian Kabupaten Bone Bolango
 2. Penyusunan dokumen kajian UKL/UPL danau perintis
 3. Penyusunan Dokumen Kajian Publik Private Partnership Kabupaten Bone Bolango
 4. Penyusunan Dokumen revisi buku pembentukan Kabupaten Bone Bolango.
 5. Penyusunan dokumen SIPD
 6. Penyusunan dokumen profil daerah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

 1. Penyusunan dokumen data analisis dan capaian program sebagai bahan evaluasi RPJMD 2011-2015
 2. Penyusunan Kajian tentang Desa Mandiri Energi
 3. Penyusunan Dokumen Strategis Pemasaran Kopi Pinogu
 4. Penyusunan dokumen riset kerjasama pembangunan Kabupaten Bone Bolango
 5. Penyusunan Dokumen Revisi Buku Pembentukan Kabupaten Bone Bolango
 6. Penyusunan Sistem Informasi Data Pokok Daerah
 7. Penyusunan Dokumen Profil Daerah
- 8). **Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur perencana maka dilaksanakan kegiatan berupa pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan workshop yang diikuti oleh seluruh aparatur perencana antara lain :





1. Bimbingan teknis revisi rencana strategi SKPD
2. Bimbingan teknis sistim perencanaan penentuan prioritas sasaran program penanggulangan kemiskinan
3. Bimbingan teknis sistim informasi perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang)
4. Bimbingan teknis sistim informasi penyusunan KUA-PPAS dan KUAPPASP
5. Bimbingan teknis sistim informasi penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi rencana pembangunan (monev)
6. Bimbingan teknis sistim informasi penyusunan Dokumen LAKIP
7. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Strategi, Rencana Kerja dan RPJMD
8. Bimbingan teknis percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

Untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan, maka pada tahun 2015 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
2. Bimbingan teknis tentang penyusunan LKIP berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014
3. Bimbingan teknis tentang penyusunan dokumen monev rencana pembangunan berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010
4. Bimbingan teknis P3BM

b. Capaian Kinerja/outcome Program yang dilaksanakan

1. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
2. Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan yang dilaporkan tepat waktu.
3. Penyusunan dokumen APBD tepat waktu

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum konsistennya rencana output perencanaan dan penganggaran dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam penyusunan kebijakan pengendalian rencana pembangunan daerah





- c. Belum optimalnya pembinaan aparatur perencana di SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan, perubahan rencanapada tahn berjalan serta evaluasi rencana yang dijadikan acuan untuk penyusunan rencana di tahun berikutnya sehingga kesinambungan serta keberlanjutan pembangunan dapat dijamin serta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah,
- d. Belum optimalnya koordinasi data capaian kinerja baik SKPD maupun daerah sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian dalam menyusun dokumen analisis pembangunan daerah

2. Solusi

- a. Meningkatkan transparansi rencana pembangunan daerah kepada masyarakat dan pihak yang terkait sehubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- c. Intensitas publikasi hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana pembangunan
- d. Meningkatkan upaya pembinaan SDM aparatur perencana melalui intensitas asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan mengikutsertakan aparatur perencana dalam kegiatan bimbingan teknis aparatur perencana

7. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

Urusan wajib lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum selang tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang lingkungan hidup telah dianggarkan sebesar Rp. 20,867,261,135 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 14,482,201,835 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 6,385,059,300 adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- 1). **Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,** kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
 1. Pemeliharaan 1 unit pengangkut sampah dengan anggaran Rp. 82.018.000





2. Pengadaan 1 unit Alat Pengangkut Sampah dan Pemangkas Rumput dengan anggaran Rp. 211.680.000
3. Pengadaan 80 unit tong sampah dengan anggaran Rp. 257.939.000
4. Bimbingan teknis pengelolaan persampahan sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 107.229.337

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan bak pengomposan sebanyak 30 unit dengan anggaran Rp. 82.500.000
2. Pembuatan gedung dan bangunan gudang sebanyak 1 unit dengan anggaran Rp. 33.000.000
3. Pengadaan tong sampah 3 R (4 in 1) sebanyak 130 unit dengan anggaran Rp. 164.450.000
4. Pengadaan bak sampah permanen sebanyak 30 unit dengan anggaran Rp. 134.997.300
5. Pengadaan peralatan kebersihan dan pembersih sebanyak 1 unit dengan anggaran Rp. 53.900.000
6. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan dan peningkatan pemungutan retribusi PAD dengan anggaran Rp. 492.110.000

2). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi adipura/adiwiyata sebanyak 120 peserta dengan anggaran Rp. 58.873.900
2. Pengadaan 1 paket tong sampah dengan anggaran sebesar Rp. 22.915.000
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bilungala dengan anggaran Rp. 3.956.300
4. Biaya operasional penyusunan dokumen laporan kegiatan dengan anggaran Rp. 20.577.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pemantauan penilaian kota sehat Adipura/Adiwiyata dengan anggaran Rp. 72.275.000
2. Penyusunan status lingkungan hidup, hasil uji sampel dan SPM lingkungan hidup daerah sebanyak 15 dokumen dengan anggaran Rp. 14.250.000



3. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dengan anggaran Rp. 10.650.000

3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan bagi dunia usaha sebanyak 125 peserta dengan anggaran Rp. 28.787.000
2. Biaya operasional penyusunan dokumen laporan kegiatan dengan anggaran Rp. 59.957.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan tanaman vegetasi sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 110.000.000
2. Pemeriksaan dokumen-dokumen lingkungan dan izin-izin yang diterbitkan sebanyak 15 dokumen dengan anggaran Rp. 63.244.250
3. Konsultasi penelitian sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 250.000.000
4. Pengadaan tanaman hias di taman kota sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 82.000.000

4). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja kegiatan hari lingkungan hidup sebanyak 100 orang dengan anggaran Rp. 48.912.500
2. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Study Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bone Bolango dan AMDAL PPI Kab. Bone Bolango sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 94.600.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan dengan anggaran Rp. 28.692.800
2. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SIL) dengan anggaran Rp. 76.363.500

5). Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1. Belanja operasional penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 208.545.000
2. Pembangunan alun-alun kawasan pemerintahan sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 267.343.750
3. Pembangunan median jalan B.J. Habibie sepanjang 8500 meter dengan anggaran Rp. 1.014.674.850





4. Pembangunan trotoar Boludawa sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 216.532.000
5. Pembangunan Taman Simpang Tiga Bypass - Huluduotamo sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 93.261.200
6. Pembangunan Trotoar + Saluran Jl. Bj. Habibie sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 549.429.750
7. Penataan Taman Tilongkabila sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 130.000.000
8. Pemeliharaan Pintu Gerbang di Desa Pauwo Kec. Kabila sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 15.000.000
9. Pembangunan Jaringan Listrik PJU sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 3.971.500
10. Pembangunan dan Pengawasan Taman Kota Baru sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 97.030.400
11. Belanja Operasional Penyusunan Dokumen Hasil Tender & Pengadaan Konstruksi Lainnya serta laporan pelaksanaan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 244.824.275
12. Pembangunan RTH kantor bupati, RTH lapangan Duano, RTH pertigaan pasar Bulango Timur, RTH rumah adat Goberl dan bundaran Tapa, RTH Kantor BLH dengan total anggaran Rp. 646.645.200

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan taman hijau sekolah penunjang program Adiwiyata sebanyak 4 paket dengan anggaran Rp. 220.000.000
2. Penyusunan DED dan pengawasan kegiatan DAK sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 53.091.200
3. Pembangunan alun-alun kawasan pemerintahan (lanjutan) dengan anggaran Rp. 730.000.000
4. Pembangunan median jalan Habibie (lanjutan) dengan anggaran Rp. 500.000.000
5. Pembangunan RTH kawasan kantor camat Bone dengan anggaran Rp. 520.000.000
6. Pembangunan center point Bone Bolango dengan anggaran Rp. 1.130.000.000
7. Pemeliharaan RTH dengan anggaran Rp. 30.000.000
8. Perencanaan RTH kawasan kantor camat Bone dengan anggaran Rp. 25.000.000



9. Revisi desain kawasan alun-alun pemerintahan dengan anggaran Rp. 25.000.000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Meningkatnya volume timbunan sampah yang terangkut dari sumber sampah keTempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
2. Semakin pedulinya masyarakat untuk memahami pengelolaan sampah melalui sosialisasi maupun pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) peduli sampah;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas-fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan penambahan TPS dan komposter di beberapa lokasi strategis;
4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan
5. Semakin berkembangnya teknologi alternatif pengolahan sampah seperti Model Multi Drum Komposter dan Model Sistem Menimbun Sampah;
6. Meningkatnya jumlah sumberair yang dikonservasi melalui penghijauan;
7. Bertambahnya luas area terbuka hijau yang dibangun dan dipelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota;
8. Prestasi yang diraih adalah sertifikat Adipura tingkat Nasional tahun2014;

Prestasi yang diraih di bidang lingkungan hidup antara lain :

1. Penghargaan Sertifikat Adipura kategori Kota Kecil dari Presiden Republik Indonesia
2. Peringkat pertama lomba Upakarti tingkat provinsi

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, maka kedepan diharapkan adanya penambahan sarana pengelolaan sampah;





- b) Tingginya kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengadaan bibit yang ada, upaya yang dilakukan dengan kegiatan konservasi secara berkelanjutan;
- c) Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi ke instansi terkait sehubungan dengan perenanaan dan pelaksanaan dalam mewujudkan hasil program pembangunan berbasis lingkungan.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dalam mengimbangi besarnya jumlah timbunan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan,
- e) Belum optimalnya perencanaan dalam bentuk kajian teknis tentang efisiensi, efektifitas dan keamanan penggunaan "prototipe" pemanfaatan gas methane sampah,
- f) Belum optimalnya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak darisumbernya (3R; reuse, reduce and recyle) sesuai dengan amanah UU No 18 Tahun 2008

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Optimalisasi pembinaan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian alam melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat persampahan
- b) Mendorong pelaku usaha, instansi swasta maupun negeri untuk senantiasa menciptakan suasana yang aman, nyaman dan ramah lingkungan
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan ratio sampah
- d) Meningkatkan kajian-kajian tentang lingkungan hidup sebagai acuan dalam pembangunan sarana yang memperhatikan kenyamanan lingkungan

8. URUSAN WAJIB SOSIAL

Urusan Wajib Sosial yang telah dilaksanakan pada tahun 2011-2014 oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang sosial telah dianggarkan sebesar Rp.15,394,669,920 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 11,845,641,170 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 3,549,028,750 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :





a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya,

dengan kegiatan sebagai berikut

1. Sosialisasi LK3 dengan peserta sebanyak 64 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 17.550.000
2. Sosialisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penduduk usaha miskin dengan 150 peserta dan anggaran Rp. 194.997.800
3. Pelatihan Usaha Bagi Keluarga Miskin dengan peserta sebanyak 250 keluarga miskin dan anggaran sebesar Rp. 49.137.000
4. Belanja barang yang langsung diserahkan kepada 5 masyarakat dengan total nilai Rp. 24.999.700
5. Bantuan KUBE di seluruh kecamatan sebanyak 445 Kelompok dengan total anggaran Rp. 8.500.000.000
6. Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) di seluruh Kecamatan kepada 81 penerima dengan anggaran Rp. 1.320.000.000
7. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di seluruh kecamatan kepada 120 Penerima dengan total anggaran Rp. 1.750.000.000
8. Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bulawa dan Bone kepada 70 orang dengan anggaran 700.000.000
9. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga di Kecamatan Bulawa dan Bone kepada 80 orang dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000 melalui dana APBN
10. Bantuan Rumah Sederhana - Rumah Tinggal Layak Huni (RS-RTLH) dan Hunian Pantas diseluruh kecamatan kepada 315 penerima dengan total anggaran sebesar Rp. 3.552.500

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelaksanaan Bimtek peningkatan kualitas SDM petugas dan pendamping sosial sebanyak 30 peserta dengan anggaran Rp. 39.875.000
2. Pelaksanaan Sosialisasi penerima KUBE, BBR, dan UEP sebanyak 200 unit dengan anggaran Rp. 134.405.000
3. Pemberian bantuan BBR ringan, sedang, berat, UEP, KUBE, UEP skala kecil di wilayah kecamatan Tapa Bulango sebanyak 153 unit dengan anggaran Rp. 1.065.500.000
4. Pemberian bantuan KUBE dan BBR di wilayah Tilongkabila dan Kabila sebanyak 61 unit dengan anggaran Rp. 130.000.000





2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Bimtek Sosial Lansia dengan peserta sebanyak 45 orang dengan total anggaran Rp. 85.133.200
2. Sosialisasi dan Bimbingan teknis kepada 31 peserta dengan anggaran Rp. 9.183.500
3. Bimbingan Teknis Penangan Masalah Strategis, Cepat Tanggap, Darurat dan KLB kepada 30 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 299.570.975
4. Bantuan KUBE anak terlantar dan penyandang cacat kepada 4 kelompok penerima dengan total anggaran Rp. 62.000.000
5. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif terhadap lanjut usia, penyandang cacat, Ex-napi, Ex-kusta, gepeng dan tuna susila dengan 133 penerima dan total anggaran sebesar Rp. 208.500.00
6. Bantuan jaminan hidup anak dalam panti asuhan kepada 4 panti asuhan dengan anggaran Rp. 22.000.000
7. Asistensi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar kepada 220 penerima dengan total anggaran Rp. 375.600.000
8. Asistensi Sosial penyandang disabilitas kepada 49 penerima dengan anggaran Rp. 12.600.000
9. Bantuan wirausaha penyandang cacat terhadap 7 penerima dengan anggaran Rp. 10.500.000
10. Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa kepada 30 KK dengan anggaran Rp. 340.000.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Bimbingan sosial bagi anak terlantar, anak cacat dan anak nakal sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 72.360.000
2. Pelaksanaan Sosialisasi bagi PMKS yang memperoleh bantuan kepada 20 orang dengan anggaran Rp. 12.116.000
3. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000.000
4. Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 2 paket dengan anggaran Rp. 197.692.500
5. Bimbingan teknis penanganan masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa sebanyak 30 paket dengan anggaran Rp. 31.656.000





3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Bimtek Keterampilan bagi Karang Taruna kepada 50 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 53.455.000
2. Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan dengan anggaran sebesar Rp. 20.210.500
3. Santunan Pejuang Kemerdekaan kepada 5 pejuang sebesar Rp. 2.500.000
4. Bantuan kepada 11 Karang Taruna dengan total anggaran sebesar Rp. 120.000.000
5. Bantuan kepada 10 Organisasi Sosial (Orsos) dengan total anggaran sebesar Rp. 100.000.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Sosialisasi/bimtek dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dengan peserta 30 orang dan anggaran sebesar Rp. 53.950.000
2. Kegiatan kelembagaan perlindungan sosial dengan anggaran Rp. 28.125.000

Program dan kegiatan urusan wajib sosial yang telah dilaksanakan selang tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.35
Capaian Output Pada Program Perlindungan Sosial
Selang Tahun 2011-2014*

No	Kegiatan	Satuan	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Kegiatan Sosialisasi LK3	Orang	-	-	32	-	32
2	Pelatihan Usaha Bagi Keluarga Miskin	Orang	50	-	200	-	250
3	Sosialisasi sarana prasarana penduduk usaha miskin	Peserta	-	-	150	-	150
4	Belanja Barang yang langsung diserahkan kepada masyarakat	Penerima	-	-	-	5	5
5	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk kesejahteraan sosial	Kelompok	102	80	205	62	449
6	Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)	KK	7	44	56	30	137





No	Kegiatan	Satuan	2011	2012	2013	2014	Jumlah
7	Asistensi Kesejahteraan Keluarga (AKSK)	Orang	80	-	-	-	80
8	Bantuan Rumah Sederhana – Rumah Tinggal Layak Huni (RS-RTLH) dan Hunian Pantas	Orang	75	13	227	-	315
9	Bimtek dan Sosialisasi Kesejahteraan Sosial	Peserta			75		75
11	Bimtek Masalah Strategis, Cepat tanggap, Darurat dan KLB	Peserta	-	-	30	-	30
13	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	10	-	57	66	133
14	Bantuan Jaminan Hidup Kepada Panti Asuhan	Panti Asuhan	-	-	-	4	4
15	Asistensi Bagi Penyandang Sosial	Orang	89	92		118	299
18	Bantuan Wirausaha Penyandang Cacat	Orang	-	-	-	7	7
19	Bantuan BBR Tanggap Darurat	KK	10	10	10		30
20	Bimtek Karang Taruna	Kelompok	-	2	5	4	11
21	Bantuan Untuk Karang Taruna	Kelompok	-	2	10		12
22	Bantuan Untuk Organisasi Sosial	Kelompok	-	5	4	1	10

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango

b. Capaian Kinerja/Outcome Pelaksanaan Program

Adapun capaian kinerja outcome program pada urusan sosial adalah:

- 1) Menurunnya penduduk miskin setiap tahunnya
- 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah

c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan pada ubidang sosial ini adalah:

- a) Belum optimalnya perencanaan serta updating sasaran program perlindungan sosial seperti PKH, JKN, dan program perlindungan sosial sehingga sering terjadi tumpang tindih bantuan sosial



- b) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program sehingga unsur keadilan dan pemerataan dalam program ini masih belum memenuhi harapan masyarakat

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi pada program perlindungan sosial adalah

- a) Optimalisasi penentuan karakteristik penerima bantuan yang didasarkan kebutuhan sasaran program
- b) Optimalisasi pemberian bantuan sosial yang didasarkan pada aspek keadilan dan pemerataan yakni dilihat dari besaran yang diterima penduduk miskin setiap tahun serta karakteristik penduduk miskin (sangat miskin, miskin dan hampir miskin)

9. URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

Urusan Wajib Tenaga Kerja pada tahun 2011-2015 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan ketenagakerjaan telah dianggarkan sebesar Rp.1,170,882,100 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 882,512,100 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 288,370,000 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program yang dilaksanakan

1). Program peningkatan kesempatan kerja

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kesempatan kerja pada tahun 2011-2014 antara lain :

1. Pelatihan Kegiatan Meubelier sebanyak 25 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 243.540.000
2. Pelatihan Kegiatan Baby Sitter sebanyak 25 Peserta dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.695.000
3. Penyusunan dokumen laporan pelaksana kegiatan sebanyak 7 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 32.090.900
4. Sosialisasi JAMSOSTEK kepada 110 peserta dengan anggaran Rp. 12.070.000
5. Publikasi informasi lowongan kerja kepada 850 orang dengan anggaran Rp. 89.617.500

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelatihan kegiatan fasilitasi dan pelatihan berbasis masyarakat kepada 20 peserta dengan anggaran Rp. 148.235.000





2). Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan yang di ikuti oleh 25 Orang dengan jumlah anggaran Rp. 36.235.400

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Sosialisasi/bimtek tentang undang-undang tenaga kerja, perlindungan hukum bagi tenaga kerja kepada 35 peserta dengan anggaran Rp. 50.375.000
2. Sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan kepada 30 peserta dengan anggaran Rp. 13.600.000

b. Capaian Kinerja/Outcome Pelaksanaan Program

Adapun yang menjadi caaian kinerja outcome program ketenagakerjaan adalah:

- 1) Meningkatnya lapangan pekerjaan disegala bidang setiap tahunnya
- 2) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan lapangan pekerjaan
- 3) Menurunnya Angka pengangguran

c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjada permasalahan bidang ketenagkerjaan adalah

- a) Belum optimal penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka pengangguran
- b) Belum optimalnya pembinaan bagi calon tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja
- c) Belum optimalnya kerja sama dengan pihak swasta dalam perekrutan tenaga kerja dalam daerah

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan bidang ketenagkerjaan adalah

- a) Meningkatkan fasilitas dibidang industri dalam upaya penciptaan lapangan kerja
- b) Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola kekayaan alam daerah sehingga akan tecipta lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja





10. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM

Urusan Wajib Koperasi dan UMKM selang tahun 2011-2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan koperasi dan usaha kecil menengah telah dianggarkan sebesar Rp.6,473,001,422 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 5,452,605,522 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,020,395,900 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1). Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif

Adapun capaian kinerja selang tahun 2011-2014 serta target tahun 2015 diuraikan dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 4.36
Realisasi Program Penciptaan Iklim
Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif tahun 2011-2014*

No	Kegiatan	Satuan	Realisasi				Target 2015	Total
			2011	2012	2013	2014		
1	Bantuan UKM	Kelompok	57	-	34	71	344	506

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kab. Bone Bolango

Untuk mendukung program diatas maka dilaksanakan beberapa kegiatan penunjang program, antara lain :

1. Verifikasi Calon Penerima Bantuan dan Penyaluran Bantuan dengan 1 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 42.250.000
2. Verifikasi dan Seleksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 49.995.000
3. Pembuatan Dokumentasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah kepada 1 UKM dengan anggaran Rp. 24.715.000
4. Pegawai yang melakukan Pengembangan/pemantauan pelaku usaha penerima bantuan dan konsultasi keluar daerah dengan 2 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 88.381.300
5. Study Banding Orientasi Pemberian Bantuan UMKM sebanyak 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 29.700.000





6. Penyusunan Dokumen Tender sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 21.162.575
7. Monev UMKM Pasca Penerimaan Bantuan sebanyak 6 dokumen dengan anggaran Rp. 10.800.000

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Bantuan Sarana Mobilitas Usaha (Sepeda Dayung) untuk pelaku UKM sebanyak 25 Unit dengan total anggaran sebesar Rp. 53.924.750
2. Operasional Pemberian Bantuan UMKM dengan 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 20.955.000
3. Seleksi dan Pendampingan/Penyaluran Bantuan dengan 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 28.180.250

2). Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.36

Realisasi Output Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Tahun 2011-2014

No	Kegiatan	Satuan	Realisasi				Target 2015	Total
			2011	2012	2013	2014		
1	Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan	Peserta	-	75		275	72	422

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kab. Bone Bolango

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Kue PIA Khas Bone Bolango dengan peserta sebanyak 20 peserta dan anggaran sebesar Rp. 42.529.400
- b) Sosialisasi Hak Atas Tanah (SHAT) Bagi UMKM kepada 50 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 12.295.000
- c) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Pengembangan Kewirausahaan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 33.605.000

3). Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, adapun kegiatan selang tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 4.37
Realisasi Output Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha
Bagi UMKM Tahun 2011-2014

NO	Kegiatan	Satuan	Realisasi				Target 2015	Total
			2011	2012	2013	2014		
1	Pembangunan Galeri IKM	Paket	-	-	1	-	-	1
2	Promosi Produk Unggulan pada APKASI/EXPO	Kegiatan	3	1	1	1	1	7

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kab. Bone Bolango

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Promosi Produk Unggulan Daerah Pada APKASI EXPO dengan 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 84.464.000
- 4). Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**, diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.38
Realisasi Output Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi tahun 2011-2014

NO	Kegiatan	Satuan	Realisasi				Target 2015	Total
			2011	2012	2013	2014		
1	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop perkoperasian	Peserta	75	100	180	201	50	606

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kab. Bone Bolango

Kegiatan penunjang dalam rangka mendukung program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi antara lain :

1. Aparat yang melakukan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan koperasi sebanyak 5 kali kegiatan dengan anggaran Rp. 167.057.400
2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi sebanyak 1 kali dengan anggaran sebesar Rp. 8.750.000
3. Kegiatan Insentif Petugas Koperasi sehat dan berprestasi dengan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.079.000
4. Pembinaan Koperasi Berprestasi kepada 20 Koperasi dengan anggaran Rp. 188.000.500



5. Barang yang akan dijual ke pihak ketiga dengan 2 kegiatan dengan anggaran Rp. 5.000.000
6. Promosi Produk Usaha Koperasi Pada Pameran HARKOPNAS Tkt Pusat sebanyak 2 kegiatan dengan anggaran Rp. 86.400.000
7. Pendataan koperasi aktif dan tidak aktif dengan anggaran Rp. 9.100.000

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD kepada 25 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 19.590.000
2. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian kepada 50 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 31.100.000
3. Penilaian Koperasi kepada 25 Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 28.112.500
4. Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 11.545.000
5. Pengembangan Kerja Sama Koperasi dengan Jawa Timur dan Sulawesi Tengah sebanyak 2 kegiatan dengan anggaran Rp. 37.190.000
6. Peningkatan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada 25 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 11.745.000

b. Capaian Kinerja/Outcome Program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome program bidang koperasi dan UMKM

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi aktif

*Tabel 4.39
Koperasi Aktif tahun 2011-2012
Kabupaten Bone Bolango*

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014
Jumlah Koperasi aktif	74 Koperasi	54 Koperasi	55 Koperasi	62 Koperasi

*Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM
Kab. Bone Bolango*

- 2) Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah





c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang koperasi dan UMKM adalah Bidang Koperasi

- a) Belum optimalnya pembinaan bagi tenaga teknis pembinaan Koperasi dan UKM ditingkat kabupaten dalam menumbuhkembangkan manajemen koperasi sehingga koperasi menjadi mandiri baik dari sisi permodalan dan keanggotaannya.
- b) Belum optimalnya manajemen pengendalian koperasi untuk mencegah tingginya angka pertumbuhan Koperasi dan tidak dibarengi dengan persentase jumlah Koperasi yang tidak meningkat.
- c) Belum optimalnya koordinasi dengan pihak swasta dalam mendukung permodalan dan bunga pinjaman koperasi. Bidang UMKM
- d) Belum optimalnya perencanaan penentuan sasaran penerima bantuan UMKM
- e) Belum optimalnya evaluasi bagi penerima bantuan umkm dalam upaya meningkatkan pendapatan sehingga penentuan strategi kebijakan berdasarkan tingkat usaha tidak dapat dilaksanakan
- f) Belum optimalnya monitoring dan pengawasan terhadap kualitas produk UMKM sehingga kalah bersaing dalam pemasaran

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

Bidang Koperasi

- a) Meningkatkan upaya pembinaan bagi SDM perkoperasian terutama pengelola koperasi dalam bentuk diklat teknis perkoperasian sehingga pengelola dapat memajemen koperasi secara proporsional dan profesional sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi
- b) Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam upaya meningkatkan manajemen koperasi sehingga koperasi menjadi mandiri dalam memberikan pelayanan pada anggotanya

Bidang UMKM

- a) Meningkatkan pembinaan bagi UMKM terutama dalam mengelola UMKM melalui Pelatihan UKM
- b) Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam memperkuat modal serta manajemen UMKM melalui pembiayaan dari perbankan.





- c) Meningkatkan kualitas produk/kemasan yang dihasilkan oleh UMKM dan memfasilitasi pemasaran produk dengan mengikutsertakan koperasi dan UMKM pada pameran-pameran tingkat nasional maupun lokal.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana tempat pameran dan pemasaran produk KUKMKM yang representatif

11. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

Urusan Wajib Penanaman Modal selang tahun 2011-2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan penanaman modal telah dianggarkan sebesar Rp.639,877,800 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 320,960,800 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 318,917,000 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1). Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka promosi dan kerjasama investasi antara lain :

1. Jasa Publikasi Iklan Pembangunan Daerah dengan 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 129.950.000
2. Promosi dan Informasi Potensi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 22.240.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengembangan potensi unggulan daerah dengan anggaran Rp. 25.425.000
2. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dengan anggaran Rp. 22.000.000
3. Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan anggaran Rp. 114.254.000

2). Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi antara lain :





1. Pengadaan system informasi penanaman modal sebanyak 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 73.795.500
2. penyusunan dokumen kajian penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 30.832.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengembangan system informasi penanaman modal dengan anggaran Rp. 50.850.000
2. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dengan anggaran Rp. 87.880.000

b. Capaian Kinerja/outcome Program yang dilaksanakan

Adapun yang menjadi capaian outcome bidang penanaman modal adaah:

- 1) Jumlah investor yang berinvestasi di Kab. Bone Bolango, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 4.40
Daftar Perusahaan/Investor di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2011- 2014*

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Modal (Rp)
1.	PT. Celebes Bone Minerals	Pertambangan Emas	10.000.000.000
2.	PT. Gorontalo Minerals	Pertambangan Emas (Kontrak Karya)	427.859.465.000
3.	PT. Panah Emas	Pertambangan Emas/Tembaga	70.850.000
4.	PT. Explorasi Indonesia Jaya	Pertambangan Emas/Tembaga	24.000.000.000

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang penanaman modal adalah:

- a) Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan tumpang tindihnya perizinan, izin yang dikeluarkan sudah sesuai dengan SOPserta menjamin tidak ada percaloan dalam pengurusan perizinan
- b) Belum optimalnya publikasi data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan.
- c) Belum sinerginya pelaksanaan promosi daerah baik antar instansi terkait di daerah maupun di Pusat dalam upaya penyebar luasan informasi potensi dan peluang investasi



2) Solusi

Adapun solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah diatas adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan dengan mensosialisasikan serta melaksanakan proses perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan masing-masing jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Meningkatkan kualitas SDM petugas pelayanan melalui peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai diklat, orientasi pelaksanaan tugas ke beberapa daerah, penyediaan pakaian khusus, dan peningkatan kesejahteraan

12. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat telah dianggarkan sebesar Rp. 214,106,243,658 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 169,229,036,518 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 44,877,207,140 dilaksanakan oleh SKPD :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Ekonomi Pembangunan
5. Bagian Tata Pemerintahan
6. Bagian Umum dan Protokoler
7. Bagian Hukum dan Tata Laksana Organisasi
8. Sekretariat DPRD
9. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
10. Kantor Unit Pelayanan Pengadaan
11. Seluruh Kecamatan di kabupaten Bone Bolango

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :





1). Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan selang tahun 2011-2014 antara lain :

1. Pembahasan Ranperda selama 4 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 4.438.013.293
2. Pelaksanaan kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dengan total anggaran sebesar Rp. 30.790.000
3. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat kelengkapan dewan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.587.105.393
4. Pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Paripurna dengan total anggaran sebesar Rp. Rp. 598.914.000
5. Kegiatan reses ke seluruh kecamatan selama 4 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 1.039.000.000
6. Kunjungan Dalam Daerah yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 52 kali dengan total anggaran sebesar Rp. 229.730.000
7. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD berupa bimtek, konsultasi, studi komeratif, seminar, workshop dan sosialisasi yang dilaksanakan selama 4 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 2.846.314.360
8. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 12.590.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah :

1. Penyusunan 25 Ranperda usul inisiatif DPRD dan Eksekutif dengan anggaran Rp. 412.500.000
2. Konsultasi Perda Usul inisiatif Komisi I, Komisi II dan Komisi 3 dengan 12 kegiatan dengan anggaran Rp. 798.676.000
3. Koodinasi/Konsultasi/Studi Banding/Komperatif Badan Legislasi dan Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dengan 12 anggaran Rp. 548.334.000
4. Pelaksanaan Lokakarya/Seminar/Konsultasi Publik untuk pembahasan ranperda pada komisi I, Komisi II dan Komisi III dengan 25 kegiatan dan anggaran Rp. 42.733.000
5. Pendampingan DPRD dengan 2 kegiatan dan anggaran Rp. 149.607.000
6. Pelaksanaan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat pada komisi I, Komisi II dan Komisi III sebanyak 108 kali dengan anggaran Rp. 94.500.000





7. Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 107 kali dengan anggaran Rp. 748.952.000
8. Pelaksanaan kegiatan rapat paripurna sebanyak 20 kali dengan anggaran Rp. 383.040.000
9. Pelaksanaan Kegiatan reses di Dapil I, II, III dan IV sebanyak 12 kegiatan dengan anggaran 206.100.000
10. Pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD didalam daerah sebanyak 112 kali dengan anggaran 1.138.895.000
11. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 8 kali dengan anggaran Rp. 1.222.192.000
12. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 18 kali dengan anggaran Rp. 933.041.000

2). Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kegiatan yang dilaksanakan selang tahun 2011 – 2014 antara lain :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah kecamatan bersama kepala desa/kepala dusun/tokoh yang dilaksanakan selama 4 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 26.100.000
2. Pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dengan anggaran Rp. 365.369.900
3. Pelaksanaan Rapat koordinasi bidang pemerintahan dan rapat muspida dengan total anggaran sebesar Rp. 92.629.500
4. Pelaksanaan Rapat rutin evaluasi program kegiatan kecamatan dengan anggaran Rp. 3.999.000
5. Pelaksanaan Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 4 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 368.584.700

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan dengan peserta 1500 orang dan anggaran Rp. 167.677.500
2. Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan dengan anggaran Rp. 35.345.000
3. Pelaksanaan Pameran Pembangunan dengan 65 peserta dan anggaran Rp. 96.600.000
4. Kunjungan kerja/inspeksi kepada daerah/wakil kepala daerah dengan 5 kegiatan dan anggaran Rp. 168.620.000





3). Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan yang selang tahun 2011-2014 antara lain:

1. Penyusunan Standar Satuan Harga dengan total anggaran sebesar Rp. 275.410.000
2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah (APBD KAB) dengan anggaran Rp. 56.193.000
3. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 33.800.900
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan total anggaran Rp. 216.184.700
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 477.599.100
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 266.288.400
7. Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah (APBD KAB) dengan total anggaran Rp. 896.472.100
8. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 533.009.100
9. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 508.672.100
10. Peningkatan manajemen aset/barang daerah selama 4 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.170.250
11. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 145.534.500
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 1.716.224.600

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan standar satuan harga sebanyak 2 dokumen dan anggaran Rp. 145.370.000
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2016 dengan anggaran Rp. 190.500.000
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2015 dengan anggaran Rp. 582.276.000
4. Penyusunan dokumen ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 dengan anggaran 50.826.000





5. Revaluasi/appraisal asset/barang daerah dengan anggaran Rp. 42.640.000
6. Intensifikasi dan eksensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan anggaran Rp. 576.700.000

4). Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Kegiatan yang dilaksanakan antara tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala selama 4 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 1.414.930.000
2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 434.984.000
3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan total anggaran sebesar Rp. 192.720.700
4. Pelaksanaan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan selama 4 tahun dengan anggaran Rp. 180.436.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan 146 LHP dan anggaran Rp. 989.810.000
2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 19 LHP dan anggaran Rp. 298.245000
3. Koordinasi pengawasan dengan anggaran Rp. 89.166.000
4. Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan siding MP-TP-TGR dengan anggaran Rp. 133.525.000

5). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan AparaturPengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selang tahun 2011 – 2014 antara lain :

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 54 aparat dengan anggaran Rp. 203.231.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran Rp. 151.600.000
2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja dengan anggaran Rp. 54.345.000





- 6). **Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**, kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- a) Peliputan oleh mass media sebagai informasi penyelenggaraan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dengan total anggaran sebesar Rp. 1.056.160.000
 - b) Penyusunan sistim informasi terhadap layanan public yang terdiri dari pengadaan peralatan jaringan komputer, penyelenggaraan rapat evaluasi penggunaan LPSE, pembuatan website Bagian Ekonomi dan Pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp. 585.096.700
 - c) Penyusunan sistim informasi terhadap layanan publik yang terdiri dari pengadaan komputer server SIPPT sebanyak 1 unit dengan total anggaran sebesar Rp. 161.690.000
 - d) Penyusunan sistim informasi terhadap layanan publik berupa proses pengadaan paket barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 219.100.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Peliputan penyelenggaraan kegiatan pimpinan dan anggota DRD dengan anggaran Rp. 521.000.000
 - b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 12 bulan serta publikasi program dan kegiatan pembangunan pemerintahan dengan anggaran 805.100.000
 - c) Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan anggaran Rp. 203.200.000
 - d) Pengelolaan jaringan informasi di 8 sektor dengan anggaran Rp. 665.000.000
 - e) Penyusunan sistim informasi keuangan daerah dengan anggaran Rp. 359.200.000
 - f) Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran Rp. 353.174.800
 - g) Pembangunan/pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah dengan anggaran Rp. 132.274.000
- 7). **Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011-2014 dalam rangka untuk mendukung program antara lain :
- a) Pembentukan tim khusus dalam rangka penanganan masalah dengan anggaran sebesar Rp. 21.701.000



Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Penanganan pengaduan masyarakat dengan anggaran Rp. 79.740.000

8). Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011-2014 dalam rangka peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah yaitu :

- a) Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik berupa rapat koordinasi dengan anggaran sebesar Rp. 327.952.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan anggaran Rp. 114.342.500

9). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011-2014 antara lain :

- a) Pelaksanaan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundang-undangan dan publikasi peraturan perundang-undangan dengan total anggaran Rp. 838.442.700

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 90.000.000
- b) Penyusunan Raperda dan Raperbup dengan anggaran 331.040.000
- c) Sosialisasi penyuluhan hukum dengan anggaran Rp. 149.800.000
- d) Publikasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 193.611.287

10). Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011- 2014 yaitu:

- a) Penyelesaian masalah mengenai tapal batas dan pelaksanaan sosialisasi pemantapan SOTK dengan dengan total anggaran sebesar Rp. 37.000.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Penyelesaian 5 masalah tapal batas dengan anggaran Rp. 33.493.300

11). Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011-2014 antara lain :



- a) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 41 Orang dengan total anggaran sebesar Rp. 58.670.000
- b) Pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan structural sebanyak 88 orang dengan anggaran Rp. 528.734.000
- c) Penyelenggaraan workshop mind setting sebanyak 18 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000

12). Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah antara lain :

- a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNS dengan anggaran Rp. 1.730.027.200
- b) Keikutsertaan Diklat Prajabatan, Diklat PIM II, III dan IV sebanyak 482 aparatur PNS.

Daftar jumlah PNS Kabupaten Bone Bolango yang telah mengikuti Diklat Stuktural dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.41
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural*

Diklat Struktural	Satuan	2011	2012	2013	2014	Total
Diklat Prajabatan Gol. II	PNS	227	-	-	-	227
Diklat Prajabatan Gol. III	PNS	162	-	-	-	162
Diklat PIM IV	PNS	-	39	-	-	39
Diklat PIM III	PNS	2	3	40	2	47
Diklat PIM II	PNS	-	2	2	3	7

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pelatihan Aparatur Daerah

- c) Pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan sebanyak 54 orang dengan anggaran Rp. 100.774.450

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

- a) Pelatihan diklat PIM II, III dan IV sebanyak 10 orang dengan anggaran Rp. 258.140.000
- b) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah dengan anggaran Rp. 97.500.000

13). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung program pembinaan dan pengembangan aparatur selama 4 tahun antara lain :

- a) Seleksi penerimaan PNS sebanyak 2.018 CPN dengan total anggaran Rp. 120.598.648
- b) Pelaksanaan Rapat Baperjakat selama 4 tahun dengan anggaran Rp. 73.978.000





- c) Penataan sistim kenaikan pangkat otomatis, pensiun, dan sosialisasi jabatan dengan total anggaran sebesar Rp. 164.820.000
- d) Pembangunan pengembangan system informasi kepegawaian berupa SIMPEG dan SAPK dengan total anggaran sebesar Rp. 158.098.000
- e) Penghargaan kepada 65 PNS yang berprestasi dan berkinerja baik sebanyak 65 orang dengan anggaran Rp. 72.700.000
- f) Pelaksanaan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dengan anggaran Rp. 7.657.000
- g) Bantuan beasiswa pendidikan bagi 61 PNS dengan anggaran Rp. 199.264.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

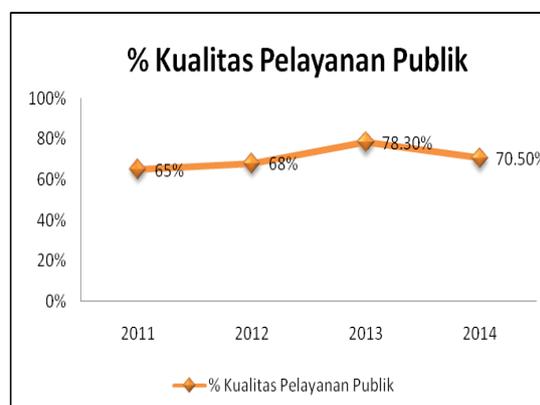
- a) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS dengan anggaran Rp. 87.007.000
- b) Seleksi penerimaan CPNS dengan anggaran Rp. 7.290.000
- c) Penempatan PNS dengan anggaran Rp. 176.250.000
- d) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dengan anggaran Rp. 43.860.000
- e) Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dengan anggaran Rp. 186.588.000
- f) Bantuan pendidikan bagi PNS dengan anggaran Rp. 42.000.000

b. Capaian Kinerja/Outcome Program yang Dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome program yang dihasilkan adalah

- 1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik

Grafik 4.6 Trend Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bone Bolango



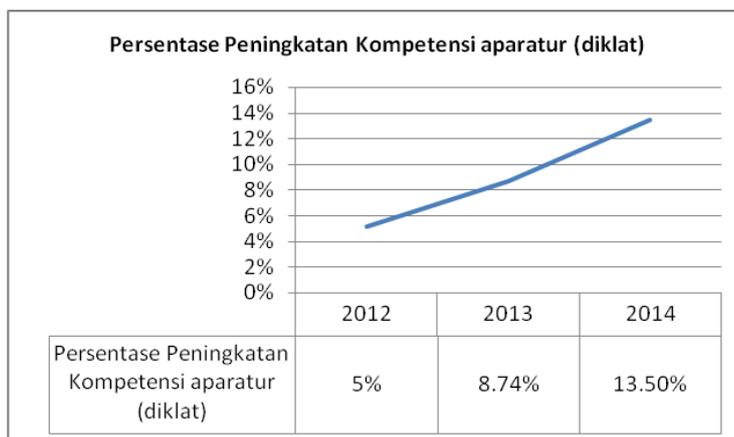
Sumber : Survey Barometer Gorontalo





- 2) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan sesuai dengan keahlian dan profesionalitas

Grafik 4.7 Peningkatan Kompetensi Aparatur Tahun 2012 – 2014 Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pelatihan Aparatur Daerah

- 3) Jumlah Peraturan daerah yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.42

Peraturan Daerah yang dihasilkan pada tahun 2011-2014

Jumlah Peraturan Daerah yang di hasilkan	2011	2012	2013	2014
	25	25	25	25

- 4) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi wajar tanpa pengencalaian (WTP)
 5) Meningkatnya kasus yang diselesaikan.
 6) Meningkatnya perizinan yang dikeluarkan baik untuk lembaga usaha swasta maupun perseorangan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.43

Data Perizinan Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2012

Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	2011	2012	2013	2014	2015*)
	218	579	643	779	656

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Bone Bolango





c. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang ini adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan SDM aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat disemua lini dan bidang pemerintahan, menyelesaikan berbagai konflik dan masalah di lapangan.
- b) Belum optimalisasi pengendalian terhadap batas daerah Kabupaten Bone Bolango dengan daerah lainnya menyangkut persoalan perbatasan oleh Team Penetapan Batas Daerah
- c) Belum optimalnya pengawasan terhadap obyek pemeriksaan karena kurangnya sarana/prasarana dan alat pengukur dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan

2) Solusi

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah :

- a) Mengoptimalkan SDM aparatur dalam meningkatkan kecermatan dalam penyusunan perencanaan terutama kepada kegiatan-kegiatan yang benar-benar akan memecahkan permasalahan pokok, dan tetap mengacu kepada tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang telah dituangkan didalam renstra, disamping itu diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
- b) Meningkatkan koordinasi dalam pelayanan publik sehingga dapat tercapai good governance
- c) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
- d) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
- e) Mengoptimalkan kegiatan pemetaan/penggalian potensi sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada dengan melakukan ekstensifikasi dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutannya.





13. URUSAN WAJIB STATISTIK

Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna. Dalam istilah sistem informasi dikenal istilah Gigo (garbage in garbage out) maksudnya adalah apabila input datanya sampah maka yang dihasilkan adalah sampah pula. Demikianlah data memegang peran yang sangat penting dalam sebuah formulasi perencanaan.

Data dan informasi yang akurat dan valid adalah keniscayaan yang harus tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas di daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (up to date). Kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dapat terus ditingkatkan. Namun, sebagai pelaksana pembangunan, Pemerintah Daerah juga sebaiknya menghimpun dan menginventarisir sendiri seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Data dan informasi statistik tidak hanya dibutuhkan oleh instansi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, kalangan dunia usaha serta masyarakat luas. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya dalam perumusan kebijakan yang diawali dari proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga pada proses pemantauan/monitoring, serta pada proses mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Urgensi penyediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan tidak dapat ditunda lagi. Pada kenyataannya, setidaknya terdapat dua isu utama dalam hal ketersediaan data dan informasi pembangunan. Pertama availability data itu sendiri, dan yang kedua adalah lokasi sumber data yang masih persial. Penyusunan sebuah dokumen perencanaan seringkali membutuhkan ratusan bahkan ribuan data pendukung, namun data itu belum tentu ada semua. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data di Indonesia juga belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan data untuk pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan data sektoral di Kabupaten/Kota. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk bersama-sama saling bekerjasama dalam hal penyediaan data pembangunan daerah. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan statistik telah dianggarkan sebesar Rp.546,990,950 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 532,903,950 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran





sebesar Rp. 14,087,000

Urusan Wajib Statistik selama tahun 2011-2014 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1). Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Pembuatan Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) sebanyak 171 Buku dengan anggaran sebesar Rp. 69.446.000
2. Pembuatan Dokumen Kecamatan Dalam Angka (KcDA) sebanyak 171 buku dengan anggaran Rp. 29.200.000
3. Publikasi Statistik Daerah sebanyak 171 Buku dengan anggaran Rp. 24.077.000
4. Penyusunan Dokumen PDRB dengan anggaran sebesar Rp. 70.350.000

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pembuatan Dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) sebanyak 60 Buku
2. Pembuatan Dokumen Kecamatan Dalam Angka (KcDA) sebanyak 72 Buku
3. Penyusunan Buku Informasi PDRB sebanyak 35 Buku

b. Capaian Kinerja/Outcome Program yang Dilaksanakan

Adapun capaian kinerja bidang statistik yang dihasilkan adalah

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dikarenakan data statistik yang akurat dan terpercaya
- 2) Publikasi program dan kegiatan lebih akuntabel, cepat, tepat, terarah dan terpadu

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang statistik adalah

- a) Belum optimalnya publikasi data disebabkan pengolahan data statistik yang masih terkesan lambat

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan bidang statistik adalah :

- a) Optimalisasi publikasi data melalui kerja sama dengan BPS baik data makro maupun data mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah





14. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango.

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah

1. Karnaval Budaya
2. Penyelenggaraan kegiatan seni dan Budaya tingkat Nasional

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan budaya dengan anggaran Rp. 30.664.000

2) Program pengelolaan keragaman Budaya

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah

1. Karnaval Budaya Tingkat Kabupaten
2. Pemilihan Bintang Radio Tingkat Kabupaten dan provinsi
3. Gita Bahan Nusantara Tingkat Kabupaten dan provinsi
4. Pemilihan Nou dan Uti Tingkat Kabupaten dan provinsi
5. Kegiatan pembuatan Film Perjuangan 23 Januari
6. Kegiatan Forum Komunitas Seniman dan Musisi Tingkat Kabupaten Bone Bolango
7. Kegiatan Hiburan Rakyat Dalam Rangka Hari Patriotik Tingkat Kabupaten
8. Kegiatan Parade Walimah Tingkat Kabupaten
9. Kegiatan Tumbilatohe Tingkat Kabupaten
10. Kegiatan Hiburan Rakyat di 18 Kecamatan
11. Keg. Pemilihan Putri Pariwisata Tkt kabupaten dan Provinsi
12. Keg. Lomba Vokalia dan Paduan Suara Ekspo Bone Bolango

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Karnaval budaya tingkat kabupaten dengan anggaran Rp. 119.450.000
2. Pemilihan bintang radio tingkat kabupaten dengan anggaran Rp. 11.166.000
3. Pemilihan bintang radio tingkat provinsi dengan anggaran Rp. 5.285.000





4. Gita bahana nusantara tingkat kabupaten dengan anggaran Rp. 14.075.000
5. Bitu bahana nusantara tingkat provinsi dengan anggaran Rp. 5.065.000
6. Pemilihan nou dan uti tingkat kabupaten dengan anggaran Rp. 61.494.500
7. Pemilihan nou dan uti tingkat provinsi dengan anggaran Rp. 5.540.000
8. Pembuatan film perjuangan 23 januari dengan anggaran Rp. 250.000.000
9. Forum komunitas seniman dan musisi tingkat kabupaten bone bolango dengan anggaran Rp. 45.000.000
10. Pelaksanaan hiburan rakyat dalam rangka hari patriotic dengan anggaran Rp. 275.000.000
11. Pelaksanaan parade walimah dengan anggaran Rp. 5.000.000
12. Pelaksanaan kegiatan tumbilotohe tingkat kabupaten dengan anggaran Rp. 5.000.000
13. Pelaksanaan hiburan rakyat di 18 kecamatan dengan anggaran Rp. 100.000.000

b. Capaian Kinerja/Outcome Program yang Dilaksanakan

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kebudayaan adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara budaya daerah sebagai wujud sikap dan perilaku masyarakat yang berbudaya
- b. Terpeliharanya budaya daerah sebagai perwujudan bangsa yang berbhineka tunggal ika dimana diantara berbagai suku bangsa, bbudaya bne bolango merupakan salah satu suku bangsa yang kaya akan adat dan budaya daerah.
- c. Meningkatnya rasa persatuan dan solidaritas antar masyarakat dengan enjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga terhindar dari tindakan yang meecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan utama pada urusan kebudayaan di Kabupaten Bone Bolango antara lain:



- a) Belum optimalnya pembinaan budaya daerah sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu masih mengedepankan sifat kedaerahan yang sering memicu konflik antar suku, adat dan budaya
- b) Belum optimalnya organisasi budaya daerah dalam mengembangkan adat budaya daerah sehingga adat budaya daerah dapat dikenal di tingkat nasional maupun internasional

2) Solusi

Berkenaan dengan permasalahan diatas, beberapa solusi :

1. Membentuk wadah atau forum budaya yang membahas tentang perkembangan budaya daerah kabupaten bone bolango sehingga budaya daerah tetap lestari dan terjaga nilai-nilainya
2. Memfasilitasi organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pengembangan budaya sehingga budaya dapat berkembang serta mampu memfilter adat atau budaya asing yang tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan budaya masyarakat daerah

15. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat menjadi salah satu bentuk kinerja pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk pengurusan KartuKeluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan dimaksud terus ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak e-KTP dan akta catatan sipil. Bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang kependudukan dan catatan sipil telah dianggarkan sebesar Rp.7,984,199,824 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 6,484,199,824 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,500,000,000,

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai Tahun 2014 sebanyak 4 dokumen dengan anggaran total sebesar Rp. 1.075.803.750 dan





- pada tahun 2015 biaya penyusunan dokumen sebesar Rp. 237.957.920
2. Pengadaan Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan meliputi pengadaan komputer, server dan jaringannya, serta sarana pendukung lainnya sebanyak 28 jenis peralatan dengan total anggaran sebesar Rp. 133.480.000,-
 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan selama 5 tahun sebesar Rp. 155.417.400
 4. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang regulasi administrasi kependudukan maka dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan peserta sejumlah 620 orang dengan anggaran sebesar Rp. 277.585.450

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 antara lain :

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu berupa pengadaan peralatan personal komputer sebanyak 4 buah dan penyusunan dokumen administrasi kependudukan sebanyak 4 dokumen dengan total anggaran Rp. 117.277.500
2. Pemeliharaan komputer client server dan papan visual elektronik dengan anggaran Rp. 1.000.000
3. Penyusunan laporan efektifitas alat-alat perekam yang dikecamatan dengan anggaran Rp. 17.800.000
4. Penyusunan dokumen profil kependudukan dengan anggaran Rp. 20.886.980
5. Pelayanan mobile di 17 kecamatan dengan 4 dokumen dan anggaran Rp. 122.660.000
6. Sewa mobil dan bahan bakar minyak penunjang kegiatan pelayanan mobile di 17 kecamatan dengan anggaran Rp. 85.500.000
7. Penyusunan database kependudukan dengan anggaran Rp. 134.680.000
8. Pendataan dokumen pencatatan sipil yang sudah memiliki akta kelahiran usia sekolah (5-18 tahun) dengan anggaran Rp. 75.510.000
9. Pelaksanaan sosialisasi perubahan UU No 24 tahun 2013 atas UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi perkantoran dengan 500 peserta dan anggaran Rp. 61.050.000

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian standar Urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dapat diperoleh melalui indikator kinerja jumlah masyarakat yang terlayani atau





memiliki KTP dan Kartu Keluarga. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 4.44
Data Masyarakat telah memiliki dokumen kependudukan
(KTP dan Kartu Keluarga)*

NO	Indikator Kinerja Kunci	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	62.100	71.507	73.821	77.911
2	Jumlah penduduk wajib KTP	102.079	108.722	113.382	118.226
3	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	5.981	2.850	21.678	39.749
4	Jumlah penduduk memiliki akta kematian	149	141	272	495
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	62.100	71.507	73.821	73.821

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh gambaran bahwa dari total jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sampai dengan tahun 2014 adalah sejumlah 118.226 penduduk, dan yang telah terlayani dalam kepengurusan KTP sebanyak 77.911 penduduk, dengan demikian dari total penduduk yang telah memiliki KTP sebesar 66 Persen.

Adapun prestasi yang di raih dibidang pelayanan kependudukan antara lain :

1. Piagam Penghargaan Dari Kementerian Dalam Negeri Mengenai Keberhasilan Tercepat e-KTP Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a) Belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil sebagai pencerminan warga negara;
- b) Belum optimalnya pembinaan sumber daya manusia sebagai pelaksana untuk mewujudkan keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2) Solusi :

- a) Melakukan pembinaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi melalui program dan kegiatan kependudukan ditingkat kecamatan sampai ke desa
- b).Mengikutsertakan aparatur dinas kependudukan dan catatan Sipil untuk mengikuti bimbingan teknis atau diklat.





16. URUSAN WAJIB KEARSIPAN

Urusan Wajib Kearsipan pada tahun 2014 ini dilakukan oleh 1 (satu) SKPD yaitu kearsipan, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan kearsipan telah dianggarkan sebesar Rp.244,829,000 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 230,218,500 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 14,610,500 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dengan kegiatan :

- a) Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah sebanyak 601 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.34.769.000,-
- b) Penyediaan Alat tulis kantor sebanyak 18 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.14.804.500,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

2. Pengelolaan arsip daerah sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 14.610.500

2) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan informasi kearsipan perpustakaan sebanyak 1 Aplikasi dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,-

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome yang telah dicapai adalah

- 1) Meningkatnya pengelolaan dan arsip daerah sebagai dokumen daerah yang menggambarkan proses kinerja daerah setiap tahunnya

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kearsipan adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan aparatur dalam merencanakan, mengelola serta mendokumentasikan peristiwa pembangunan daerah
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung proses pengarsipan dokumen daerah yang profesional

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan di atas adalah

- a) Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam mengelola arsip daerah





- b) Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung proses pengarsipan dokumen daerah sehingga terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam

17. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Urusan Wajib Komunikasi dan informatika yang dilaksanakan pada tahun 2011-2014 yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD yaitu Bagian Humas, Komunikasi dan Informatika, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan komunikasi dan informatika telah dianggarkan sebesar Rp.7,492,833,532 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 5,950,733,532 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,542,100,000 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program danKegiatan Yang Dilaksanakan

1) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan Media Masa,

dengan kegiatan :

1. Pengelolaan media center sebanyak 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.33.600.000
2. Mobile Pelayanan Internet kecamatan sebanyak 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.122.280.000
3. Pengelolaan informasi dan dokumentasi sebanyak 1 sektor dengan anggaran sebesar Rp.85.800.000,-
4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan jaringan dan komunikasi sebanyak 6 paket dengan anggaran sebesar Rp.545.677.000
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan infomasisse banyak 12 paket dengan anggaran sebesar Rp.356.959.999
6. Studi komparatif program telekomunikasi dan telematika sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.14.480.000
7. Kegiatan informasi Seni Bone Bolango sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,-
8. Konsultasi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.29.530.000,-
9. Monitoring MPLK sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.27.700.000,-



Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengelolaan jaringan informasi sebanyak 8 sektor dengan anggaran sebesar Rp. 681.000.000
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa sosialisasi kepada 200 orang dengan anggaran 56.000.000

2) Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, dengan kegiatan :

1. Bimbingan teknis teknologi komunikasi dan informasi bagi nelayan, tenaga pendidik, pejabat dilingkungan pemda, pengurus PKK dan pengelola website dengan anggaran sebesar Rp. 258.013.000
2. Desiminasi/Sosialisasi sebanyak dengan anggaran sebesar Rp.45.932.000,-
3. Konsultasi pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan informasi sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.004.000,-

3) Program kerjasama informasi dengan mas media, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Jasa penyiaran / publikasi media elektronik/cetak sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.873.400.000,-
2. Pembuatan dan penyusunan tabloid kambungu untuk 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp.149.100.000
3. Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp.795.100.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 800.100.000
2. Publikasi program dan kegiatan pembangunan pemerintahan tahun 2015 dengan anggaran Rp. 5.000.000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome yang dihasilkan adalah:

- 1) Meningkatnya pengelolaan informasi yang berkualitas serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang komunikasi dan informatika adalah :



- a) Belum optimalnya pelayanan informasi bagi masyarakat dalam menerima informasi bdiang pembangunan terutama di desa-desa yang tidak dapat dijangkau dengan media informasi
- b) Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur informasi dalam meberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan pelayanan perkembangan ekonomi pasar, status sosial serta infomrasi penanganannya.
- c) Belum optimalnya perencanaan SDM berlatar belakang komunikasi dan informatika yang diharapkan dapat mengelola sarana dan prasarana infrormasi daerah khususnya pengelolaan media center sebagai pusat informasi daerah.

2) Solusi

Adapun yang menjadi olusi atas permasalahan bidang komunikasi dan informastika adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan informasi pada masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur jaringan dan software yang dijadikan sumber informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
- b) Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika sehingga kemudahan, kecepatan dalam pelayanan dapat dijamin keberlanjutannya serta kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat tetap terjaga

18. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

Urusan Wajib Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah selang Tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan perpustakaan telah dianggarkan sebesar Rp.3,190,256,760 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 2,671,088,760 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 519,168,000 meliputi program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Monitoring Pengelolaan Perpustakaan sebanyak 131 sekolah dengan anggaran sebesar Rp.88.769.000,-





2. Pelaksanaan lomba perpustakaan desa, lomba perpustakaan, komunitas kecamatan dan lomba kreatifitas siswa sebanyak 360 orang dengan anggaran sebesar Rp.47.857.500,-
3. Pengadaan Bahan pustaka daerah dan desa sebanyak 3000 paket dengan anggaran sebesar Rp.179.000.000,-
4. Pengelolaan perpustakaan daerah dan desa sebanyak 12 paket dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000,-
5. Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 2 paket dengan anggaran sebesar Rp.30.560.000,-
6. Tenaga pengelola perpustakaan daerah dan desa sebanyak 39 orang dengan anggaran sebesar Rp.45.267.000,-

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Monitoring pengelolaan perpustakaan di 90 sekolah dengan anggaran Rp. 32.480.000
2. Pelaksanaan lomba perpustakaan desa, lomba perpustakaan sekolah dan lomba kreatifitas siswa dengan 300 peserta dan anggaran Rp. 41.326.500
3. Pengadaan bahan pustaka perpustakaan daerah sebanyak 1500 jenis dengan anggaran Rp. 16.415.000
4. Pengadaan Buku ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 1500 jenis dengan anggaran Rp. 26.000.000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcom bidang perputakaan adalah

- 1) Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat alam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui media-media non elektronik
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pustaka dalam meberikan layanan informasi di segala bidang

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perustakaan adalah

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana perustakan dalam enjangkau kebutuhan informasi sampai ke pelosok-peosok desa
- b) Terbatasnya petugas atau pustakawan dalam memberikan layanan pustaka kepada masyarakat

2) Solusi

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah sebagai berikut :





- a) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan desa yang diharapkan dapat menjangkau kebutuhan informasi sampai di desa yang sulit dijangkau
- b) Mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis, diklat atau sosialisasi tentang manajemen perpustakaan desa
- c) Meningkatkan jumlah buku-buku perpustakaan yang dijadikan bahan bacaan dan literatur bagi kalangan masyarakat, peneliti dan pihak lain yang terlibat langsung dengan pencarian informasi

19. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA

Urusan Wajib Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selang tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah dianggarkan sebesar Rp. 9,051,571,586 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 7.019.787.586 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 2,031,784,000 meliputi program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan :

1. Pelatihan kader desa sebanyak 48 kader dengan anggaran sebesar Rp.14,924,500
2. Sosialisasi jaminan kesehatan nasional sebanyak 19 orang dengan anggaran sebesar Rp.15,200,000,-
3. Peningkatan kemampuan kader kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak 48 orang dengan anggaran sebesar Rp.14,802,000
4. Dokumen hasil monev program promkes sebanyak 1 PKM dengan anggaran sebesar Rp.14,590,000,-

2) Program keluarga berencana, dengan kegiatan :

1. Kecamatan yang memperoleh layanan sebanyak 8 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.82,415,000,-
2. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga berencana sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.27,504,000





3. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebanyak 2 unit dengan anggaran sebesar Rp.63,800,000
4. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor sebanyak 10 unit dengan anggaran sebesar Rp.991,265,000
5. Sosialisasi pembinaan perempuan dan pelayanan KB sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.300,593,000
6. Pengadaan konstruksi bangunan balai penyuluh KB sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.141,943,048,-
7. Sarana mobilitas tim KB keliling (DAK) yang diadakan sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.867,430,453,-
8. Pengadaan konstruksi gedung kantor sebanyak 0.25 paket dengan anggaran sebesar Rp.29,764,994

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pembinaan program pelayanan KB dengan anggaran Rp. 112.444.000
2. Pembangunan Balai Penyuluh di Kec. Kabila Bone, Kec. Bulawa, Kec. Botupingge, Kec. Bulango ulu dan Kec. Bulango Timur masing2 1 paket dengan total anggaran Rp. 1.374.208.000
3. Orientasi program KB dan Kependudukan bagi PPKBD sebanyak 120 unit dengan anggaran Rp. 23.135.000
4. Jasa Perencanaan dan pengawasan dengan anggaran Rp. 50.000.000

3) Program pelayanan kontrasepsi, dengan kegiatan:

- a) Sosialisasi dan bimbingan teknis medis KB sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.27,250,000,-

4) Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat,dengan kegiatan:

- a) Sosialisasi kesehatan ibu, bayi dan anak sebanyak 734 orang dengan anggaran sebesar Rp.25,690,000
- b) Penyuluh kesehatan ibu,bayi dan anak sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.25,255,000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome yang dihasilkan adalah

1) Cakupan kepesertaan program KB

Cakupan kepesertaan program Keluarga berencana di Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





*Tabel 4.45
Cakupan Kepesertaan Program KB Kab. Bone Bolango
Tahun 2011-2014*

No.	Indikator Kinerja Kunci	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah peserta program KB aktif	27.204	26.089	22.943	21.422
2.	Jumlah pasangan usia subur	28.557	29.126	29.339	31.291
3.	Jumlah peserta KB aktif Pria	1.148	1.196	1263	1583
4.	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi	-	-	-	-
5.	Jumlah peserta KB yang mengalami kegagalan penggunaan kontrasepsi	-	-	-	-
6.	Jumlah peserta KB yang putus pakai (drop-out)	4.961	3.916	2551	922
7.	Jumlah peserta KB yang menerima pelayanan gratis	22.943	10.975	17935	18299
8.	Jumlah kasus komplikasi KB yang ditanggulangi dengan tepat	-	-	-	-
9.	Jumlah peserta KB pasca persalinan dan keguguran	-	169	160	129
10.	Jumlah petugas PLKB/PKB	23	28	28	28
11.	Jumlah peserta program P2WKSS	150	150	150	150
12.	Jumlah frekuensi pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	167	167	167	123
13.	Jumlah perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun	731	797	423	597
14.	Penduduk usia 10-19 tahun yang mengidap AIDS	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone Bolango

Prestasi yang diraih dalam urusan keluarga berencana sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 antara lain

1. Penghargaan Pengelola UPPKS terbaik 2012 dari BKKBN Pusat pada tahun 2012
2. Penghargaan Manggala Karya Kencana di bidang Keluarga Berencana dari Presiden pada tahun 2014

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan



Adapun permasalahan bidang keluarga berencana adalah :

- a) Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat terutama remaja tentang arti pentingnya pemeliharaan kesehatan alat reproduksi dan pencegahan penyakit menular seksual serta upaya pencegahan dari yang diakibatkan karena pergaulan bebas
- b) Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program keluarga berencana akibat keterbatasan pilihan kontrasepsi dan terbatasnya jumlah tenaga medis dalam inovasi pelayanan kontrasepsi.

2) Solusi

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus tentang reproduksi dan segala hal yang menyangkut tentang program keluarga berencana serta perilaku sehat yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan urusan keluarga berencana secara matang dan terarah setiap tahunnya.
- c) Mengoptimalkan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di seluruh kecamatan, yang berfungsi untuk mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan kerusakan alat reproduksi dan bahaya penyakit menular seksual kepada remaja.

20. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selang tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dianggarkan sebesar Rp.2,816,754,225 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 2,009,008,225 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 807,746,000 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan :

1. Biaya Operasional Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan (P2TP2) sebanyak 12 orang dengan anggaran sebesar Rp.32.343.525





2. Fasilitas Pengembangan P2TP2 yang diadakan sebanyak 17 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.11.430.000
3. Bimtek peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 250 orang dengan anggaran sebesar Rp.73,801,000,-
4. Pendataan Keluarga sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.55,458,800,-
5. Pendataan Peserta P2WKSS sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.23,512,200,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyewaan gedung sekretariat P2TP2A dengan kapasitas 75 orang dengan anggaran Rp. 15.000.000
2. Orientasi pendataan keluarga sebanyak 50 dokumen dengan anggaran Rp. 56.952.000
3. Pengumpulan data terpilih sebanyak 17 dokumen dengan anggaran Rp. 56.952.000

2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi perlindungan pada perempuan terhadap tindak kekerasan sebanyak 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.42,344,000,-
2. Penanganan korban KDRT sebanyak 15 orang dengan anggaran sebesar Rp113,998,000,-
3. Penyusunan dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan program sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.9,120,000,-

3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan Kegiatan P2WKSS selama 4 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 217.343.000
2. Kegiatan PHI sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.25,000,000,-
3. Biaya operasional pembinaan organisasi perempuan sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.47,436,500,-
4. Sosialisasi hasil Rakernas (PKK) sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.447,400,000,-
5. Peringatan hari Ibu dengan anggaran sebesar Rp.23,000.000,-
6. Sosialisasi/ pembinaan pengurus PKK desa di lokasi P2WKSS sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.39,350,000,-





7. Sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.11,800,000,-
8. Bimtek pada kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.194,190,000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pembinaan organisasi perempuan dengan 18 kegiatan dan anggaran Rp. 500.000.000
2. Pelaksanaan kegiatan peringatan hari ibui dengan anggaran Rp. 25.000.000
3. Pelaksanaan workshop PPRG dengan anggaran Rp. 39.247.000
4. Pelaksanaan kegiatan P2WKSS dengan peserta sebanyak 150 orang dan anggaran sebesar Rp. 82.525.000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome yang dihasilkan pada bidang pemberdayaan perempuan

- 1) Meningkatnya kesejahteraan dan kesetaraan gender dikalangan masyarakat dan kalangan pemerintahan
Peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender di kabupaten bone bolango dapa di lihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 4.46
Kesejahteraan dan kesetaraan gender
Tahun 2011-2014 Kabupaten Bone Bolango*

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Persentase usaha perempuan yang difasilitasi	20 %	35%	40%	40%
2	Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik	9%	10 %	13 %	12 %

Sumber Data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone Bolango

- 2) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun permasalahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

- a) Belum optimlanya koordinasi penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan pihak terkait





- b) Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan masyarakat termasuk perempuan yang mempengaruhi ketahanan masyarakat
- c) Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang responsif gender dikalangan pemerintahan yang berindikasi perhatian disektor pemberdayaan perempuan terabaikan sehingga perempuan hanyalah menjadi penghambat pembangunan dan bukan pelaku pembangunan.
- d) Belum optimalnya penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat UU Nomor 23/20021 yang ditandai dengan masih terdapatnya anak-anak yang menjadi pengemis di jalan, anak-anak pengasong pada malam hari

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Melaksanakan *Training of Trainers* (TOT) perencanaan yang berwawasan gender bagi aparat perencanaan pada seluruh SKPD.
- b) Mengalokasikan bantuan modal usaha kepada perempuan dan melakukan pelatihan keterampilan terhadap kaum perempuan.
- c) Membentuk dan mengoperasikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Mendorong semua SKPD untuk mulai melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender dibawah pengendalian sekretaris SKPD sebagai *focal point gender* dimasing-masing SKPD

21. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilaksanakan selang tahun 2011-2015 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Narkotika Kabupaten dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah dianggarkan sebesar Rp.19,847,246,952 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 15,000,894,442 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 4,846,352,510 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :



a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal, dengan kegiatan :

- a) Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong dengan anggaran sebesar Rp.637.800.000,-

2) Program Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :

1. Maulid Nabi Muhammad SAW
2. Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
3. Nifsu Syaban
4. Tonggeyamo 1 Ramadhan
5. Tadarus Al-Quran
6. Kahatam Al-Quran
7. Nuzul Al-Quran
8. Tonggeyamo 1 Syawal
9. Peringatan Tahun baru Islam 1436 H
10. Pemberdayaan Imam dan pegawai Syara
11. Buka puasa / sahur bersama 1435H/2014 M
12. Ramah tamah / penganjuran jamaah calon haji
13. Penerimaan jamaah haji
14. Tonggeyamo Idul Adha
15. MTQ Tingkat kab.Bone Bolango
16. MTQ Tingkat Prov.Gorontalo
17. Perayaan Hari raya idul Fitri
18. Safari Ramadhan
19. Hari raya idul Adha
20. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hibah & Bansos
21. Peringatan hari-hari besar islam
22. Sosialisasi FKUB sebanyak 200 orang dengan anggaran sebesar Rp.43.383.000,-
23. Pembinaan/ sosialisasi forum pembauran kebangsaan sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.15.669.000,-
24. Pemantauan dalam rangka peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat sebanyak 3 orang dengan anggaran sebesar Rp.20.240.000,-
25. Penyuluhan/ sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.14.855.000,-





26. Pemantauan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.14.235.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pembinaan /sosialisasi peran forum kerukunan umat beragama sebanyak 100 peserta dengan anggaran Rp. 16.764.000
2. Pembinaan/sosialisasi peran forum pembauran kebangsaan (FPK) sebanyak 50 peserta dengan anggaran Rp. 13.126.500
3. Penyusunan dokumen pemantauan dalam rangka peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sebanyak 3 dokumen dengan anggaran Rp. 20.085.000
4. Sosialisasi pembinaan organisasi masyarakat sebanyak 100 peserta dengan anggaran Rp. 18.673.000
5. Pembinaan/sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 200 peserta dengan anggaran Rp. 35.693.000
6. Penyusunan dokumen laporan pemantauan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 21.600.000

3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan:

1. forum keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 48 orang dengan anggaran sebesar Rp.21.600.000,-
2. Fasilitasi imamkecamatan, imam wilayah, pemangku adat, pegawai syara, imam jamaah dan Wu'u sebanyak 604 orang dengan anggaran sebesar Rp.536.750.000
3. Monitoring, evaluasi, pengawasan permohonan bantuan/ hibah tempat ibadah dan lembaga keagamaan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.55.741.500,-
4. Peningkatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp.9.600.000,-
5. Peringatan HUT kab.Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp. 141.950.000
6. Peringatan hari patriotik 23 januari dengan anggaran sebesar Rp. 61.500.000





7. Peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan sebesar Rp. 1.011.758.000
 8. Pengadaan perlengkapan kantor sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.13.125.000,-
- 4) Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan,**dengan kegiatan :
1. Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.174.850.000,-
 2. Sosialisasi Penanganan konflik sebanyak 120 orang dengan anggaran sebesar Rp.15.750.000,-
 3. Rapat KOMINDA dan MUSPIDA sebanyak 95 kali dengan anggaran sebesar Rp.276.940.000,-
 4. Rapat koordinasi penanganan konflik dalam rangka pemilu sebanyak 100 orang dengan anggaran sebesar Rp.23.741.500,-
 5. Penyuluhan/ sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.15.430.000,-
 6. Penyusunan dokumen laporan tim terpadu penanganan gangguan keamanan daerah sebanyak 4 kali dengan anggaran sebesar Rp.233.940.000,-
 7. Pemantauan kegiatan dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat sebanyak 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.11.565.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat koodinasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan daerah sebanyak 400 peserta dengan anggaran Rp. 77.950.000
 2. Penyuluhan/sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) sebanyak 200 peserta dengan anggaran Rp. 74.914.000
 3. Penyusunan dokumen pemantauan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebanyak 6 dokumen dan anggaran Rp. 69.390.000
 4. Penyusunan dokumen tim terpadu penanganan gangguan keamanan daerah selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 249.600.000
- 5) Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (pekat),** dengan kegiatan :



1. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.23.145.000,-
2. Pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis pencegahan eksploitasi anak bawah umur sebanyak 30 orang dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000,-
3. Penunjang kegiatan sosialisasi sebanyak dengan anggaran sebesar Rp.37.258.000,-
4. Penyusun dokumen capaian kinerja program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.6.680.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba kepada 100 peserta dengan anggaran Rp. 41.345.000

6) Program pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan :

1. Penyuluhan/ sosialisasi peraturan UU pemilu sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.40.880.000,-
2. Penyuluhan / sosialisasi peraturan UU pemilu kepada masyarakat sebanyak 200 orang dengan anggaran sebesar Rp.75.074.500,-
3. Penyusunan / sosialisasi pengawasan kelembagaan pemilu 2014 sebanyak 304 orang dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000,-
4. Penyusunan dokumen tim verifikasi bantuan parpol sebanyak 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,-
5. Sosialisasi budaya etika politik masyarakat sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.34.068.000,-
6. Penyuluhan/ sosialisasi peraturan UU pemilu kepada masyarakat sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.161.927.000,-
7. Penyusunan dokumen pemantauan forum –forum diskusi politik sebanyak 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.30.615.000,-
8. Penyusunan dokumen monev sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.9.325.000,-
9. Pemantauan tahapan pemilu legislative dan tahapan pemilu presiden tahun 2014 sebanyak 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.125.520.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyuluhan/sosialisasi peraturan UU pemilu kepada masyarakat dengan peserta sebanyak 300 orang dan anggaran sebesar Rp. 134.190.000



2. Penyusunan dokumen tim verifikasi bantuan partai politik sebanyak 4 dokumen dengan anggaran Rp. 30.000.000
3. Penyusunan laporan pemantauan penyuluhan/sosialisasi peraturan UU pemilu kepada masyarakat sebanyak 4 dokumen dengan anggaran Rp. 42.060.000
4. Penyuluhan/sosialisasi budaya dan etika politik kepada 200 orang dengan anggaran Rp. 52.300.000
5. Penyusunan dokumen pemantauan forum-forum diskusi politik sebanyak 4 dokumen dengan anggaran Rp. 42.060.000

7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan kegiatan :

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 100 sekolah dengan anggaran sebesar Rp.163.691.500,-
2. Sosialisasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 6 sekolah dengan anggaran sebesar Rp.42.475.000,-
3. Pelaksanaan kemah bakti siaga bencana sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.105.506.600,-
4. Peserta taruna siaga bencana sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp.38.915.000,-
5. Dokumen potensi bencana alam sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.24.855.000,-
6. Pengadaan sarana prasarana evakuasi penduduk sebanyak 10 unit dengan anggaran sebesar Rp.258.874.600,-
7. Pengadaan bantuan untuk penduduk yang ada di penampungan sementara sebanyak 100 jenis dengan anggaran sebesar Rp.151.560.000,-
8. Jumlah logistic dan obat-obatan untuk korban bencana alam sebanyak 6059 jenis dengan anggaran sebesar Rp.178.244.900,-

8) Program Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi korban bencana alam, dengan kegiatan :

- a) Terlaksananya pendataan kerusakan dan kerugian pasca bencana alam dengan 30 dokumen dan anggaran sebesar Rp.93.359.400,-

b. Capaian kinerja/outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome program bidang keatuan bangsa adalah

1. Berkurangnya angka kriminalitas



Pengurangan angka kriminalitas di kabupaten bone bolango dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.47
Pengurangan Angka Kriminalitas*

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014
Penurunan Jumlah kasus Pelanggaran hukum (Angka Kriminalitas)	20 %	23 %	25 %	20 %

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Bolango

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang kesatuan bangsa adalah

- a) Belum ooptimlanya pembinaan Sumberdaya aparatur dengan tugas khusus (intelijen) dirasakan masih kurang secara kualitatif dan kuantitatif sehingga pelaksanaan tugas SKPD belum maksimal.
- b) Belum lancar dan optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga informasi dan isu-isu aktual tentang keadaan sosial politik daerah kurang memadai.

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Meningkatkan implementasi menyangkut beberapa kegiatan yang dapat disinergikan seperti sosialisasi Pilkada, Koordinasi Penanganan Masalah Strategis, Sosialisasi Bahaya Pornografi Pornoaksi, Komunitas Intelijen Daerah, Pembinaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
- b) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait melalui wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat berkala
- c) Mengusulkan perubahan ketentuan tentang standar bantuan yang dapat diberikan oleh daerah untuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kepada Mendagri





22. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Untuk mencapai sasaran urusan kepemudaan dan olah raga maka pada tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan kepemudaan dan olah raga telah dianggarkan sebesar Rp. 12,152,663,070 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 10,052,663,070 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 2,100,000,000 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Peringatan Sumpah Pemuda selama 2 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 40.504.500
2. Penyusunan laporan kegiatan selama 2 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 9.990.500
3. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebanyak 74 orang dengan anggaran sebesar Rp.34,375,000
4. Seleksi Paskibraka di tahun 2014 sebanyak 70 orang dengan anggaran sebesar Rp.17.277.000
5. Kegiatan seleksi BPAP dan kemah bhakti tingkat kabupaten dan tingkat provinsi pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 418.924.500

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pembinaan organisasi pemuda sebanyak 250 orang dengan anggaran Rp. 18.762.500
2. Seleksi paskibraka kepada 100 orang dengan anggaran Rp. 14.280.000
3. Seleksi BPAP kepada 100 orang dengan anggaran Rp. 14.280.000
4. Pelaksanaan kemah bakti sosial dengan anggaran Rp. 173.060.500
5. Pelatihan dasar kepemudaan tentang keamanan lingkungan kepada 400 orang dengan anggaran Rp. 82.172.000

2. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan kecakapan hidup pemuda, dengan kegiatan :

1. Pelatihan bagi pemuda sebanyak 40 orang dengan anggaran sebesar Rp.23.045.000
2. Penyusunan laporan kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.9.935.000



3. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan kegiatan:

1. Pembinaan calon atlit/ olahraga sebanyak 15 Club dengan anggaran sebesar Rp.298.328.900,-
2. Pelaksanaan Tournament Volly Ball sebanyak 1 cabang dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
3. Pekan olahraga pelajar provinsi sebanyak 11 cabang dengan anggaran sebesar Rp.175.131.000,-
4. Lomba olahraga sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.950.000
5. Pelaksanaan Kegiatan senam kesegaran jasmani dan rohani sebanyak 48 kali di tahun 2013 dan 24 kali di tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp.16.400.000,-
6. Kegiatan HAORNAS ditahun 2014 sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.9.600.000
7. Keikutsertaan dalam kejuaraan / lomba ditingkat nasional sebanyak 3 cabang dengan anggaran sebesar Rp.184.022.303,-
8. Penyusunan laporan kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000,-
9. Keikutsertaan Kejurnas cab.catur di tahun 2014 sebanyak 4 cabang dengan anggaran sebesar Rp.49.537.000,-
10. Pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada Kegiatan peringatan HUT Bone Bolango sebanyak 66 cabang dengan anggaran sebesar Rp.132.173.500,-
11. Pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada Kegiatan peringatan HUT Proklamasi RI sebanyak 32 cabang dengan anggaran sebesar Rp.58.550.000,-
12. Kegiatan peringatan HAORNAS di tahun 2013 sebanyak 300 orang dengan anggaran sebesar Rp.16.500.000,-
13. Penyusunan laporan kegiatan sebanyak 2 dokumen (2013-2014) dengan anggaran sebesar Rp.1.716.000,-
14. Keikutsertaan lomba tingkat provinsi/regional sebanyak 315 kontingen dengan anggaran sebesar Rp.71.574.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pembinaan olahragawan berbakat cabang bulu tangkis kepada 1 klub dengan anggaran Rp. 55.835.000
2. Pembinaan olahragawan berbakat cabang volley ball kepada 1 klub dengan anggaran Rp. 24.550.000



3. Pembinaan olahragawan berbakat cabang catur kepada 1 klub dengan anggaran Rp. 13.975.000
 4. Pelaksanaan turnamen sepakbola antar kecamatan dengan anggaran Rp. 103.105.000
 5. Pelaksanaan turnamen volley ball tingkat kabupaten dengan anggaran Rp. 87.275.000
 6. Pelaksanaan kegiatan senam aerobic selama 1 tahun di kabupaten bone bolango tahun 2015 selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 14.850.000
 7. Pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat nasional sebanyak 3 cabang olahraga dengan anggaran Rp. 204.510.000
 8. Pelaksanaan kegiatan lomba antar SKPD dengan anggaran Rp. 62.240.000
 9. Pembinaan untuk pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Upacara memperingati HAORNAS sebanyak 400 orang dengan anggaran Rp. 16.700.000
 10. Kegiatan lomba tingkat SKPD, sekolah dan masyarakat dengan anggaran Rp. 55.000.000
 11. Pelaksanaan seleksi olahraga tradisional tingkat kabupaten sebanyak 1 kontingen dengan anggaran Rp. 14.546.000
 12. Pembinaan dan pemberian bonus/penghargaan untuk atlet yang berprestasi kepada 5 atlet dengan anggaran Rp. 25.000.000
- 4. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dengan kegiatan :**
1. Pembangunan lapangan olahraga kabila sebanyak 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.174.850.000,-
 2. Pembangunan lapangan olahraga kec.suwawa tengah sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.199.034.000,-
 3. Penyusunan dokumen capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.73.909.500
 4. Pembangunan pagar lapangan sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.174.167.000
 5. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.2.845.000
 6. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 6 Unit dengan anggaran sebesar Rp.955.805.600
 7. Rehabilitasi panggung lapangan sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.13.895.100,-



8. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.200.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

2. Pemeliharaan sarana prasarana olah raga sebanyak 2 unit dengan anggaran Rp. 49.595.000
3. Pemberian bola sepak yang di berikan untuk desa kepada 200 desa dengan anggaran Rp. 60.000.000

b. Capaian kinerja/Outcome pogram yang dilaksanakan

Capaian kinerja dari program yang dilaksanakan di bidang kepemudaan olah raga adalah berupa prestasi di bidang olahraga sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Peraihan 2 Medali Emas Kejurnas Atletik cabang Bridge yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2012
2. Peraihan 2 Medali Perunggu dalam Kejurnas cabang Tenis Meja dan cabang catur untuk kategori kelompok umur 8 tahun yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2012
3. Peringkat kedua Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tahun 2012
4. Peringkat III Kejurnas Bridge Tahun 2013
5. Peringkat III Junior Kejurnas CaturTahun 2013
6. Juara I Kejurnas Olahraga Cabang Tenis Meja Tahun 2012

Adapun persentase kinerja di bidang pemuda dan olah raga dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 4.48
Persentase Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga
Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2014*

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	75%	71.40%	75%	80%
Persentase Kejuaraan yang diraih pada setiap perlombaan	80%	79%	6.25%	88%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Bone Bolango

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan





Adapun yang menjadi permasalahan bidang pemuda dan olah raga adalah

- a) Belum optimalnya manajemen pembibitan dan pembinaan olahraga serta terbatasnya tenaga pelatih berkualitas pada sebagian besar cabang olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi atlet sampai ke jenjang nasional, regional dan internasional.
- b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga khususnya pada cabang olahraga prestasi
- c) belum optimalnya pembinaan masyarakat dalam menggali dan mengembangkan olahraga prestasi, rekreasi dan tradisional.
- d) Belum optimalnya pembinaan untuk mendorong motivasi dan kesempatan pemuda untuk melakukan dan atau mengikuti kegiatan kepemudaan dalam upaya pembangunan karakter dan kaderisasi bangsa
- e) Belum terdatanya dan terpetakan potensi dan kuantitas pemuda bila dilihat dari berbagai aspek, hal ini menyangkut spesifikasi kewilayahan, budaya dan lain-lain, sehingga pembangunan di bidang kepemudaan belum benar-benar terarah

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan di atas adalah

- a) Menyempurnakan data base, mempertajam perencanaan, melaksanakan pelatihan dan mengikuti berbagai event/ajang prestasi untuk meningkatkan motivasi dan kualitas prestasi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- b) Meningkatkan pengalokasian dana untuk pengadaan Sarana dan Prasarana bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang sesuai standar Nasional dan atau Internasional.
- c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, KONI/KNPI, pihak swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan
- d) Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan prestasi keolahragaan dengan menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan serta memperbanyak keikutsertaan pemuda dalam event-event
- e) Melakukan Pemantauan dan Pendataan kerja sama dengan Kabupaten Kota menyangkut potensi Atlet yang ada di daerahnya
- f) Melakukan monitoring dan penyusunan data base Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten





23. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Untuk mencapai sasaran urusan wajib perhubungan, maka pada tahun 2011-2015 Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang perhubungan telah dianggarkan sebesar Rp. 10,453,287,140 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 8,433,786,640 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 2,019,500,500 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan kegiatan :

1. Konsultasi Pembangunan sarana prasarana fasilitas perhubungan sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.13.000.000,-
2. Penyelenggaraan Kegiatan sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan sebanyak 30 orang dengan anggaran sebesar Rp.16.971.000,-
3. Sosialisasi kebijakan pemerintah dibidang perhubungan sebanyak 100 orang dengan anggaran sebesar Rp.26.337.600,-
4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan sejak tahun 2011 sampai 2014 dengan sekarang telah dilaksanakan beberapa agenda kegiatan antara lain :

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Sosialisasi bidang perhubungan kepada 100 peserta dengan anggaran Rp. 28.950.000

2. Program Peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Sosialisasi bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang sebanyak 30 orang dengan anggaran sebesar Rp.54.159.200,-
2. Monitoring tentang penerapan disiplin jalan raya sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.24.990.000,-
3. Pemeriksaan status kendaraan umum sebanyak 4 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.150.146.000,-
4. Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 6 unit dengan anggaran sebesar Rp.100.700.000,-
5. pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan dengan peserta sebanyak 160 orang dan anggaran Rp. 78.041.600





6. Konsultasi untuk peningkatan pelayanan angkutan sebanyak 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 20.371.200

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Penyusunan dokumen hasil pemeriksaan kelayakan angkutan umum dengan anggaran Rp. 154.120.000
2. Pengadaan angkutan darat Bus sebanyak 1 unit dengan anggaran Rp. 350.000.000
3. Pemilihan sopir teladan dan pelajar keselamatan sebanyak 200 orang dengan anggaran Rp. 25.000.000

3. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 10 jenis dengan anggaran Rp. 868.186.500

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 110 jenis dengan anggaran Rp. 132.000.000
2. Pengecatan marka jalan sebanyak 4950 jenis dengan anggaran Rp. 185.625.000
3. Pemasangan warming light sebanyak 2 jenis dengan anggaran Rp. 126.940.000
4. Pengadaan alat keselamatan lalu lintas sebanyak 2 jenis dengan anggaran Rp. 158.653.000
5. Pembangunan balai uji kendaraan sebanyak 2 unit dengan anggaran Rp. 45.000.000

b. Capaian kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun

- 1) Menurunnya angka kecelakaan

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perhubungan adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sehingga tingkat kecelakaan lalu-lintas relatif masih tinggi.
- b) Belum optimalnya Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan kepada 50 orang aparat kabupaten/kota yang dilaksanakan masih belum mencukupi.
- c) Belum optimalnya pembinaan aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sektor perhubungan





2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Perlu ditingkatkan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut Keselamatan dan Pengawasan Angkutan di jalan terutama Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan secara lebih luas

24. URUSAN WAJIB PERTANAHAN

Untuk mencapai sasaran urusan wajib pertanahan maka pada tahun 2011-2014 Bagian Tata Pemerintahan, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan Urusan Wajib bidang pertanahan telah dianggarkan sebesar Rp.25,092,302,523 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 21,582,855,773 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 3,509,446,750 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan anggaran Rp. 1.824.347.000
2. Pembebasan lahan kawasan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan anggaran Rp. 6.650.000.000
3. Pengadaan tanah pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp. 2.034.800.000
4. Biaya operasional penunjang kegiatan pembebasan lahan dengan anggaran Rp. 29.391.750

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain

1. Pengadaan tanah pembangunan infrastruktur daerah sebanyak 30 paket dengan anggaran Rp. 3.346.250.000
2. Operasional penunjang kegiatan pembebasan tanah sebanyak 10 paket dengan anggaran Rp. 87.760.000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun yang menjadi capaian inerja outcome adalah

- a) Tersosialisasinya hukum dan peraturan perundangan tentang pertanahan



c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang peraturan pertanian terutama menyangkut hak milik dan pengelolaan tanah

2. Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang hak milik dan pengelolaan tanah

25. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa dan Kecamatan selang tahun 2011-2014, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa telah dianggarkan sebesar Rp.11,965,966,745 dimana pada tahun 2011sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 8,602,499,745 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 3,363,467,000 adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1. Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten yang diikuti oleh 20 desa/kelurahan dengan anggaran Rp. 135.276.000
2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga operator sistim informasi profil data desa dan kegiatan pelatihan tenaga operator sistim informasi posyandu sebanyak 330 orang dengan anggaran Rp. 62.576.800
3. Honorarium pengelola profil desa sebanyak 72 orang dengan anggaran Rp. 39.193.200
4. Pelaksanaan kegiatan lomba inovasi TTG tingkat kabupaten sebanyak 100 peserta dengan anggaran Rp. 92.410.600
5. Penilaian pelaksanaan kegiatan BBGR sebanyak 500 orang dengan anggaran Rp. 90.350.000
6. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi AIDS kepada 200 peserta dengan anggaran Rp. 14.780.000
7. Pelaksanaan Rapat Kerja, posyantek dan konsultasi PNPM dengan anggaran Rp. 43.867.500





Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten dengan target 165 desa/kelurahan dan anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 101.984.000
 2. Sosialisasi LPM kepada 165 peserta dengan anggaran Rp. 51.781.000
 3. Pengumpulan data profil desa/kelurahan sebanyak 165 dokumen dengan anggaran Rp. 45.553.000
 4. Pengumpulan data sistim informasi posyandu sebanyak 165 dokumen dengan anggaran Rp. 22.419.000
 5. Kegiatan lomba inovasi TTG tingkat kabupaten dengan target peserta sebanyak 150 orang dan anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 68.650.000
 6. Kegiatan pencahangan BBGRM tingkat kabupaten dan tingkat nasional dengan target peserta sebanyak 300 orang dan anggaran sebesar Rp. 144.956.000
 7. Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi raskin sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 89.850.000
- 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :**
1. Sosialisasi pemanfaatan pekarangan kepada 200 peserta dengan anggaran Rp. 56.414.000
- 3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut :**
1. Pelaksanaan rapat koordinasi PNPM kepada 400 orang dengan anggaran Rp. 501.958.500
 2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) oleh kecamatan dengan total anggaran Rp. 97.722.000
 3. Sosialisasi ADD kepada 3060 peserta yang tersebar di 18 kecamatan dengan anggaran Rp.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Kegiatan penunjang administrasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dengan target 300 orang dan anggaran Rp. 472.750.000
2. Pembinaan kelompok masyarakat sebanyak 20 kelompok dengan anggaran Rp. 100.000.000
3. Pelaksanaan musrenbangdes dengan anggaran Rp. 60.965.000





4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan kegiatan :

1. Studi banding kepala desa kepada 7 kepala desa dengan total anggaran Rp. 76.050.000
2. Pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa kepada 46 aparatur desa se kabupaten dengan total anggaran Rp. 474.100.000
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan BPD kepada 255 peserta dengan anggaran Rp. 156.130.900
4. Pelaksana Kegiatan Pelatihan Fasilitator Desa kepada 255 peserta dengan anggaran Rp. 109.705.000
5. Pelatihan kesekretariatan dalam rangka pilkades kepada 3 peserta dengan anggaran Rp. 25.800.000
6. Tim Koordinasi Alokasi Dana Desa sebanyak 15 orang dengan anggaran Rp. 128.017.400
7. Pembinaan Kepala Desa dan Masyarakat sebanyak 250 orang dengan anggaran Rp. 314.860.000
8. Pelaksanaan Rakor Pasar Desa dengan anggaran Rp. 6.029.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Kegiatan sosialisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan target 165 aparatur desa dan anggaran kegiatan sebesar Rp. 37.765.000
2. Rapat koordinasi pemerintah desa sebanyak 990 orang dengan anggaran Rp. 263.220.000
3. Kegiatan pelatihan manajemen keuangan pemerintah desa sebanyak 320 peserta dengan anggaran Rp. 63.220.000
4. Monitoring perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dengan anggaran Rp. 41.690.000
5. Kegiatan pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif sebanyak 660 orang dengan anggaran Rp. 257.000.000

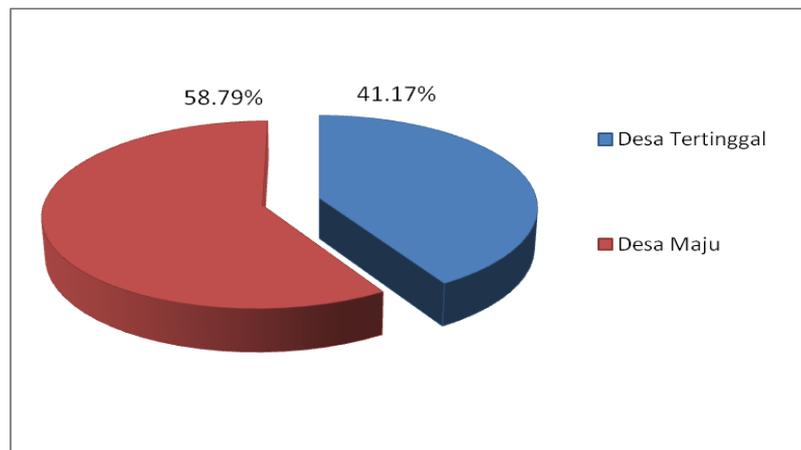
b. Capaian kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja outcome program pemberdayaan masyarakat adalah :

- a) Menurunnya jumlah desa tertinggal, dimana pada tahun 2013 terdapat 68 desa tertinggal dan 90 desa maju sedangkan pada tahun 2014 terdapat 43 desa tertinggal dan desa maju meningkat menjadi 114 desa. Indikator pembangunan desa di Kabupaten Bone Bolango dapat

dilihat pada grafik dibawah ini :

*Grafik 4.8
Indikator Pembangunan Desa
Kab. Bone Bolango*



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

- b) Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan aparatur pemerintah desa dalam manajemen desa dan pengelolaan keuangan desa
- b) Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa terutama dalam menentukan program prioritas desa yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa

2. Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah :

- a) Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola desa dan keuangan desa terutama bagi desa pemekaran serta desa yang memiliki potensi sumber daya alam sehingga desa swasembada dapat dicapai
- b) Meningkatkan kemampuan aparatur desa dan lembaga desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sehingga secara berkelanjutan desa dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam visi misi kepala desa



26. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

Untuk mencapai sasaran urusan wajib ketahanan pangan, maka pada tahun 2011-2014 Dinas Pertanian, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan ketahanan pangan telah dianggarkan sebesar Rp. 30.506.367.225 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 23.420.767.255 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 7.085.600.000 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :

1. Sarana Penunjang Produksi Pertanian sebanyak 11.unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 460.500.000.,
2. Pembangunan Kontruksi Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 5 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.613.228.000.,
3. Monitoring dan Evaluasi keg. Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.417.917.100
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 760.400.000.,
5. Pengembangan Jaringan Irigasi sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 601.849.000.,
6. Pengembangan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kec. Tapa sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 136.862.000.,
7. Pengembangan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kec. Suwawa Tengah sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 136.862.000.,
8. Jalan Pertanian sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.377.404.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Sosialisasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kepada 25 orang dengan anggaran Rp. 6.390.000
2. Pengembangan fasilitas pengolahan pertanian/perkebunan sebanyak 3 unit dengan anggaran Rp. 5.000.000
3. Bimbingan teknis peningkatan mutu kopi kepada 15 orang dengan anggaran Rp. 22.000.000





4. Pertemuan TPD, LKD, kelompok afiliasi di 7 desa dengan anggaran Rp. 21.775.000
5. Pembinaan demapan kepada 30 orang dengan anggaran Rp. 4.600.000
6. Sosialisasi kawasan mandiri pangan tingkat kabupaten kepada 20 orang dengan anggaran Rp. 4.500.000
7. Forum dewan ketahanan pangan yang diikuti oleh 20 orang dengan anggaran Rp. 5.800.000
8. Spesialisasi APN dengan 20 peserta dengan anggaran Rp. 3.300.000
9. Sosialisasi pemanfaatan pekarangan KRPL desa baru kepada 35 orang dengan anggaran Rp. 29.975.000
10. Manajemen kelompok KRPL desa baru dengan anggaran Rp. 15.375.000
11. Pelatihan teknologi pengolahan pangan lokal kepada 35 peserta dengan anggaran 4.500.000
12. Pelaksanaan kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman dengan 100 orang peserta dan anggaran Rp. 22.725.000
13. Pengadaan bibit tanaman perkebunan untuk pengembangan lahan kering dengan luas 50 Ha dan anggaran Rp. 121.875.000
14. Pelaksanaan sosialisasi lahan kering kepada 50 peserta dengan anggaran Rp. 48.980.000
15. Pengembangan lumbung pangan desa dengan anggaran RP. 64.545.000
16. Pengadaan benih papaya California sebanyak 200 pohon dengan anggaran Rp. 10.000.000
17. Pengadaan pupuk organik komoditi hortikultura sebanyak 150 liter dengan anggaran Rp. 12.600.000
18. Pengadaan benih jagung hibrida sebanyak 3000 benih dengan anggaran Rp. 55.000.000
19. Pengadaan benih padi non hibrida sebanyak 90 pohon dengan anggaran Rp. 900.000

b. Capaian Kinerja/Outcome program yang dilaksanakan

Adapun capaian kinerja urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 4.49
Data Perkembangan Tanaman Pangan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014

NO	JENIS KOMODITAS	2011	2012	2013	2014
1	Padi				
	Luas Tanam (Ha)	3.965	5.700	3.056	3.006
	Luas Panen (Ha)	5.804	5.508	3.151	3.963
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,2	5,4	6,5	5,52
	Produksi (Ton)	30.180,2	29.743	20.481,5	21.867,83
2	Jagung				
	Luas Tanam (Ha)	2.196	5.408	762	3.343
	Luas Panen (Ha)	4.511	5.215	1328	3.241
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,2	4,1	4,2	4,2
	Produksi (Ton)	18.946,2	23.581	5.577,5	13.612,2
3	Kacang Tanah				
	Luas Tanam (Ha)	87	104	137	31
	Luas Panen (Ha)	113	110	22	63
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	1	1	1
	Produksi (Ton)	113	110	22	63
4	Kacang Hijau				
	Luas Tanam (Ha)	34	8	5	23,5
	Luas Panen (Ha)	20	10	3	22,9
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,95	0,85	2,55	1,0
	Produksi (Ton)	19	8,5	0,85	22,9
5	Kacang Kedelai				
	Luas Tanam (Ha)	22	32	31	15
	Luas Panen (Ha)	20	36	25	13
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,0	0,98	1,0	1,0
	Produksi (Ton)	22	35,28	25	15
6	Ubi Jalar				
	Luas Tanam (Ha)	39	38	10	15
	Luas Panen (Ha)	34	30	39	27
	Produktivitas (Ton/Ha)	7	6	6	6
	Produksi (Ton)	238	180	234	162
7	Ubi Kayu				
	Luas Tanam (Ha)	41	37	21	39
	Luas Panen (Ha)	60	31	7	54
	Produktivitas (Ton/Ha)	7	7	7	7
	Produksi (Ton)	420	217	49	378

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

Tabel 4.50
Data Perkembangan Tanaman Holtikultura
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014

NO	JENIS KOMODITAS	2011	2012	2013	2014
1	Bawang Merah				
	Luas Tanam (Ha)	-	-	-	-
	Luas Panen (Ha)	-	-	-	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	-	-	-	-





NO	JENIS KOMODITAS	2011	2012	2013	2014
2	Produksi (Ton)	-	-	-	-
	Bawang Daun				
	Luas Tanam (Ha)	4,9	3,7	3,0	2,9
	Luas Panen (Ha)	4,5	3,5	3,5	2,5
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Produksi (Ton)	9,0	7,0	7,0	5,0
	Petsai/Sawi				
	Luas Tanam (Ha)	3,1	2,5	3,7-	2,2
	Luas Panen (Ha)	2,0	2,0	3,0-	2,0
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,0	1,5,	1,5-	1,7
4	Produksi (Ton)	4	3,0	4,5-	3,4
	Cabe Rawit				
	Luas Tanam (Ha)	297	387	355	310
	Luas Panen (Ha)	295	378	391	1303
	Produktivitas (Ton/Ha)	26,5	27,9	63,28	48,77
5	Produksi (Ton)	7.817,5	10,546	24.742,5	63.547,3
	Tomat				
	Luas Tanam (Ha)	58	73	67	78
	Luas Panen (Ha)	56	71	66	75
	Produktivitas (Ton/Ha)	23,6	22,6	44,59	23,68
6	Produksi (Ton)	1.321,6	1.604,6	2.943	1.776
	Terong				
	Luas Tanam (Ha)	126	103	71	79
	Luas Panen (Ha)	125	101	69	78
	Produktivitas (Ton/Ha)	27,9	27,7	36,61	26,13
7	Produksi (Ton)	3.487,5	2.797,7	2526	2038
	Buncis				
	Luas Tanam (Ha)	-	-	-	-
	Luas Panen (Ha)	-	-	-	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	-	-	-	-
8	Produksi (Ton)	-	-	-	-
	Ketimun				
	Luas Tanam (Ha)	31	19	15	4
	Luas Panen (Ha)	29	16	12	3
	Produktivitas (Ton/Ha)	40,9	42,7	61,92	43,33
9	Produksi (Ton)	1.186,1	683,2	743	130
	Kangkung				
	Luas Tanam (Ha)	59	66	45	61
	Luas Panen (Ha)	56	64	42	59
	Produktivitas (Ton/Ha)	17,1	16,8	17	15,02
10	Produksi (Ton)	957,6	1.075,2	714	886
	Bayam				
	Luas Tanam (Ha)	55	64	50	52
	Luas Panen (Ha)	55	63	49	51
	Produktivitas (Ton/Ha)	10,5	10,1	10,80'	9,88
11	Produksi (Ton)	577,50	636,30	529	504
	Kacang Panjang				
	Luas Tanam (Ha)	31	44	37	48
	Luas Panen (Ha)	30	43	36	47



NO	JENIS KOMODITAS	2011	2012	2013	2014
	Produktivitas (Ton/Ha)	26,0	24,9	36,42	23,5
	Produksi (Ton)	780,0	1.070,70	1311	1088

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

Tabel 4.51
Data Perkembangan Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014

NO	JENIS KOMODITAS	2011	2012	2013	2014
1	Kelapa				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1.329,00	1.529,00	1.529,35	1.523,
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	4.473,00	4.573,00	5.037,24	5.025
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	720	920	9286	1.015,
	Produksi (Ton)	960,00	980,00	1.007,45	420,38
2	Kakao				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	927,00	957,00	987,008	999,00
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	1.300,00	1.307,	1.407,	15.761
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	400,00	412,00	417,	359
	Produksi (Ton)	142,00	152,00	232,	896
3	Kemiri				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1328	1457	1897	2198
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	1469	1591	1769	1976
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	145	152	163	175
	Produksi (Ton)	2145	2498	2579	2614
4	Jambu				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	25,00	27,00	29,00	29,00
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	167,00	170,00	173,57	443,00
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	446,00	456,00	470,80	175,00
	Produksi (Ton)	14,00	16,00	17,36	154,00
5	Kapuk				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	875,00	900,00	960,18	-
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	98,00	108,00	116,00	116,00
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	0,17	0,20	0,30	6,50
	Produksi (Ton)	38,20	40,20	46,40	23,20
6	Pala				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	175,	178,	181,	181.
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	390	450	672	672
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	1380	1480	1780	1780
	Produksi (Ton)	1,00	1,00	1,25	1,25
7	Cengkeh				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1.600,	1.700,	1.706,	724,00
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	140	142,	146, 2	1.706,
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	268,00	271,00	273,00	146,
	Produksi (Ton)	253,00	260,00	268	264,47
8	Kopi				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	7827	8027	8327	13711
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	34047	35047	37547	46297
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	1602	16512	16812	16679





NO	JENIS KOMODITAS	2011	2012	2013	2014
9	Produksi (Ton)	33,55	35,55	37,55	404,64
	Tebu				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	-	-	-	-
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	-	-	-	-
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	-	-
10	Produksi (Ton)	-	-	-	-
	Aren				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	158,00	160,00	164,00	164,00
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	310,00	315,00	326,00	321,00
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	8,20	9,20	11,20	115,00
11	Produksi (Ton)	6,73	7,73	8,73	583,86
	Vanili				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	-	-	-	-
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	-	-	-	-
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	-	-
12	Produksi (Ton)	-	-	-	-
	Kayu Manis				
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	-	-	-	-
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	-	-	-	-
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	-	-
	Produksi (Ton)	-	-	-	-

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Bone Bolango

Tabel 4.52

Data Perkembangan Potensi dan Fungsi Daerah Irigasi
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014

No.	Daerah Irigasi	Potensi dan Fungsi Per-Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Daerah Irigasi Alale					
	a. Potensi (Ha)	674	674	674	674	674
	b. Fungsi/Teknis (Ha)	674	674	674	674	674
2.	Daerah Irigasi Lomaya					
	a. Potensi (Ha)	126,68	126,68	126,68	126,68	126,68
	b. Fungsi/Teknis (Ha)	126,68	126,68	126,68	126,68	126,68
3.	Daerah Irigasi Pilohayanga					
	a. Potensi (Ha)	-	-	-	-	-
	b. Fungsi/Teknis (Ha)	-	-	-	-	-

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Bone Bolango

Tabel 4.53

Data Perkembangan Jumlah Konsumsi Per-Komoditas
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2014

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Konsumsi Per-Tahun (Kg)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Beras	391.653	409.630	409.630	409.630	437.356
2.	Jagung	10.099	11.155	11.155	11.155	27.224
3.	Kacang-kacangan	3.98	3,8	3,8	3,8	10,5





No.	Jenis Komoditas	Jumlah Konsumsi Per-Tahun (Kg)				
		2010	2011	2012	2013	2014
4.	Umbi-Umbian	45,18	47,16	47,16	47,16	90

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Bone Bolango

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang ketahanan pangan adalah

- Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan, konsumsi pangan beragam bergizi seimbang, aman, dan bermutu.
- Belum optimalnya sosialisasi bagi petani khususnya di daerah-daerah sekitar aliran sungai berpotensi terjadinya kerawanan pangan setiap tahunnya.
- Belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terkait seperti dinas Pertanian, perkebunan dengan BP4K serta *stakeholder* Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- Melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan apresiasi, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan magang ketahanan pangan
- Mendorong dan memfasilitasi kecukupan, ketersediaan pangan tingkat daerah.
- Meningkatkan antisipasi dini terjadinya kerawanan pangan melalui pelatihan-pelatihan, mekanisme aliran data rawan pangan dan memberikan bantuan pangan atau *work for food*.
- Melaksanakan secara intersif koordinasi lintas pelaku dan sektoral yang terkait dengan ketahanan pangan terhadap penyelesaian masalah-masalah ketahanan pangan yang terjadi di masyarakat.
- Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan *stake holder* dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- Merumuskan konsep lumbung pangan masyarakat pada tingkat kecamatan dan melakukan pelatihan-pelatihan, dan memberikan bantuan pangan atau *work for food*.
- Mengintensifkan koordinasi lintas pelaku dan sektor yang terkait dengan ketahanan pangan terhadap penyelesaian masalah-masalah ketahanan pangan yang terjadi di masyarakat



B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pemerintahan terdiri dari beberapa bidang pembangunan meliputi:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kehutanan
3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Bidang Pariwisata
5. Bidang Kelautan dan Perikanan
6. Bidang Perdagangan
7. Bidang Perindustrian
8. Bidang Ketransmigrasian

Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib telah dianggarkan sebesar Rp. 148.483.164.201 dimana tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan sebesar Rp. 110.449.552.544 dan direncanakan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 38.033.611.657 adapun pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja urusan wajib pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut

1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Dalam pembangunan urusan pertanian telah dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis, serta persoalan yang mendasar antara lain: meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; terjadinya perubahan iklim global; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan; serta terbatasnya akses petani terhadap permodalan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian, hal tersebut dapat diukur dari pangsa sektor pertanian yang besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penciptaan ketahanan pangan dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Selain itu sektor pertanian juga mempunyai peran sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri pengolahan hasil pertanian.

Pembangunan pertanian kedepan juga akan menghadapi tantangan seperti: bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dan keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga





rendah; serta membudayakan penggunaan pupuk organik secara berimbang.

Selain itu pembangunan peternakan dan kesehatan hewan juga merupakan bagian yang integral dengan pembangunan pertanian. Peran strategis yang dimiliki dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan ternak sebagai sumber protein hewani, disamping itu juga mempunyai peran dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Urusan Pilihan Pertanian pada tahun 2011-2015 ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan urusan pilihan pertanian telah dianggarkan sebesar Rp. 23.135.536.928 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 13.920.086.928 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 9.215.450.000 dengan program dan kegiatan sebagai berikut

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Kegiatan Forum Penyuluh dan Petani Tkt. Kabupaten sebanyak 120 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.550.000.,
2. Pelaksanaan Kegiatan Komisi Penyuluhan sebanyak sebanyak 15 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.000.000.,
3. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor sebanyak 165 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.950.000.,
4. Kegiatan Forum Penyuluh Tingkat Kabupaten sebanyak 45 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.855.000.,
5. Rapat Komisi Penyuluhan sebanyak sebanyak 80 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.092.500.,
6. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.850.500.,
7. Dokumen Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani sebanyak 4 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 53.695.000.,
8. Penyusunan laporan kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis sebanyak 2 Dokumen dengan total anggaran sejumlah Rp. 459.461.000.,





9. Kegiatan Mimbar Sarasehan Tkt. Kabupaten sebanyak 85 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.005.000
10. Kegiatan Bimtek Bagi Pengurus Poktan sebanyak 60 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.650.000
11. Kegiatan Mimbar Sarasehan / Rembuk KTNA Tkt. Kabupaten sebanyak 45 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.855.000.,
12. Kegiatan Bimtek Pengurus POKTAN sebanyak 80 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.430.000.,
13. Pelatihan di BP3K sebanyak 21 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.600.000.,
14. Penyusunan RDKK sebanyak 25 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.125.000.,
15. Pembinaan Kelompok Tani sebanyak 33 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.535.000.,
16. Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani sebanyak 31 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.850.000.,
17. Sosialisasi dan Pembentukan POSLUHDES/KEL Rayon I, II, III, dan IV sebanyak 16 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.020.000.,
18. Kunjungan Kerja Komisi Penyuluhan Ke Wilayah Kecamatan sebanyak 15 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.700.000.,
19. Dalam Rangka Konsultasi Program sebanyak 10 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.191.800.,
20. Dalam Rangka PENAS sebanyak 40 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000.,
21. Kegiatan Mimbar Sarasehan dan Rembuk KTNA Tkt. Kecamatan sebanyak 425 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84.990.000.,
22. Kegiatan Mimbar Sarasehan dan Rembuk KTNA Tkt. Kabupaten sebanyak 755 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.537.500.,
23. Seminar Agribisnis Pertanian sebanyak 100 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.850.000.,
24. Gelar Teknologi dan Temu Kemitraan sebanyak 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.949.500.,
25. Kegiatan Pembinaan Poktan dan Gapoktan sebanyak 10 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.130.000.,



26. Kegiatan Konsultasi Program sebanyak 4 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.369.200.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Forum Penyuluh dan Petani Tingkat Kabupaten sebanyak 178 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.205.000.,
2. Komisi Penyuluhan sebanyak 28 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.755.000.,
3. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis sebanyak 2 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.600.000.,
4. Pembentukan POSLUHDES/KEL sebanyak 240 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.800.000.,
5. Monev Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.850.000.,

2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :

1. Kegiatan pameran/eksibisi sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000.,
2. Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.250.000.,
3. Kegiatan Promosi Hasil Pertanian/perkebunan sebanyak 200 produk dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.940.000.,

3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan :

1. Pengadaan bahan baku demplot perikanan sebanyak 3 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.565.000.,
2. Pengadaan bahan baku demplot peternakan sebanyak 8 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.305.600.,
3. Pengadaan bahan baku demplot pertanian sebanyak 4 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 153.971.550.,
4. Pengadaan Bibit Tanam sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.483.200.,
5. Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Kandang sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.149.500.,
6. Demplot Ikan Kerapu sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.080.000.,





7. Demplot Peternakan Itik sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.981.350.,
8. Demplot Jagung sebanyak 2 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp.63.909.100.,
9. Demplot Tomat sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.595.750.,
10. Demplot Cabe sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.351.600.,
11. Demplot Lebah Madu sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.315.000.,
12. Pengadaan alat penetas sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
13. Pengadaan alat pemanas sebanyak 1 unit
14. Pengadaan alat-alat ukur sebanyak 2 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp
15. Pengadaan GPS sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.,
16. Pengadaan Traktor sebanyak 6 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 89.875.000.,
17. Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian sebanyak 4 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp,24.970.000.,
18. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput sebanyak 3 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.500.000.,
19. Pengadaan Mesin Pompa Air sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.000.000.,
20. Pengadaan Alat Mesin Pertanian sebanyak 6 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 64.500.000.,
21. Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 52.367.800.,
22. Dokumen Perencanaan teknologi Pertanian/Perkebunan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.965.000.,
23. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 52.281.850.,
24. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 52.281.850.,
25. Monitoring Penyuluhan Kec. Bulawa sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.615.000.,





26. Monitoring Penyuluhan Kec. Boneraya sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.800.000.,
27. Monitoring Penyuluhan Kec. Bone sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.820.000.,
28. Monitoring Penyuluhan Kec. Bulango Ulu sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.195.000.,
29. Monitoring Penyuluhan Kec. Suwawa, Suwawa Tengah, Kabila, Tilongkabila sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.635.000.,
30. Monitoring Penyuluhan Kec. Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, Suwawa Selatan sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.010.000.,
31. Monitoring Penyuluhan Kec. Bulango Utara, Botupingge, Suwawa Timur, Kabila Bone sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.390.000.,
32. Monitoring Penyuluhan Kec. Pinogu sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.,
33. Monev Denfarm Padi Kec. Suwawa Tengah, Suwawa, Kabila, Tilongkabila sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.290.000.,
34. Monev Denfarm Padi Kec. Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, Suwawa Selatan sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.750.000.,
35. Monev Denfarm Padi Kec. Bulango Utara, Botupingge, Suwawa Timur, Kabila Bone sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.055.000.,
36. Monev Denfarm Holtikultura Kec. Suwawa Tengah, Suwawa, Kabila, Tilongkabila sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.200.000.,
37. Monev Denfarm Holtikultura Kec. Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, Suwawa Selatan sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.330.000.,
38. Monev Denfarm Holtikultura Kec. Bulango Utara, Botupingge, Suwawa Timur, Kabila Bone sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.110.000.,
39. Penyusunan Porgama Tkt. Kab sebanyak 150 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.175.000.,





40. Penyusunan Program Tkt. Rayon sebanyak 540..... dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.580.000.,
41. Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Demfarm Padi sebanyak 46.dokumen.. dengan jumlah anggaran sebesar Rp.12.455.000.,
42. Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Demfarm Hortikultura sebanyak 56..... dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.160.000.,
43. Dalam Rangka Konsultasi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebanyak 16..... dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 52.216.500.,
44. Kegiatan Penyuluhan sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.,
45. Konsultasi ke Provinsi sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.050.000.,
46. Konsultasi Program ke Pusat sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp 33.738.600.,
47. Konsultasi ke Luar Daerah Dalam Sulawesi sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.600.000.,
48. Apresiasi SIMLUHTAN sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.775.000.,
49. Cyber Extention sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.775.000.,
50. Dokumen Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebanyak 4 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.175.000.,

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Identifikasi lokasi demplot pertanian dan perikanan di 17 kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.935.000.,
2. Kajian Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.000.000.,
3. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.050.000.,
4. Monitoring dan Evaluasi capaian Program Penerapan Tekhnologi pertanian/perkebunan sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000.,

4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
dengan kegiatan :





1. Kegiatan Program Tkt. Kabupaten sebanyak 169 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.476.500.,
2. Kegiatan Penyusunan Program Tkt. Rayon sebanyak 508 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.53.923.000.,
3. Kegiatan Pelatihan Tenaga Penyuluh sebanyak 160 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.110.000.,
4. Kegiatan Pertemuan Pembinaan Fungsional sebanyak 80 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.200.000.,
5. Kegiatan Lomba Penyuluh sebanyak 60 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.150.000.,
6. Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan sebanyak 330 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.375.000.,
7. Konsultasi Ke Provinsi sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.740.000.,
8. Konsultasi ke Kabupaten Gorut, Boalemo, Pohuwato sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.225.000.,
9. Konsultasi Program ke Pusat sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.615.200.,
10. Konsultasi Program ke Luar Daerah dalam Sulawesi sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.250.000.,
11. Kegiatan Supervisi Penyuluhan Kecamatan sebanyak 9 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.840.000.,
12. Kegiatan Pelatihan Tenaga Penyuluh sebanyak 60 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.595.000.,
13. Kegiatan Temu Teknis Penyuluh sebanyak 70 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.595.000.,
14. Kegiatan Pertemuan Pembinaan Fungsional sebanyak 37 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.412.500.,
15. Dalam Rangka Konsultasi Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan sebanyak 14 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.264.000.,
16. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan di 4 Rayon dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.750.000.,
17. Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh sebanyak 44 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.215.000.,
18. Kegiatan Supervisi Penyuluhan Kecamatan sebanyak 9 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.840.000.,





19. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.500.000.,
20. Penyusunan Dokumen BP3K sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 381.192.000.,
21. Dalam Rangka supervisi kegiatan penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha sebanyak 4 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.255.000.,
22. Penilaian Kelembagaan Penyuluh, Penyuluh dan Petani Teladan dan Berprestasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.150.000.,
23. Kegiatan Identifikasi Pelaku Usaha sebanyak 8 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.305.000.,
24. Dokumen Penyediaan Operasional BP3K sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.263.000.,
25. Dokumen Penyusunan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan sebanyak 3 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 391.132.500.,

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluh sebanyak 30 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.400.000.,
2. Pembinaan Penyuluh Di 18 Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.840.000.,
3. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.850.000.,
4. Operasional BP3K Bone sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.200.000.,
5. Operasional BP3K Bone Raya sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
6. Operasional BP3K Bulawa sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
7. Operasional BP3K Bone Pantai sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
8. Operasional BP3K Kabila Bone sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
9. Operasional BP3K Botupingge sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
10. Operasional BP3K Tilongkabila sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.600.000.,





11. Operasional BP3K Kabila sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
 12. Operasional BP3K Kabila sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
 13. Operasional BP3K Suwawa sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
 14. Operasional BP3K Suwawa Tengah sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
 15. Operasional BP3K Suwawa Selatan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
 16. Operasional BP3K Suwawa Timur sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
 17. Operasional BP3K Tapa sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.600.000.,
 18. Operasional BP3K Bulango Selatan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
 19. Operasional BP3K Bulango Timur sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
 20. Operasional BP3K Bulango Utara sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.,
 21. Operasional BP3K Bulango Ulu sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.400.000.,
 22. Operasional BP3K Pinogu sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.900.000.,
- 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan kegiatan :**
1. Pengadaan Obat-obatan ternak sebanyak 4588 dosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 146.266.000.,
 2. Desinfektan sebanyak 50 liter dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.500.000.,
- Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :**
1. Pengadaan obat – obatan ternak sebanyak 1000 dosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000.,
 2. Desinfektan sebanyak 10 liter dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.,
- 6) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan :**
1. Belanja Peralatan Inseminasi Buatan yakni :



- Pengadaan container 3 XT sebanyak 8 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 97.200.000.,
 - Plastik sheet sebanyak 200 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 440.000.,
 - Plastik Glove 200 Lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 440.000.,
 - Gunting Straw sebanyak 8 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 780.000.,
 - Penjepit Straw sebanyak 13 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.625.000.,
2. Belanja Bahan Inseminasi Buatan yakni :
- N2 Cair sebanyak 900 Liter dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000.,
 - Tisu IB sebanyak 7 lusin dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 370.000.,
 - Narim Fisiologi sebanyak 2 botol dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.,
 - Prostaglandin sebanyak 24 botol dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.600.000.,
 - Semen sexing bali sebanyak 60 dosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.700.000.,
 - Eartag sebanyak 1000 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000.,
3. Belanja Perlengkapan Inseminasi Buatan yakni :
- Tas IB sebanyak 5 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.,
 - Sepatu Boot sebanyak 5 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 375.000.,
 - Jas Hujan sebanyak 5 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.,
 - Senter sebanyak 5 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.,
 - Cattle Pack sebanyak 5 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.350.000.,
4. Belanja Perlengkapan Transfer Embrio yakni :
- Straw Transfer Embrio sebanyak 50 dosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.500.000.,



- Plastik Sheet TE sebanyak 100 batang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.000.000.,
 - Plastik Giove TE sebanyak 200 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.,
 - Cetak SPGT sebanyak 12.130 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.995.000.,
 - Pembuatan Kandang Ternak sebanyak 7 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 320.000.000.,
 - Pengadaan Ternak Sapi Bali sebanyak 50 ekor dengan jumlah anggaran sebanyak Rp.250.000.000.,
 - Bibit Rumput HMT sebanyak 40000 stek dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000.,
 - Belanja Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional IB sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000.,
 - Pengadaan Chooper sebanyak 5 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.500.000.,
 - Rehabilitasi Poskeswan sebanyak 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp.150.000.000.,
 - Pembangunan Pagar Poskeswan 1 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000.,
5. Pengadaan Ternak Sapi Bibit Bali sebanyak 220 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.226.250.000.,
 6. Pengadaan bibit kambing etawa sebanyak 50 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 127.500.000.,
 7. Pengadaan bibit ayam super sebanyak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000.,
 8. Pengadaan Bibit itik sebanyak 3000 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.250.000.,
 9. Restrukturisasi Perunggasan sebanyak 7000 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 175.000.000.,
 10. Pengadaan bibit ayam buras sebanyak 2000 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.44.000.000.,

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain :

1. Belanja Bahan Inseminasi Buatan yakni :
 - N2 cair sebanyak 200 liter dengan anggaran Rp. 10.000.000



- Eartag sebanyak 1144 buah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.740.000.,
2. Belanja Perlengkapan Transfer Embrio, yakni :
- Cetak SPGT sebanyak 2.500 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.750.000.,
 - Pembuatan Kandang Ternak sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.000.000.,
 - Belanjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional IB sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.050.000.,
 - Pengadaan Chooper sebanyak 2 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.000.000.,
 - Pakan Ternak sebanyak 20.000 Kg dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000.,
 - Belanjaan Pengadaan Kendaraan Roda Tiga sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.050.000.,
 - Pembangunan Gudang Pakan sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 32.500.000.,
 - Pembangunan Balai Perbibitan sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 400.000.000.,
 - Pembangunan Pagar balai Perbibitan sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000.,
 - Pembuatan Kebun hijauan pakan ternak sebanyak Ha dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.,
 - Pengadaan Ternak Sapi Bibit Bali sebanyak 430 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.795.000.000.,
 - Pengadaan Bibit kambing etawa sebanyak 75 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.187.500.000.,
 - Pengadaan Bibit ayam buras sebanyak 11.000 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 275.000.000.,
- 7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,** dengan kegiatan :
1. Pembangunan Kios Daging sebanyak 2 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 139.000.000.,
 2. Freezer sebanyak 2 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.,
 3. Etalase daging sebanyak 2 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000.,



4. Timbangan duduk sebanyak 2 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.,

b. Capaian Kinerja Outcome

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pertanian sebagai berikut:

- 1). Semakin tumbuh semangat kerja petani untuk bertahan karena termotivasi dengan berbagai program yang diberikan, antara lain: bantuan langsung benih unggul, subsidi harga pupuk, bantuan pupuk organik dan non organik serta bantuan alat mesin pertanian, serta pembangunan jaringan irigasi.;
- 2). Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah dan terciptanya jejaring pemasaran hasil;
- 3). Meningkatnya lembaga ekonomi/ agribisnis di perdesaan;
- 4). Meningkatnya produksi perkebunan
- 5). Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya pengolahan lahan dan air;
- 6). Semakin berkembangnya populasi sapi potong pada tahun 2013 sebesar 25.941 ekor dan pada tahun 2014 mencapai 26.244 ekor. Peningkatan populasi sapi potong tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB),
- 7). Meningkatnya populasi ayam pedaging pada tahun 2014 mencapai 589.035 ekor bila dibandingkan dengan populasi tahun 2013 yang sebesar 143.178 ekor;
- 8). Meningkatnya populasi ayam kampung mencapai 168.026 ekor bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya berjumlah 126.203 ekor;
- 9) Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan serta kesejahteraan para penyuluh.

Perkembangan data capaian kinerja secara spesifik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 4.54
Data Perkembangan Jumlah Alat-Alat Pertanian
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2014*

No.	Jenis Alat	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1.	Traktor Roda Dua			20	30
2.	Traktor Mini				
3.	Traktor Sedang			8	





No.	Jenis Alat	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
4.	Traktor Besar	1	1	1	
5.	Pengering Padi		1		
6.	Pembersih Gabah				3
7.	Penyosoh Beras				
8.	Penggilingan Padi			5	

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Bone Bolango

Prestasi yang diraih dibidang pertanian sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 antara lain :

1. Penghargaan Gapoktan Berprestasi (Gapoktan Kecamatan Bulango Utara) Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2013
2. Penyuluh PNS Teladan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013
3. Juara I lomba Program KMDM (Kecil Menanam Dewasa Memanen) Tingkat Provinsi Tahun 2013

a. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait menyangkut perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pemukiman, penyediaan benih unggul bersertifikat, antiipias perubahan iklim yang ekstrim serta penyediaan modal usaha tani
- b) Belum optimalnya pembinaan bagi kelembagaan petani dan sumber daya manusia petani dalam mengelola lahan dan hasil hasil pertanian

Solusi

- a) Membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW Kabupaten Bone Bolango
- b) Membangun dan menyediakan sarana dan sarana perbenihan dan pemberdayaan penangkar benih
- c) Mengadakan musyawarah hambur tanam dengan mengundang para tokoh masyarakat dan tokoh tani
- d) Mengusulkan agar mendapat bantuan sarana dan parasarana pengolahan tanah kepada kementerian terkait
- e) Mengusulkan agar mendapat bantuan alat alat pasca panen kepada kementerian pertanian RI;
- f) Meningkatkan pembinaan kepada kelompok tani;
- g) Memediasi para kelompok tani untuk mendapatkan kemudahan kredit kepada perbankan untuk mendapatkan bantuan modal usaha



2. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

Sumberdaya hutan memiliki nilai strategis yang diperlukan bagi proses pembangunan, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya supaya benar dan bijak sehingga fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat dapat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya.

Bagi masyarakat pengelola dan pemanfaat sumber daya hutan terus dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumber daya hutan. Masih luasnya lahan kritis di lahan-lahan milik masyarakat yang berdampak pada penurunan daya dukung daerah aliran sungai, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air yang berhubungan dengan masalah bencana alam, maka upaya rehabilitasi lahan konservasi tanah perlu terus ditingkatkan. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan kehutanan telah dianggarkan sebesar Rp.14,904,346,931 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 12,368,186,791 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 2,536,160,140. Urusan Pilihan Kehutanan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Pertambangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

3) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pendataan hasil industri yang di olah sebanyak dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.929.000.
2. Kegiatan Penelitian Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.445.000.
3. Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.200.000.
4. Pengendalian peredaran produksi hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.848.000.
5. operasi rutin ilegal logging dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.819.500.
6. Operasional Penerbitan Izin Usaha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.822.200.





4) Program rehabilitasi hutan dan lahan, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Gaharu sejumlah 10 Hektar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 549.067.000.
2. Kegiatan Pengadaan Tanaman Hutan sejumlah 300 Ha dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.215.313.382.
3. Pemeliharaan Hutan Rakyat sebanyak 300 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 261.079.200.
4. Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 unit dengan anggaran sebesar Rp. 390.000.000.
5. Pengadaan Pick Up sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 185.700.000.
6. Pengadaan Sepeda Motor sebanyak 20 unit dengan anggaran sebesar Rp. 224.720.117.
7. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur sebanyak 7 unit dengan anggaran sebesar Rp. 56.694.000.
8. Pengadaan Konstruksi Bendungan sebanyak 10 unit dengan anggaran sebesar Rp.1.409.700.000.
9. Pengadaan Pos Jaga sebanyak 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000.

5) Program perencanaan dan pengembangan Hutan, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pembuatan Hutan Adat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.4000.000.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang kehutanan adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan kepada kelembagaan pengelola hutan rakyat tentang pengelolaan hasil-hasil hutan serta upaya menjaga kelestarian hutan
- b) Belum optimalnya koordinasi pemerintah kecamatan terutama dalam hal distribusi Bibit tanaman serta laporan penanamannya untuk memudahkan dilakukan evaluasi perkembangan hasil hutan dan peredarannya;
- c) Masih terbatasnya jumlah bantuan untuk mendukung pembangunan wanafarma, sehingga perlu diupayakan untuk penambahan jumlah dan jenis bantuan seperti untuk pengadaan pupuk, obat dan tenaga kerja.





2) Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Melakukan pembinaan yang intensif kepada lembaga pengelola hutan rakyat tentang pengelolaan hasil hutan serta upaya untuk kelestarian hutan tetap terjaga keseimbangannya
- b) Meningkatkan jumlah bantuan dibidang kehutanan terutama untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan untuk mencegah terjadinya bencana yang disebabkan karena tidak berfungsinya hutan sebagai pengendali banjir

3. URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan pilihan energi dan sumber daya mineral pada tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. Untuk merealisasikan target-target dibidang energi dan sumber daya mineral maka telah di anggarkan anggaran sebesar Rp. 33.336.489.835 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah di realisasikan anggaran sebesar Rp. 24.568.988.918 dan rencana realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.767.500.917. adapun rincian program dan kegiatan urusan pilihan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

6) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dengan kegiatan :

1. Belanja Operasional Penerbitan Izin Usaha Galian C selama 4 tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.211.386.900.
2. Sosialisasi Regulasi Penambangan Galian C sebanyak 200 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.130.000.

7) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Alat Penunjang Pengolahan Pertambangan Rakyat sebanyak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 538.779.000.
2. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.980.000.
3. Pembangunan Sarana & Prasarana Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Pertambangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 93.500.000.
4. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 85.715.000.





8) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan,
dengan kegiatan pengadaan jaringan listrik, lampu jalan dengan rincian
sebagai berikut:

*Tabel 4.55
Pengadaan jaringan listrik dan lampu jalan
Tahun 2011-2015*

NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI				TARGET 2015	JUMLAH
			2011	2012	2013	2014		
1	Pengadaan Instalasi Lampu Jalan	Unit	10	114	139	-	-	263
2	Pengadaan Instalasi Listrik	RTM		400	1.987		460	2.387

Sumber : Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Sumber Daya energi Kab. Bone Bolango

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kelistrikan dibutuhkan sumber daya listrik yang cukup memadai. Dalam implementasi program terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang diadakan pada tahun 2011-2015 sebagaimana dalam rincian kegiatan sebagai berikut:

*Tabel 4.56
Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik
Tahun 2011-2014 dan Target tahun 2015*

NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI				TARGET 2015	JUMLAH
			2011	2012	2013	2014		
1	Pengadaan Reaktor Biogas	Unit	-	-	43	39	48	130
2	Pengadaan PLTMH	Unit	-		1		1	2
3	Pengadaan PLTS terpusat	Unit		-	1	1	1	3
5	Pengadaan PLTS tersebar	Unit			99	67	-	166

Sumber : Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Sumber Daya energi Kab. Bone Bolango

Diharapkan dengan adanya pembangkit Tenaga Listrik dapat menjangkau kebutuhan penerangan khususnya di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh aliran listrik PLN

b. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

- a) Masih minimnya pengetahuan penambang akan aturan dan teknik penambangan yang benar, sehingga secara kontinyu perlu dilakukan





- pengawasan dalam melakukan penambangan;
- b) Belum optimalnya koordinasi dan pengawasan dalam hal pengurusan izin bagi penambang
 - c) Belum optimalnya pembinaan bagi penambang tentang aturan dan teknik penambangan yang benar serta proses pengurusan izin
 - d) Angka Ratio Elektrifikasi Kabupaten Bone Bolango baru mencapai 60%, tercermin dari banyaknya desa dan dusun yang belum teraliri listrik, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan jaringan listrik perdesaan dalam rangka peningkatan Ratio Elektrifikasi;
 - e) Pemahaman masyarakat tentang konsepsi Desa Mandiri Energi (DME) belum memadai, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kepada masyarakat desa untuk menuju DME;

2). Solusi

- a) Melakukan sosialisasi mengenai perizinan dalam bidang penambangan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b) Memberikan koordinasi dalam memberikan kemudahan bagi pengelola hutan dalam mengelola hasil hutan
- c) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran hasil hutan untuk menjaga keseimbangan alam

4. URUSAN PILIHAN PARIWISATA

Pariwisata memiliki peran yang penting dan memiliki dampak positif yang cukup tinggi terhadap pendapatan daerah, maka potensi dasar pariwisata yang dimiliki cenderung untuk terus ditingkatkan sehingga mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Dengan keindahan alam yang ada di Kabupaten Bone Bolango menjadi asset wisata potensial yang dapat digali dan dikembangkan. Seiring dengan perkembangan jaman, ternyata arus globalisasi telah merombak tatanan politik pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu adanya terobosan-terobosan di bidang kepariwisataan antara lain: pemberdayaan sumber daya manusia, sistem informasi, transportasi, pengembangan akomodasi pariwisata, infrastruktur penunjang kepariwisataan serta pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Kabupaten Bone Bolango memiliki sejumlah asset wisata yang lengkap dan beragam jenis wisatanya, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Untuk itu pada tahun 2011-2015 telah di anggarkan alokasi dana sebesar Rp. 7.029.834.760 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah di realisasikan anggaran sebesar Rp. 6.133.894.760, adapun





rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata pada urusan pilihan pariwisata ini adalah sebagai berikut:

1) Program Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk mengembangkan program destinasi pariwisata sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dilakukan kegiatan kegiatan antara lain :

1. Penyusunan dokumen rencana induk pariwisata sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 237.500.000
2. Penyusunan dokumen pengembangan obyek wisata sebanyak 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 210.111.500,-
3. Pengembangan obyek wisata dikabupaten Bone Bolango ang tersebar di beberapa lokasi obyek pariwisata yang ada di kabupaten Bone Bolango sebanyak 8 lokasi selama 4 Tahun dengan nggaran sebesar Rp. 2.204.879.000
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berada di lokasi obyek wisata lombongo, olele dan botutonuo sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.141.874.500

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Untuk meningkatkan nilai eksistensi pariwisata daerah telah dilakukan upaya –upaya promosi baik ditingkat daerah, nasional sampai ditingkat international melalui kegiatan antara lain:

- a) Pelaksanaan kegiatan pemasaran ditingkat nasional dan international meliputi kegiatan Keg. Ekspo Bone Bolango, Visit Olele, Deep Indonesia, Gebyar Pariwisata Nasional, Keg. Kemilau Sulawesi, Kegiatan. Pameran Makassar Tourism & travel Fair 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.423.013.500
- b) Disamping kegiatan promosi luar daerah dilakukan promosi didalam daerah yang diakukan sejak tahun 2011 sampai 2014 sebanyak 11 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 178.540.000
- c) Keberhasilan promosi pariwisata tak lepas dari key person yang mampu menjelaskan eksistensi pariwisata daerah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pelatihan bagi guide sebanyak 20 orang dengan anggaran sebesar Rp. 134.142.500

3) Program Pengembangan Kemitraan

Dalam mendukung kegiatan kepariwisataan yang erat kaitannya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang dibarengi dengan upaya





pelibatan masyarakat dalam menunjang kegiatan di lokasi pariwisata maka dilakukan kegiatan sosialisasi berbagai perautran pemerintah tentang pengelolaan pariwisata dengan jumlah peserta sebanyak 330 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 155.592.500

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Keberhasilan program kepariwisataan dapat dilihat dari banyaknya kunjungan ke obyek-obyek wisata yang ada di daerah. Adapun kunjungan wisata dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

*Tabel 4.57
Jumlah Kunjungan wisata tahun 2011-2014*

Uraian	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Kunjungan Wisata	5560	13230	24330	32880	76.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kab. Bone Bolango

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Kompetensi sumber daya manusia belum memadai dalam bidang kepariwisataan, sehingga perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan di bidang pariwisata;
- 2). Masih belum maksimalnya promosi kepariwisataan, sehingga perlu diadakan event-event untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, disamping perlu ditingkatkan pula promosi melalui media elektronik dan pemasangan baliho di wilayah dan di luar wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- 3). Masyarakat sekitar obyek wisata masih belum berperan secara optimal dalam ikut serta dalam pengembangan obyek wisata, sehingga perlu meningkatkan peran masyarakat melalui Kelompok Penggerak Pariwisata;
- 4). Masih belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana pendukung wisata, maka perlu ditingkatkan melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata;
- 5). Masih kurangnya jumlah tenaga terampil dalam pengelolaan daya tarik wisata, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang pariwisata;
- 6). Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang kepariwisataan yang bersertifikasi, maka perlu dilakukan sertifikasi kompetensi bidang





pariwisata;

- 7). Masih adanya usaha akomodasi dan rumah makan yang belum mempunyai dokumen lingkungan, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan lingkungan di bidang usaha akomodasi dan rumah makan;
- 8). Masih adanya pelaku usaha pondok wisata/Home Stay yang belum profesional, maka perlu dilakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan dan keprofesionalan dibidang usaha pondok wisata/Home Stay;

5. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Bone Bolango memiliki sumberdaya perikanan yang cukup potensial, baik perikanan laut maupun perikanan air tawar. Potensi perikanan laut adalah pantai yang berada di Teluk Tomini sepanjang 61 km (dari desa Huangobotu Kec. Kabila Bone hingga desa Taludaa Kec. Bone) dengan kewenangan daerah atas laut seluas kurang lebih 630 km persegi. Ekosistem laut terdiri dari perairan laut, kawasan pesisir, dan terumbu karang. Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki pulau-pulau kecil. Kegiatan perikanan laut di Kabupaten Bone Bolango masih sebatas perikanan tangkap, belum ada kegiatan budidaya laut.

Komoditi utama hasil tangkapan ikan di perairan laut Teluk Tomini adalah ikan layang, selar, tembang, cakalang, ekor kuning, kuwe, dan tongkol. Produksi ikan Bone Bolango sebagian besar berasal dari Teluk Tomini, yang diperkirakan memiliki potensi ikan sebesar 340.000 ton/tahun. Potensi ikan pelagis besar, seperti tuna dan cakalang, dari tahun ke tahun semakin menurun. Peluang pengembangan perikanan tangkap di Teluk Tomini yang masih cukup besar, yaitu penangkapan ikan pelagis kecil, seperti layang, tongkol, dan selar, dan ikan demersal, seperti kuwe. Komoditi andalan perikanan tangkap Kabupaten Bone Bolango layang segar, layang beku, selar segar, selar beku, dan cakalang.

Kawasan perikanan tangkap berada di pesisir lima kecamatan yang berada di Teluk Tomini. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kabila Bone, Bonepantai, Bulawa, Bone Raya, dan Bone yang meliputi 47 desa perikanan tangkap.

Nelayan di Kabupaten Bone Bolango berjumlah 2.429 orang, terdiri dari nelayan utama 1.941 orang, buruh nelayan (Anak Buah Kapal) 476 orang, dan nelayan pemilik kapal 12 orang.





Nelayan di Kabupaten Bone Bolango memiliki 1.840 perahu dan 28 kapal motor (KM). Dari 1.840 perahu, 403 perahu adalah perahu tanpa motor (PTM), 1.383 perahu motor temple (PMT), dan 29 kapal motor (KM).

Nelayan di Kabupaten Bone Bolango sebagian besar menggunakan pancing untuk menangkap ikan dibanding alat tangkap lainnya. Terdapat 12.714 unit pancing, yang terdiri dari pancing ulur 9.664 unit, pancing tegak 837 unit, dan pancing cumi 2.213 unit. Alat tangkap lainnya adalah jaring 378 unit. Alat bantu penangkapan ikan yang digunakan nelayan terdiri dari generator set 263 unit, lampu blitz 705 unit, seser 167 unit, dan rumpon 291 unit.

Potensi perikanan air tawar berada di 17 kawasan daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

- DAS Bulango di Kecamatan Tapa, Bulango Utara, Bulango Selatan, dan Bulango Timur, dan Tilongkabila
- DAS Tahele dan DAS Mongilipa di Kecamatan Bulango Ulu
- DAS Oluhuta, DAS Popayato, DAS Ulanta, DAS Dumbaya, DAS Bungayono di Kecamatan Kabila
- DAS Bone di Kecamatan Botupingge, Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, dan Suwawa Tengah
- DAS Tamboo, DAS Bilungala, dan DAS Uabanga di Kecamatan Bone Pantai
- DAS Tombulilato di Kecamatan Kabila Bone dan Bone Raya
- DAS Monano, DAS Sogitia, dan DAS Taludaa di Kecamatan Bone
- DAS Kaidundu di Kecamatan Bulawa

Selain potensi DAS, Bone Bolango juga memiliki satu danau kecil seluas 4 hektar yaitu Danau Perintis di Kecamatan Suwawa. Beberapa embung dan bendungan besar di Provinsi Gorontalo juga terdapat di daerah ini. Kegiatan perikanan yang telah memanfaatkan potensi air tawar adalah budidaya kolam dan karamba jaring apung, masih sangat kecil atau terbatas pemanfaatan untuk mina padi. Potensi perikanan budidaya air tawar berada di 14 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango meliputi 42 desa perikanan budidaya. Selain kawasan daerah aliran sungai, Bone Bolango juga memiliki potensi budidaya air tawar yang cocok untuk mina padi. Teknologi ini saat ini banyak direkomendasikan oleh para ahli karena ternyata menguntungkan budidaya padi sawah dalam mengantisipasi iklim yang ekstrim. Potensi mina padi terdapat di sembilan kecamatan, yaitu Kabila, Tilongkabila, Bulango Selatan, Bulango Timur, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Suwawa, Pinogu. Luas potensi mina padi yang ada sebesar 2381 ha dengan jaringan irigasi teknis. Untuk merealisasikan target-target program dan



kegiatan kelautan dan perikanan telah dianggarkan sebesar Rp.23,543,964,897 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 18,085,044,897 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 5,458,920,000

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dijabarkan dibawah ini:

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan biota laut. Peran serta masyarakat dalam keterlibatan dalam mengawasi peredaran serta pemanfaatan sumber daya laut sangat menentukan ketersediaan sumber daya laut dimasa mendatang, upaya untuk meningkatkan kemampuan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan laut dilakukan disamping kesinambungan eksploitasi kekayaan laut yang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan masa depan. Proses penyadaran serta peningkatan kemampuan nelayan dilakukan melalui sosialisasi, bimtek ataupun pelatihan. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah:

1. Pada tahun 2012 diadakan pelatihan transplantasi karang dengan peserta sejumlah 20 orang dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dan kegiatan sosialisasi Pencegahan Illegal Fishing dan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengawasan Perikanan dengan peserta sebanyak 40 orang dengan anggaran sebesar RP. 20.000.000,-
2. Untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian maka pada tahun 2014 diadakan beberapa sarana prasarana penunjang yakni:
 - Pembangunan Tambat Perahu / Kapal sebanyak 1 Unit
 - Pengadaan Kapal Pengawas sebanyak 1 unit
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Konservasi (Toolkit Pengawasan) sebanyak 1 Unit
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Konservasi (Motor Pengawasan) sebanyak 1 Unit





- Pengadaan Alat Komunikasi Pengawasan SDKP (Repeater) sebanyak 1 unit
- 3. Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian peredaran kekayaan laut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran operasional sebesar Rp. 103.649.000,-
- 4. Untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang telah rusak, pada tahun 2013 dan 2014 telah dilakukan rehabilitasi terumbu karang dengan anggaran sebesar Rp. 279.000.000,-

2) Program Pengembangan Budi daya Perikanan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program pengembangan budi daya perikanan adalah

- a) Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan diarahkan pada kemampuan nelayan dalam meningkatkan pendapatannya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:
 - Pelatihan budidaya air tawar, air laut dan air payau dengan peserta sebanyak 240 orang dengan anggaran sebesar Rp. 61.060.000,-
 - Pelatihan bagi petugas teknis dengan sasaran sebanyak 12 orang dengan anggaran sebesar 49.000.000

Untuk meningkatkan kemampuan serta pengembangan budidaya perikanan dilakukan fasilitasi berupa pemberian bibit ikan yang akan dikembangkan oleh nelayan. Fasilitasi bibit, percontohan, sarana dan prasarana disamping untuk melatih nelayan dalam pembudidayaan perikanan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Adapun fasilitasi bibit atau benih ikan dalam dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 4.58
Fasilitasi Bibit/Benih Ikan
Tahun 2011-2015*

No	Kegiatan	Sat	Realisasi				Target 2015	Jlh
			2011	2012	2013	2014		
1	Pengadaan Bibit Ikan Budi daya	Bibit	65.315	207.500	39.000	57.460	59.950	429.225
2	Percontohan Budi Daya Perikanan	Keg	10	1	3	1	15	30
3	Pembangunan Sarana dan	Unit	4	2	4	13	1	24





No	Kegiatan	Sat	Realisasi				Target 2015	Jlh
			2011	2012	2013	2014		
	Prsarana Budi Daya							
4	Perbaikan Sarana dan Prasarana Perikanan	Unit	5	8	4	3	23	43

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Bolango

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan perikanan tangkap adalah :

- a) Pengembangan lembaga usaha perikanan tangkap. Sasaran kegiatan ini diharapkan tumbuhnya usaha-usaha atau lembaga yang bergerak dibidang perikanan tangkap. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang tumbuhnya usaha yang bergerak dibidang perikanan tangkap adalah peningkatan SDM yang bergerak dibidang perikanan tangkap. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah pembinaan teknis manajemen usaha yang diarahkan pada calon pengusaha sebanyak 20 orang dengan anggaran sebesar Rp, 20.000.000,-
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Sarana dan prasarana perikanan tangkap adalah faktor yang sangat menentukan dalam melipatgandakan hasil perikanan tangkap. Faktor efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya kelautan ditentukan oleh sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 4.59
Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap
Tahun 2011 – 2015*

No	Kegiatan	Sat	Realisasi				Target 2015	Total
			2011	2012	2013	2014		
1	Pengadaan Mesin 5,5, 9 PK	Unit	4	34	51	20	100	209
2	Pengadaan Mesin dalam 60 PK	Keg	-	-	7	-	-	7





No	Kegiatan	Sat	Realisasi				Target 2015	Total
3	Pengadaan Mesin Tempel 15 PK	Unit	-	-	-	5	6	11
4	Pengadaan Kapal 12 GT	Unit	1	2	7	2	1	13
5	Pengadaan Alat Tangkap Mini purseine	Unit	1	2	1	-	1	5
6	Pengadaan Genset	Unit	12	-	40	40	30	122
7	Pengadaan Rumpon	Unit	4	-	-	-	11	15
8	Pengadaan Jaring	Unit	30	-	-	-	-	30
9	Pengadaan Alat Pancing Tuna	Unit	50	28	-	2	-	80
10	Pengadaan Alat angkutan roda 2 untuk pemasaran ikan	Unit	4	-	2	2	-	8
11	Pengadaan Alat pendeteksi Ikan	Unit	-	12	-	-	-	12

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bone Bolango

4) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan tak lepas dari evaluasi dan monitoring secara terpadu dan berkala. Disamping itu diperlukan kajian-kajian teknis untuk mengukur sejauhmana tingkat kelayakan atau kerusakan biota laut sehingga secara dini dapat dicegah agar lingkungan tetap asri dan terpelihara. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dan rencana 2015 dalam rangka mengoptimalkan hasil pemasaran adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Alat Angkut berpendingin roda 2 sebanyak 73 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.733.077.000,-
- Pengadaan pendingin (cool box) sebanyak 40 Unit dengan anggaran Rp. 203.683.000
- Dan beberapa kegiatan penunjang seperti kampanye gemar ikan, sosialisasi perizinan, dan lomba inovasi pengembangan produk perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 192.033,000

b. Capaian Kinerja Outcome program

Adapun capaian kinerja outcome yang diperoleh bidang kelautan dan perikanan adalah

1) Meningkatnya produksi ikan tangkap

Grafik 4.9

Capaian kinerja outcome program



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bone Bolango

Pada awal tahun 2014 DKP menargetkan produksi perikanan tangkap 21% dari kondisi awal (11.000 ton) setelah terealisasi mencapai 13.472,3 ton atau terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 98,8 % dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 realisasi capaian produksi perikanan tangkap mencapai 13.437,4 ton jadi hanya meningkat 101,7 ton saja, tahun 2012 realisasi capaian produksi perikanan tangkap 12.761,5 Ton dan tahun 2011 realisasi produksi mencapai 12.121 ton. maka terjadi peningkatan produksi yang cukup baik setiap tahunnya. Peningkatan ini salah satunya disebabkan telah selesainya Pembangunan Pangkalan Perdaratan Ikan Inengo sehingga kapal-kapal banyak yang sudah mendarat di PPI Inengo ini dan memudahkan dalam perhitungan data produksi perikanan tangkap. Walaupun demikian peningkatan produksi masih jauh yang diharapkan karena tidak sebanding dengan potensi laut kita yang luas. Adapun kendala yang dihadapi adalah Kurangnya kapal Penangkap Ikan diatas 10 GT, Kapasitas nelayan yang rendah dari sisi penguasaan teknologi penangkapan ikan dan kelembagaan dan kenaikan harga BBM yang membuat menurunnya produktifitas para nelayan

- 2) Salah satu faktor penentu keberhasilan program budidaya perikanan sangat ditentukan oleh banyaknya produksi perikanan budidaya perikanan. Adapaun capaian kinerja program perikanan budidaya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 4.10
Capaian kinerja outcome program



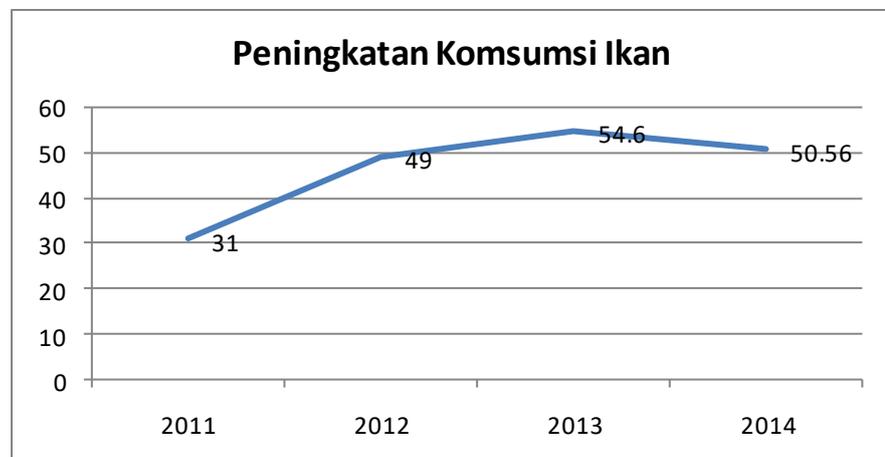
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Bolango

Berdasarkan renstra bahwa produksi perikanan budidaya ditargetkan meningkat 21% dari kondisi awal 1000 ton (Th 2011) setelah terealisasi mencapai 1.242,62 ton atau 23 % dari kondisi awal. Adapun kendala yang dihadapi turunnya produksi perikanan budidaya tahun ini dibandingkan tahun lalu adalah pakan yang sangat mahal, kurangnya benih yang unggul, kurangnya SDM yang menguasai teknologi rekayasa untuk perikanan budidaya dan belum termanfaatkannya lahan budidaya laut.

3) Meningkatnya konsumsi ikan per tahun

Untuk melihat Indikator Kinerja Tingkat Komsumsi Ikan per kapita per tahun di Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 -2014 terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.11
Tingkat Komsumsi ikan kab. Bone Bolango



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Bolango





Dari Grafik ini bisa di jelaskan Target tahun 2014 Target Komsumsi Ikan DKP 50 kg/kapital/tahun setelah terealisasi mencapai 50,56 kg/kapital/tahun disini terjadi peningkatan komsumsi ikan 98,9% dari yang di targetkan. Dibandingkan data tahun sebelumnya tahun 2013 tingkat komsumsi ikan mencapai 54,6 kg/kapita/tahun walaupun terjadi penurunan akan tetapi target secara renstra tingkat komsumsi ikan tetap tercapai tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan realisasi tingkat komsumsi ikan. Naik turunnya tingkat komsumsi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk di kabupaten bone bolango yang selalu meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan produksi ikan yang dihasilkan.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Tingkat Produksi Perikanan masih belum maksimal, belum sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango.
- b) Pengelolaan lingkungan terutama konservasi Terumbu karang belum seluruhnya di tindaklanjuti
- c) SDM aparatur, Pembudidaya/Nelayan/Pengolah/Pedagang Ikan belum mampu menyesuaikan dengan teknologi yang ada.

2) Solusi

- a) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 10 GT dan alat tangkapnya
- b) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan kapal
- c) Mengadakan induk ikan ber varietas unggul agar menghasilkan benih-benih ikan yang unggul
- d) Melakukan pembangunan, rehabilitasi, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan perikanan
- e) Melakukan perbaikan lingkungan budidaya melalui pengelolaan lingkungan perikanan budidaya yang berkelanjutan, rehabilitasi perairan budidaya, perbaikan kualitas lingkungan dan pembinaan kesehatan ikan
- f) Meningkatkan tingkat komsumsi ikan/kapita/tahun pada masyarakat melalui pendekatan arah kebijakan pengembangan dan penguatan pemasaran hasil perikanan di kabupaten Bone Bolango
- g) Penambahan sarana dan prasarana pemasaran
- h) Pembinaan, pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan, nelayan, pedagang/pengolah hasil perikanan serta aparatur dinas.





6. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Pembangunan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak dari pertumbuhan perekonomian akan terus didorong perandan kontribusinya terhadap pembangunan, mengingat perannya yang penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian. Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDRB) diupayakan untuk ditingkatkan, terutama dalam ekspor nonmigas. Guna mendorong peningkatan ekspor nonmigas telah dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun kebijakan tersebut, perlu didukung pula dengan penguatan perdagangan dalam negeri guna menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, dan terciptanya iklim usahayangsehat. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan perdagangan telah dianggarkan sebesar Rp. 12,156,912,696 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 8,942,172,496 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 3,214,740,200

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

Urusan Pilihan Perdagangan pada tahun 2011 sampai dengan 2014 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan hasil pengawasan peredaran barang dan jasa yang kadaluarsa sebanyak selama 4 Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 189.988.000.,
2. Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Barang Kadaluarsa sebanyak selama 4 Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 28.172.500.,
3. Pengawasan UTTP metrologi legal sebanyak selama 4 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 37.962.000.,
4. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa sebanyak dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.,





2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan International, dengan kegiatan :

1. koordinasi isu-isu perdagangan sebanyak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.565.300.,

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :

1. Rehabilitasi, pembangunan, peningkatan, penataan, penimbunan dan jasa konstruksi pada pengembangan pasar sebanyak 18 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.400.107.250.,
2. Perencanaan pengawasan pembangunan pasar sebanyak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 251.690.000.,
3. Pembangunan Pasar sebanyak 3 unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.796.916.000.,
4. Pembuatan jalan akses pasar 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 8.745.000.,
5. Pembuatan duiker dan pembatas masuk pasar selasa sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.437.500.,
6. Pameran HUT Bone Bolango 2 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 137.500.000.,

4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :

1. Pelatihan/sosialisasi manajemen pengelolaan usaha bagi pedagang kaki lima sebanyak 50 peserta dengan anggaran sebesar Rp. 14.700.000.,
2. Penyuluhan pedagang kakilima dan asongan sebanyak 25 orang dengan anggaran sebesar Rp. 21.639.750.,
3. Pembangunan Tempat usaha berjualan pedagang di 13 lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 104.526.900.,
4. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dengan anggaran sebesar Rp. 4.995.000.,

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dibidang perdagangan adalah

- a) Belum optimalnya pembinaan bagi pelaku industri kecil terutama dalam hal pelabelan hasil



- b) Belum optimalnya pengawasan dan penindakan bagi para pelaku pasar terutama dalam hal pengukuhan /penimbanganbahan-bahan/produk;
- c) Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar, sehingga diperlukan pembenahan secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat terciptanya kenyamanan bagi para pelaku pasar dan masyarakat.

2. Solusi

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah

- a) Pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku industri kecil terutama dalam hal pelabelan produk
- b) Pengawasan dan terhadap pelaku/pedagang yang memiliki alat ukur yang tidak mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan prundangan yang berlaku

7. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

Peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian, haruslah menjadi prioritas untuk memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone Bolango.

Tantangan yang dihadapi dalam urusan industri adalah semakin bebasnya produk-produk luar negeri yang kedalam pasar domestik, sehingga diperlukan upaya-upaya yang menyeluruh guna mengamankan pasar domestik, serta upaya untuk meningkatkan daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas. Urusan Pilihan Perindustrian pada tahun 2014 ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan perindustrian telah dianggarkan sebesar Rp. 2,074,589,900 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,423,586,000 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 651,003,900, dengan program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan kegiatan :





1. Bimtek pengolahan minyak kelapa tanpa di tanak sebanyak 20 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.48.620.000.,
2. Pelatihan menjahit sebanyak 21 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 82.230.000.,
3. Kegiatan Magang ke Panasonic Gobel sebanyak 31 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 120.005.000.,
4. Seleksi peserta magang sebanyak 50 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.45.000.000.,

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi modal/material bagi IKM sebanyak 6 IKM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 141.742.000.,
2. Pendampingan, pengawasan dan pengembangan IKM sebanyak 1 Orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.150.000.,
3. Pemutakhiran data industri kecil menengah dan penyaluran fasilitas bagi IKM sebanyak 2 Kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.817.100.,
4. Sosialisasi penerimaan mahasiswa beasiswa calon tenaga penyuluh,pendampingan,Pengawasan dan Pengembangan IKM sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.090.000.,
5. Pelaksanaan Verifikasi IKM penerapan GKM sebanyak 2 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 83.903.800.,
6. Kegiatan verifikasi IKM calon penerima upakarti sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.085.000.,
7. Pelaksanaan koordinasi kegiatan lomba penerima penghargaan upakarti sebanyak 2 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.495.200.,
8. Penyusunan laporan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.886.500.,
9. Verifikasi calon penerima Upakarti sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.570.000.,
10. Pengembangan IKM sebanyak 4 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 101.700.000.,
11. Aparat yang mengikuti magang dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah sebanyak 1 kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.541.000.,
12. Promosi produk unggulan daerah pada pameran provinsi Gorontalo sebanyak 1 kali dengan anggaran Rp. 77.209.000.,



3) Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial,
dengan kegiatan :

1. Bimtek pengembangan sentra industri potensial sebanyak 45 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 128.275.600.,

b. Permasalahan dan Solusi

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango, adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing;
- b) Sarana dan prasarana perdagangan sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga perlu pengembangan di wilayah lainnya;
- c) Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga;
- d) Belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, cq. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya;
- e) Globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya saing produk UMKM;
- f) Masih adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari Pemerintah merupakan hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan bagi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- g) Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas pelaku usaha;

Strategi pemecahan atas Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango, adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan penerapan dan bantuan sarana prasarana teknologi;
- b) Pengembangan kawasan perdagangan di wilayah yang belum tersentuh;
- c) Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen;



- d) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- e) Meningkatkan pola kemitraan dengan BUMN/BUMD/BUMS secara berkesinambungan;
- f) Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui keunggulan kompetitif;
- g) Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan meningkatkan skill kreativitas pelaku usaha. an teknis atau diklat.

8. URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN

Urusan transmigrasi dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi. Urusan Pilihan transmigrasi sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk merealisasikan target-target program dan kegiatan ketransmigrasian telah dianggarkan sebesar Rp 1,795,121,000 dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,586,824,500 dan tahun 2015 direncanakan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 208,296,500 Adapun program yang dilaksanakan adalah

a. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2011 berupa pengadaan bibit jagung sebanyak 1 paket dengan nilai anggaran sebesar Rp. 99.770.000, Pengadaan Bibit capai sebanyak 25 ekor dengan anggaran Rp. 136.750.000, dan Pengadaan Pupuk sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp. 84.700.000
 - Pada Tahun 2014 berupa pengadaan bibit nilam sebanyak 2.500 bibit Rp. 34.980.000
2. Peningkatan sarana dan prasarana transmigrasi telah dibuat beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di daerah trasmigrasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut:





Tabel 4.60
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Prasarana Transmigrasi

NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI				Target 2015	Total
			2011	2012	2013	2014		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transmigrasi	Unit	-	1	3	4	-	8
2	Pemeliharaan Sarana dan prasarana	Unit	7	2	-	-	-	9
3	Dana Insentif	Rp	-	-	25 Juta	-	-	25 Juta

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan transmigrasi sebagai berikut:

- Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai;
- Terwujudnya informasi tentang transmigrasi, sehingga dapat meningkatkan animo calon transmigran;
- Terwujudnya calon transmigran yang produktif dan berdaya saing;

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang transmigrasi

- Masih minimnya sarana dan prasarana ketransmigrasian,
- Belum optimalnya informasi tentang transmigrasi yang dapat diterima oleh masyarakat,

2) Solusi

Adapun solusi atas permasalahan diatas adalah

- Meningkatkan upaya pengadaan sarana dan prasarana ketransmigrasian dalam upaya menciptakan jaminan keberlanjutan hidup para transmigran;
- Meningkatkan upaya-upaya penyampaian informasi tentang transmigrasi sampai ke daerah pelosok untuk mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat asli.



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan sebagai salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada daerah.

Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat 1. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (*output*) dan menambah nilai aset Pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2).

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.





Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan berdasarkan:

A. DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, Dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2 bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan untuk kabupaten/ meliputi :

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat
2. Tugas Pembantuan yang di terima dari Pemerintah provinsi
3. Tugas Pembantuan kepada desa

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2011-2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun jumlah anggaran yang merupakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 5.1
Anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

No	Instansi Pemberi Bantuan	Realisasi Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Kementerian Pertanian RI	7.390.000.000	2.529.032.000	6.303.597.000	4.443.200.000	23.525.629.500
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI			10.000.000.000	7.450.000.000	2.000.000.000
3.	Kementerian Kesehatan RI		2.190.200.000	2.210.720.000	4.321.320.000	
4.	Kementerian Dalam Negeri RI				300.000.000	330.000.000
5.	Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	3.734.358.000	746.177.000	1.087.875.000	915.540.000	
6.	Kementerian Desa Tertinggal					42.750.131.000
7.	Kementerian PU RI	4.250.000.000	5.250.000.000	16.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
TOTAL		15.374.358.000	11.674.219.000	35.602.192.000	22.430.060.000	73.605.760.500

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bone Bolango yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2014 adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango

2. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

a. Dinas Pekerjaan Umum

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango telah memperoleh alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp. 35.000.000.000. Adapun program yang dilaksanakan adalah program pembangunan infrastruktur pedesaan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :



Tabel 5.2
Capaian Output pada Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan selang tahun 2011

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Drainase Pembangunan Sumur gali Pembangunan MCK	Desa Bilolantunga	Desa	1	250.000.000
2	Perkerasan Jalan Lapen Pmbukaan Jalan Baru Pembuatan Talud	Desa Inogaluma	Desa	1	250.000.000
3	Pembukaan Jalan Desa Pembuatan Plat Duicker Pembangunan Jembatan Kayu Pembuatan MCK	Desa Tumbuh Mekar	Desa	1	250.000.000
4	Pembangunan Air Bersih Pembangunan Drainase	Desa Ilohuuwa	Desa	1	250.000.000
5	Pembangunan Air Bersih	Desa Tombililato	Desa	1	250.000.000
6	Pembangunan Drainase Pembangunan MCK	Desa Bilungngala Utara	Desa	1	250.000.000
7	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Kemiri	Desa	1	250.000.000
8	Pembangunan Tambatan Perahu Pembangunan Break Water	Desa Batu Hijau	Desa	1	250.000.000
9	Pembangunan Drainase	Desa Kaidundu	Desa	1	250.000.000
10	Pembangunan Drainase Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Kaidundu Barat	Desa	1	250.000.000
11	Pembangunan Air Bersih	Desa Mopuya	Desa	1	250.000.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
12	Pembangunan Drainase Pembuatan Plat Duicker	Desa Molintogupo	Desa	1	250.000.000
13	Pembangunan Jalan Sirtu Pembangunan Drainase Pembuatan Plat Duicker	Desa Lompotoo	Desa	1	250.000.000
14	Pek. Jalan Paving Blok	Desa Alale	Desa	1	250.000.000
15	Pembangunan Drainase	Desa Tapadaa	Desa	1	250.000.000
16	Pembangunan Drainase Pembuatan Plat Duicker	Desa Tulabolo	Desa	1	250.000.000
17	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan Drainase Pembuatan Plat Duicker	Desa Dumbaya bulan	Desa	1	250.000.000

*Tabel 5.3
Capaian Output pada Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan tahun 2012*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembukaan Jalan Pembuatan Jembatan Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Bendungan	Desa	1	250.000.000
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan Drainase	Desa Longalo	Desa	1	250.000.000
3	Peningkatan Jalan Desa Pembuatan MCK	Desa Lomaya	Desa	1	250.000.000
4	Peningkatan Jalan Desa Pembuatan Talud Pembuatan Plat Duicker Pembangunan Drainase Pembuatan MCK Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Suka Damai	Desa	1	250.000.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
5	Pembangunan Saluran Irigasi Pembangunan MCK	Desa Huntu Selatan	Desa	1	250.000.000
6	Pembangunan Saluran Irigasi Pembangunan Jalan Setapak	Desa Huntu Utara	Desa	1	250.000.000
7	Pembangunan Drainase	Desa Bondaraya	Desa	1	250.000.000
8	Pembangunan Drainase	Desa Bonedaa	Desa	1	250.000.000
9	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembuatan Talud Pembangunan Drainase	Desa Bulontala Timur	Desa	1	250.000.000
10	Pembuatan Plat Duicker Pembangunan Drainase	Desa Huluduotamo	Desa	1	250.000.000
11	Pembangunan MCK Pembangunan Drainase	Desa Ulantha	Desa	1	250.000.000
12	Pembangunan Jalan Macadam Pembangunan Jembatan Pembangunan Drainase	Desa Tunggulo	Desa	1	250.000.000
13	Pembangunan Drainase Pembuatan Plat Duicker	Desa Inomata	Desa	1	250.000.000
14	Pembuatan Sumur Gali Pembangunan Menara Air Pembangunan MCK PAB	Desa Mootinelo	Desa	1	250.000.000
15	Pembangunan Jalan Lapen	Desa Sogitia	Desa	1	250.000.000
16	Rehab Drainase Pembangunan Drainase	Desa Taludaa	Desa	1	250.000.000
17	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan Jaringan Pipa	Desa Mamungaa Timur	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
	Pembuatan Plat Duicker Pembangunan Drainase				
18	Pembuatan Saluaran Dinding Tanah Pembuatan Jalan Telford Pembuatan Plat Duicker	Desa Pinogu	Desa	1	250.000.000
19	Pembuatan Saluaran Dinding Tanah Pembuatan Jalan Telford Pembuatan Bak Pembagi Pembangunan Drainase	Desa Pinogu Permai	Desa	1	250.000.000
20	Pembuatan Saluaran Dinding Tanah Pembuatan Jalan Telford Pembuatan Jalan Sirtu	Desa Bangio	Desa	1	250.000.000
21	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan Drainase Pembuatan MCK	Desa Olohuta Utara	Desa	1	250.000.000

*Tabel 5.4
Capaian Output pada Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan tahun 2013*

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Jalan Lapen Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Ayula Utara	Desa	1	250.000.000
2	Pembangunan Jalan Lapen Pembuatan Jembatan Beton	Desa Ayula Selatan	Desa	1	250.000.000
3	Pembangunan Saluran Irigasi	Desa Sejahtera	Desa	1	250.000.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
4	Pembuatan Jembatan Beton Pembuatan Jalan Sirtu Rehab Jembatan Pembangunan Saluran Air Pembangunan Jalan Rabat Beton SPAL	Desa Bulotalangi Barat	Desa	1	250.000.000
5	Pembuatan Jalan Sirtu Pelebaran Jembatan	Desa Popodu	Desa	1	250.000.000
6	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Dutohe	Desa	1	250.000.000
7	Pembangunan Saluran Irgasi Pembuatan Jembatan Beton SPAL	Desa Toto Selatan	Desa	1	250.000.000
8	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan MCK Pembangunan Drainase Pembuatan Plat Duicker	Desa Luwohu	Desa	1	250.000.000
9	Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan MCK Pembuatan WC	Desa Timbuolo	Desa	1	250.000.000
10	Pembuatan Plat Duicker Pembangunan Drainase	Desa Timbuolo Tengah	Desa	1	250.000.000
11	Pembuatan Jalan Sirtu Pembangunan Jalan Rabat Beton Pembangunan MCK	Desa Sukma	Desa	1	250.000.000
12	Jalan Desa , MCK & Jembatan Sederhana	Desa Bongime	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
13	Plat Duicker , jalan Rabat Beton Titik A+B, Drainase Titik A+B, SPAL, MCK, Sumur gali & Jembatan Sederhana	Desa Moutong	Desa	1	250.000.000
14	Drainase, Rehab Jembatan & Plat Duicker	Desa Motilango	Desa	1	250.000.000
15	Plat Duicker, Jalan Rabat Beton Titik A, Jalan Rabat Beton Titik B, SPAL, MCK, Sumur gali & Sumur Suntik	Desa Bongohulawa	Desa	1	250.000.000
16	Drainase & Jalan Rabat Beton	Desa Tinelo	Desa	1	250.000.000
17	Drainase	Desa Libungo	Desa	1	250.000.000
18	Jalan Sirtu & Talud Penahan tanah	Desa Molintogupo	Desa	1	250.000.000
19	Drainase & Plat Duicker	Desa Bondawuna	Desa	1	250.000.000
20	Drainase	Desa Dataran Hijau	Desa	1	250.000.000
21	Jalan Telford, Plat Duicker, Drainase	Desa Tilonggibila	Desa	1	250.000.000
22	Drainase Titik A, Drainase Titik B, Sambungan Pipa Air Bersih, Rehab Drainase	Desa Lombongo	Desa	1	250.000.000
23	Jalan Paving Blok, Jalan Desa	Desa Duano	Desa	1	250.000.000
24	Drainase Titik A, Plat Duicker, Drainase Titik B	Desa Tolomato	Desa	1	250.000.000
25	Jalan Paving Blok, Jalan Desa, Plat duicker	Desa Alale	Desa	1	250.000.000
26	Jalan Rabat Beton, Catingan, Drainase, Plat Duicker	Desa Uabanga	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
27	Jalan Rabat Beton, Drainase	Desa Tunas jaya	Desa	1	250.000.000
28	Rabat Beton, MCK, Jembatan	Desa Moodulio	Desa	1	250.000.000
29	Drainase, Plat Duicker	Desa Masiaga	Desa	1	250.000.000
30	Drainase, rabat Beton, MCK	Desa Muara Bone	Desa	1	250.000.000
31	MCK, Jalan Rabat Type A, Jalan Rabat Type B & Palat Duicker	Desa Dunggala	Desa	1	250.000.000
32	Jalan Rabat Beton	Desa Ayula Tilango	Meter	1	250.000.000
33	Pek. Saluran Air, Pek. Jalan Rabat Beton	Desa Lamahu	Desa	1	250.000.000
34	Jalan Rabat Beton, Jembatan Gelagar Beton, Saluran, MCK	Desa Ayula Timur	Desa	1	250.000.000
35	Irigasi Type A, Irigasi Type B, jalan rabat Beton Type A, jalan rabat Beton Type B, jalan Sirtu	Desa Bulotalangi	Meter	1	250.000.000
36	Saluran Irigasi, Jalan Rabat Beton	Desa Toluwaya	Desa	1	250.000.000
37	Plat Duicker A,B & C, Talud Penahan Tebing, Saluran, Bak Peresapan, SPAL	Desa Owata	Desa	1	250.000.000
38	Jalan Rabat Beton, Jembatan, Saluran irigasi	Desa Poowo	Meter	1	250.000.000
39	Jalan Rabat Beton, Saluran Irigasi, Rehab Plat Duicker	Desa Talango	Desa	1	250.000.000
40	Pembukaan Jalan Tani, Plat Duicker, Saluran Irigasi	Desa Poowo Barat	Desa	1	250.000.000
41	Jalan Rabat, Drainase	Desa Dutohe Barat	Desa	1	250.000.000
42	Jalan Rabat Beton, Drainase, MCK	Desa Buata	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
43	Jalan Rabat Beton, Saluran Air, Plat duicker	Desa Bongopini	Desa	1	250.000.000
44	Saluran Air, Talud, Jalan Sirtu, MCK	Desa Iloheluma	Desa	1	250.000.000
45	Jalan Rabat Beton, Saluran Air	Desa Tunggulo Setalatan	Desa	1	250.000.000
46	Pembukaan jalan Tani, Talud, Plat Duicker, MCK	Desa Tingkohubu	Desa	1	250.000.000
47	Pemb. Jalan Desa	Desa Boludawa	Desa	1	250.000.000
48	Jalan Rabat Beton, Saluran Irigasi	Desa Bube	Desa	1	250.000.000
49	Drainase, Plat Duicker	Desa Bubeya	Desa	1	250.000.000
50	Jalan Rabat Beton, MCK	Desa Bube Baru	Desa	1	250.000.000
51	Drainase, Plat Duicker, Drainase / Talud	Desa Pancuran	Desa	1	250.000.000
52	Pek. Jalan Rabat Beton	Desa Tulabolo	Desa	1	250.000.000
53	Drainase, Plat Duicker	Desa Dumbaya Bulan	Desa	1	250.000.000
54	Pek. Jalan Rabat Beton	Desa Tulabolo timur	Desa	1	250.000.000
55	Drainase, Plat Duicker	Desa Lompotoo	Desa	1	250.000.000
56	Saluran air, Plat Duicker, jalan rabat Beton	Desa Tamboo	Desa	1	250.000.000
57	Saluran air, jalan rabat Beton	Desa Bilungala	Desa	1	250.000.000
58	Jalan rabat Beton, MCK	Desa Molotabu	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
59	Jalan rabat Beton, Saluran, palat duicker, MCK	Desa Modelomo	Desa	1	250.000.000
60	Pemb. Jembatan, Plat Duicker Type 1, Plat Duicker Type 2	Desa Botutonuo	Desa	1	250.000.000
61	Pek. Saeana Air Bersih, Drainase	Desa Olele	Desa	1	250.000.000
62	Pek. Jalan Desa, Plat Duicker, Jaringan Air Bersih	Desa Molamahu	Desa	1	250.000.000
63	Pek. Jalan Desa, Plat Duicker	Desa Cendana Putih	Desa	1	250.000.000
64	Pemb. Saluran Air, Jalan rabat Beton, Plat Duicker	Desa Permata	Desa	1	250.000.000

Tabel 5.5
Capaian Output pada Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan tahun 2014

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pek. Duicker, Pek. Drainase 2 Titik, Pek. MCK + SGL	Desa Mootinelo	Desa	1	250.000.000
2	Pek. Jalan Rabat Beton	Desa Inomata	Desa	1	250.000.000
3	Pek. Sumur Gali / MCK	Desa Tumbulilato	Desa	1	250.000.000
4	Pembuatan Jalan Rabat Beton, Pembuatan Plat Duicker, Pekerjaan Drainase	Desa Pelita Jaya	Desa	1	250.000.000
5	Pembuatan Jaringan Pipa Air Bersih	Desa Alo	Desa	1	250.000.000
6	Pembuatan Jaringan Pipa Air Bersih, Menara Air, Rumah Pompa, Pembuatan Jalan Baru	Desa Mootayu	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
7	Jalan Rabat Beton	Desa Moopiya	Desa	1	250.000.000
8	Pekerjaan MCK + SGL	Desa Mootawa	Desa	1	250.000.000
9	Pek. Perbaikan Lantai Jembatan, Pekerjaan Kanstin, Pekerjaan Jalan	Desa Tamboo	Desa	1	250.000.000
10	Pek. Jalan Perkerasan Sirtu, Pek. Plat Duicker (3x2) M, Pek. Plat Duicker (3x2,5) M, Pek. Jalan Rabat Beton, Pek. Saluran	Desa Bangio	Desa	1	250.000.000
11	Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Plat Duicker	Desa Pinogu Permai	Desa	1	250.000.000
12	Pekerjaan Rabat Beton , Drainase	Desa Tupa	Desa	1	250.000.000
13	Pembukaan Jalan, Pembuatan Kanstin	Desa Tapadaa	Desa	1	250.000.000
14	Pek.Pembangunan Drainase, Pek. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit	Desa Pangi	Desa	1	250.000.000
15	Pekerjaan MCK + SGL,	Desa Bonedaa	Desa	1	250.000.000
16	Pek. BAK/PIRINGAN + SGL	Desa Bonda Raya	Desa	1	250.000.000
17	Pekerjaan Rabat Beton, Pekerjaan Rabat Beton, Pembuatan Drainase	Desa Inogaluma	Desa	1	250.000.000
18	Pekerjaan Pembuatan Drainase, Pek. Pembuatan Plat Duicker 1 Unit	Desa Taludaa	Desa	1	250.000.000
19	Pek. Pembangunan MCK + SGL	Desa Waluhu	Desa	1	250.000.000
20	Pekerjaan PAB	Desa Monano	Desa	1	250.000.000



Tabel 5.6
Capaian Output pada Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan tahun 2015

NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
1	Pek. Duicker, Pek. Drainase 2 Titik, Pek. MCK + SGL	Desa Mootinelo	Desa	1	250.000.000
2	Pek. Jalan Rabat Beton	Desa Inomata	Desa	1	250.000.000
3	Pek. Sumur Gali / MCK	Desa Tumbulilato	Desa	1	250.000.000
4	Pembuatan Jalan Rabat Beton, Pembuatan Plat Duicker, Pekerjaan Drainase	Desa Pelita Jaya	Desa	1	250.000.000
5	Pembuatan Jaringan Pipa Air Bersih	Desa Alo	Desa	1	250.000.000
6	Pembuatan Jaringan Pipa Air Bersih, Menara Air, Rumah Pompa, Pembuatan Jalan Baru	Desa Mootayu	Desa	1	250.000.000
7	Jalan Rabat Beton	Desa Moopiya	Desa	1	250.000.000
8	Pekerjaan MCK + SGL	Desa Mootawa	Desa	1	250.000.000
9	Pek. Perbaikan Lantai Jembatan, Pekerjaan Kanstin, Pekerjaan Jalan	Desa Tamboo	Desa	1	250.000.000
10	Pek. Jalan Perkerasan Sirtu, Pek. Plat Duicker (3x2) M, Pek. Plat Duicker (3x2,5) M, Pek. Jalan Rabat Beton, Pek. Saluran	Desa Bangio	Desa	1	250.000.000
11	Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Plat Duicker	Desa Pinogu Permai	Desa	1	250.000.000
12	Pekerjaan Rabat Beton , Drainase	Desa Tupa	Desa	1	250.000.000





NO	KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)
13	Pembukaan Jalan, Pembuatan Kanstin	Desa Tapadaa	Desa	1	250.000.000
14	Pek. Pembangunan Drainase, Pek. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit	Desa Pangi	Desa	1	250.000.000
15	Pekerjaan MCK + SGL,	Desa Bonedaa	Desa	1	250.000.000
16	Pek. BAK/PIRINGAN + SGL	Desa Bonda Raya	Desa	1	250.000.000
17	Pekerjaan Rabat Beton, Pekerjaan Rabat Beton, Pembuatan Drainase	Desa Inogaluma	Desa	1	250.000.000
18	Pekerjaan Pembuatan Drainase, Pek. Pembuatan Plat Duicker 1 Unit	Desa Taludaa	Desa	1	250.000.000
19	Pek. Pembangunan MCK + SGL	Desa Waluhu	Desa	1	250.000.000
20	Pekerjaan PAB	Desa Monano	Desa	1	250.000.000

b. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 44.191.458.500 (empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dalam mengimplementasikan program sebagai berikut :

- 1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada, dengan kegiatan Penanganan Pasca Panen Padi dan Jagung.
- 2). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Optimalisasi Lahan dan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.
- 3). Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Ilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Ubi Kayu) yang diserahkan kepada masyarakat.
- 4). Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan Peningkatan



Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

- 5). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air dan Antisipasi Aniamali, Optimalisasi Lahan dan Pembinaan Administrasi.

Adapun Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

*Tabel 5.7
Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone Bolango*

Realisasi Alokasi Dana				Target 2015	Jumlah total
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
7,390,000,000	2,529,032,000	6,303,597,000	4,443,200,000	23,525,629,500	44,191,458,500

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango

c. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 19.450.000.000 (Sembilan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Adapun realisasi alokasi dana dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 5.8
Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango*

Realisasi Alokasi Dana				Target 2015	Jumlah total
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
-	-	10.000.000.000	7.450.000.000	2.000.000.000	19.450.000.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Bolango

d. Dinas Kesehatan

Pada tahun 2011 sampai tahun 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp. 8.722.240.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan :





- 1). Program Pembinaan Upaya Kesehatan, dengan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar.
- 2). Program Bantuan Operasional Kesehatan, dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas.

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar Rp. 8.722.240.000. Adapun realisasi alokasi dana dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9
Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Realisasi Alokasi Dana				Target 2015	Jumlah total
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
-	2.190.200.000	2.210.720.000	4.321.320.000	-	8.722.240.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat, dengan kegiatan Fasilitas Pembinaan/Monev Kegiatan Bidang Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup.

Adapun realisasi alokasi dana dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada badan Perencanaan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10
Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango

Realisasi Alokasi Dana				Target 2015	Jumlah total
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
-	-	-	300.000.000	330.000.000	630.000.000

Sumber : Bappeda Kab. Bone Bolango





f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 6.483.950.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Adapun realisasi alokasi dana dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada badan Perencanaan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 5.11
Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango*

Realisasi Alokasi Dana				Target 2015	Jumlah total
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
-	-	-	300.000.000	330.000.000	8.722.240.000

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI

Selain tugas pembantuan yang di terima dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga menerima alokasi dana tugas pembantuan dari Provinsi Gorontalo sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dalam rangka untuk meningkatkan program dan kegiatan yang ada di daerah dengan nilai alokasi dana sebesar Rp. 9.204.724.700 (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Adapun realisasi alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 5.12
Realisasi Alokasi dana Tugas Pembantuan
Yang di Terima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo*

Realisasi Alokasi Dana		Target 2015	Jumlah total
Tahun 2013	Tahun 2014		
5.879.300.000	3.325.424.700	-	9.204.724.700

*Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Bone Bolango*





D. TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DESA

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengalokasikan dana pembantuan kepada 164 desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk **Anggaran Dana Desa (ADD)** dengan total dana sebesar Rp. 94.271.070.967 (Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tuju Puluh Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Selain itu, pada tahun 2015 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal telah mengalokasikan dana untuk desa sebesar Rp. 42.750.131.000 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Adapun alokasi dana yang di berikan kepada desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 5.13
Alokasi Dana Untuk Desa*

Tahun	Kementerian Desa Tertinggal RI	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2011		-
2012		14.692.500.000
2013		17.387.500.000
2014		25.600.000.000
2015	42.750.131.000	36.591.070.967
TOTAL	42.750.131.000	94.271.070.967

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah





BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Komitmen dan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi prasyarat mutlak agar pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun skala regional menjadi mudah, cepat dan tepat sasaran. Olehnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap tahap pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan mengedepankan integrasi dan kerjasama seluruh elemen pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Secara umum dasar hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan kerjasama daerah, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- d. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- e. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah.
- f. Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah
- g. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2010.





1. KEBIJAKAN

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki tugas umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas umum tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya walaupun dalam tatanan operasional masih terjadi perbedaan menginterpretasikan konsep otonomi daerah yang disikapi agak berlebihan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga berdampak pada munculnya permasalahan baru yang mengarah pada egoisme kedaerahan.

Untuk memperkuat kemitraan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan Kerja Sama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Sebagai wujud realisasi peningkatan pelayanan publik serta lebih memantapkan desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 diarahkan untuk mendorong kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana publik serta kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan Desa Tumbuh Daerah maju.

2. KEGIATAN

Program Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya adalah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang Kerjasama Kota Kembar Dalam Pembangunan Daerah.

3. REALISASI PELAKSANAAN

Realiasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten Bantang dalam Jangka waktu 5 tahun bertujuan untuk saling mendukung dan meningkatkan





serta memanfaatkan sumber daya, kompetensi dan teknologi masing-masing daerah secara maksimal dan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan serta untuk mendorong kemampuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengikutsertakan masyarakat dan para pelaku usaha.

Ruang lingkup yang disepakati dalam kerjasama ini antara lain; pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, perindustrian perdagangan dan koperasi, pariwisata, energi, pertanian, perkebunan dan peternakan, perhubungan, perikanan dan kelautan serta percepatan pelayanan melalui satu pintu yang dijabarkan dalam program pembangunan bersama antar daerah atau rencana kegiatan bersama (*joint activity plan*) dan dilakukan evaluasi setiap tahun.

B. KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN INSTANSI VERTIKAL

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Dalam penyelenggaraan ke-enam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

1. KEBIJAKAN

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

2. KEGIATAN

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan instansi vertikal antara lain :

1. Kesepahaman antara Pemerintah Bone Bolango dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
2. Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BPS Kabupaten Bone Bolango.





3. REALISASI PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dengan dasar hukum Nota Kesepahaman nomor : $\frac{14/HKM-(NK/BB)/V/2014}{(22/KB)/BBPT-KAB.BONE\ BOLANGO/05/2014}$ bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi; (a) Penguatan sistem inovasi daerah, pengembangan klaster industry, pengembangan jaringan inovasi, penumbuhkembangkan teknopreneur dan pembangunan tematik. (b) Pengkajian dan penerapan teknologi agro industry dan bioteknologi. (c) Pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. (d) Pengkajian dan penerapan teknologi industri bangun dan rekayasa. (e) Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material. (f) Pengkajian dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BPS Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 050/Bapopeda/56.a/II/2012 dan nomor 75041.053.a tentang Pelaksanaan program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kabupaten Bone Bolango

C. KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. KEBIJAKAN

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, antara lain:

- 1). Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Instansi Pendidikan
- 2). Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango BUMD/BLU
- 3). Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta

2. KEGIATAN

Beberapa Program Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak ketiga antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.





2. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado dan BLU RSUP Prof.Dr R.D Kandou Manado.
3. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan CV. Arafah.
4. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan PT. Dinar Mutiara Sakti.
5. Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Universitas Gajah Mada.

3. REALISASI PELAKSANAAN

Adapun kerja sama yang telah dilakukan selang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011

- a) Kerjasama dengan wadah antara lain Badan Kerjasama Kabupaten seluruh Indonesia (BKKSI) dan Badan Kerjasama Regional Sulawesi (BKPRS).
- b) Kerjasama Penanggulangan Kemiskinan melalui program Nasional PNPM, PKH, JANMKESMAS / JAMKESDA DAN RASKIN
- c) Kerjasama dengan Kementerian Daerah Tertinggal dalam hal Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Program Percepatan KawasanPembangunan Daerah Tinggaal (P2KPDT)
- d) Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan umum dalam hal Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.
- e) Kerjasama dengan PT. ASKES (PERSERO) Cabang Gorontalo dalam hal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA) BAGI Masyarakat Kab. Bone Bolango.
- f) Kerjasama dengan Gorontalo Post dalam hal Peliputan dan pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Kab. Bone Bolango.
- g) Kerjasama dengan Radar Gorontalo dalam hal Peliputan dan pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Kab. Bone Bolango.
- h) Kerjasama dengan PT. GORONTALO TELEVISI UTAMA dalam hal Peliputan dan pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Kab. Bone Bolango.
- i) Kerjasama dengan CV. MEDIA CERDASBANGSA dalam hal Peliputan dan pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Kab. Bone Bolango





2. Tahun 2012

- a) Penanggulangan kemiskinan melalui program nasional PNPM, PKH, JAMKESMAS/JAMKESDA dan RASKIN, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
- b) Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
- c) Kerjasama dengan Kementerian Perumahan dalam rangka Program Pengembangan Bidang Perumahan dan Pemukiman.
- d) Pengembangan kerja sama dengan Universitas Gajah Mada dalam rangka pengembangan potensi unggulan daerah.
- e) Kerja sama dengan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam rangka Pembangunan Jalan Tulabolo Pinogu
- f) Pengembangan kerja sama dengan Pihak TNI dalam rangka pengembangan Jalan Tulabolo Pinogu.

3. Tahun 2013

- a) Kerja sama dengan Bank SULUT dalam rangka Penerapan dan Pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.
- b) Kerja sama dengan TNI dalam rangka Peningkatan Ruas Jalan Tulabolo-Pinogu .
- c) Kerjasama dengan Kementerian Perumahan dalam rangka Program Pengembangan Bidang Perumahan dan Pemukiman, tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,
- d) Kerja sama dengan Kementerian Perhubungan tentang pengelolaan Hibah Barang Milik Negara 2(dua) unit Bus Bantuan kepada Pemda Bone Bolango,
- e) Kerjasama dengan Forum Komunikasi Pemda Provinsi, Kota, Kabupaten se-Provinsi Gorontalo dan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Negara Provinsi Gorontalo, tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan.
- f) Pengembangan kerja sama dengan Universitas Gajah Mada dalam rangka pengembangan potensi unggulan daerah

4. Tahun 2014

- a) Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tentang Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila. Adapun tujuan dari perjanjian ini adalah ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS Senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.





- b) Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan CV. Arafah dengan nomor : 001/PPK-BLUDRSUD-TK/I/2014 tentang Penatalaksanaan Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (Bahan Makanan) di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila. Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan PT. Dinar Mutiara Sakti dengan nomor : 001/PPK-DAU/RSUD-TK/2014 tentang Penatalaksanaan Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) di RSUD Toto Kabila.
- c) Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Universitas Gajah Mada tentang Pengembangan Potensi Daerah. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di Kecamatan Bolango Ulu.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memprogramkan antisipasi bencana alam dengan kegiatan :

- a. Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan melalui Sosialisasi pencegahan bencana alam
- c. Melatih tim penanganan bencana
- d. Jumlah kasus Bencana Alam yang terjadi Sepanjang Tahun 2011-2014

NO	Kejadian Bencana	satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Bencana Longsor	kasus	1	1	1	1		4
2	Bencana Kekeringan	Kasus	-	-	-	18		18
3	Bencana kebakaran	Kasus	-	-	-	4		4
4	Bencana Angin Ribut	Kasus	-	-	7	4		13
5	Bencana Banjir	Kasus	3	3	7	13		26

Berdasarkan tabel diatas, bencana yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango selama 5 Tahun berjumlah 65 kasus, bencana banjir mencapai 40%, dengan jumlah kasus bencana 26 kali.

2. Potensi Bencana yang Dihadapi dan Solusi

Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis Wilayah Kabupaten Bone Bolango mempunyai berbagai macam potensi bencana alam.





Adapun langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Bone Bolango disampaikan dalam framework program, meliputi kaitan antara tujuan, hasil antara kegiatan dan indicator keberhasilan serta evaluasi.

Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan bencana.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini. Melalui kegiatan ini sekaligus dilakukan inventarisasi potensi masyarakat local untuk mendukung program.
Sosialisasi dilakukan dengan teknik-teknik partisipasi masyarakat tentang bahaya bencana alam serta pemahaman masyarakat tentang cara-cara menanggulangi bencana alam
- b. Membangun jaringan kerja terkait bencana.
Kegiatan antara masyarakat dan mitra local untuk membangun jaringan kerja terkait bencana dengan menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja yang terkait dengan kebencanaan
- c. Identifikasi stakeholder potensi dalam pengelolaan bencana.
Melalui kegiatan berupa sosialisasi atau pengenalan dan workshop diharapkan akan terjadi interaksi yang intensif antara skpd-skpd teknis yang terkait dalam hal penanganan bencana.
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.
Dengan menyiapkan kerangka kerja yang menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan penanganan bencana dikabupaten bone bolango
- e. Pembentukan Working Grup tingkat kabupaten
Melibatkan skpd teknis dengan penjabaran tugas masing-masing serta pembagian tugas masing-masing bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tupoksi.
Disamping itu juga, dilakukan pula kegiatan monitoring dan evaluasi secara regular sesuai dengan jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memonitoring kembali pasca bencana alam yang mengalami kerusakan dan kerugian pemukinam masyarakat akibat terjadinya bencana alam yang akan menjadi bahan pelaporan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

E. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai dasar hukum eksistensi wilayah,





kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan timbulnya konflik antara daerah.

Sebagai dasar hukum eksistensi wilayah memberi makna bahwa suatu daerah yang telah berdiri sendiri harus memperoleh pengakuan publik yang harus didukung dengan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain wilayah yang telah berdiri sendiri perlu memiliki batas wilayah yang jelas dan pasti yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Tapal Batas.

Tidak jelasnya batas wilayah dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada wilayah perbatasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan lahan warga di wilayah perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan/penataan batas wilayah perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pembinaan batas wilayah terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapal batas yang merupakan batas wilayah telah ditetapkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan melalui koordinasi bersama antar pemerintahan baik antar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan, maupun melalui koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Pembinaan tapal batas tersebut dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) serta Fasilitasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam pembinaan batas wilayah adalah

- Adanya tapal batas yang terletak pada taman nasional yang sulit dijangkau dan jarak antar tapal batas terlalu jauh.
- Disinyalir adanya pemindahan patok tapal batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
- Pemasangan pilar batas diwilayah selatan yang tidak sesuai dengan ordinat batas wilayah Bone Bolango dan Bolaang Mongondow Selatan.





- Belum optimalnya pemetaan dan penetapan batas wilayah antar kecamatan maupun antar desa dalam wilayah Bone Bolango.

Solusi yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang berbatasan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta memprogramkan fasilitasi percepatan pembuatan dan peninjauan tapal batas.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional.

Penetapan kawasan khusus di daerah otonom dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional seperti halnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan pengembangan industri strategis dan berteknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga permasyarakatan spesifik). Oleh karena itu, dalam penetapan kawasan khusus Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Ditinjau dari penjelasan diatas Kabupaten Bone Bolango belum memiliki kawasan khusus seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hanya memiliki kawasan lindung yakni Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selain bencana alam di negara kita juga ini sering timbul gangguan keamanan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti: SARA, anarkisme, separatis, terorisme, walau di wilayah Kabupaten Bone Bolango hal-hal semacam itu tidak terjadi namun perlu terus di waspadai karena hal-hal seperti ini dapat saja terjadi setiap saat.

1. Gangguan yang Terjadi

Secara bertahap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun





2007, masih menggunakan perangkat Hukum berupa Perda yang terdiri dari Perda Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, implementasi Perda tersebut sudah menunjukkan dampak yang positif dalam rutinitas masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketetraman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, minum-minuman keras dan demonstrasi namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Ada beberapa instansi yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban.

a. Institusi diluar Pemerintah Daerah, adalah :

- Kepolisian
- Kejaksaan
- TNI.

b. Institusi lingkup Pemerintah Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tugas dan fungsi kewenangan Satuan kerja perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik yang memiliki sumber daya aparatur dalam rangka menjalankan tugas operasional tehknis sesuai dengan Tupoksi yang diuraikan diatas, menyangkut jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 6.2 .

4. Penanggulangan.

Penanganan atas kejadian yang mengancam ketentraman dan ketertibab di wilayah Kabupaten Bone Bolango, maka penanggulangannya telah diatur dalam PROTAP di masing-masing Institusi dan saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman sesama aparat di lapangan. Disamping itu pula, dilakukan dengan mengoptimalkan secara penuh KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah) dengan maksud memberikan keamanan lingkungan yang kondusif, sehingga berdampak pada ketentraman masyarakat.

Setiap kejadian perkara baik itu sifatnya lingkungan maupun lokal dalam penanggulangannya selalu diikutsertakan aparat keamanan khususnya Polri,





utamanya untuk menjaga agar kejadian perkara tidak melebar dan membesar dan selalu mencari pemecahan masalahnya dengan melakukan dialog dan melibatkan pihak-pihak yang merasa terlibat dalam suatu kejadian perkara.

Berbagai konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Dengan adanya KOMINDA merupakan wadah kerjasama antara TNI, POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait/vertikal, tujuannya untuk melakukan deteksi dini dan mengumpulkan informasi-informasi baik dari perorangan maupun sekelompok masyarakat dalam bentuk intelejen, serta lapor cepat/tindak cepat guna disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dalam pengambilan keputusan.





BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Kepala Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi substansi strategis Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango Tahun 2011-2014 yakni sebagai berikut :

1. Dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun faktor pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi tercapainya visi Kabupaten Bone Bolango.
2. Secara umum indikator kinerja makro Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan trend peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun diakui masih terdapat beberapa aspek daya saing ekonomi dan kualitas pembangunan infrastruktur yang perlu terus dioptimalkan kinerjanya. Disamping itu, beberapa upaya perbaikan disektor pendidikan dan perluasan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus dimantapkan dalam rangka pencapaian target Millenium Development Goals 2015.
3. Belum tercapainya target pendapatan dalam kurung waktu dua belas bulan selama tahun 2014 perlu terus beroleh perhatian, yang tidak hanya semata-mata pada aspek perbaikan kinerja aparatur pengelola PAD dalam mengali sumber-sumber pendapatan PAD, tetapi juga antisipasi berbagai faktor eksternal, antara lain (a) regulasi pendukung yang mengatur retribusi belum sepenuhnya diatur; (b) masih ada regulasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; (c) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menaati regulasi tentang retribusi dan sejenisnya masih relatif rendah; (d) belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana publik yang menghasilkan sumber pendapatan retribusi daerah.
4. Untuk penyerapan (realisasi) belanja daerah kurang dari target yang ditetapkan merupakan suatu hal logis dan positif, sebagai akibat dari kinerja





pemerintah yang mengutamakan adanya efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.

5. Setiap permasalahan yang muncul sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah ditempuh pemecahannya melalui pendekatan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah baik dengan Pemerintah Provinsi serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

B. Saran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, disamping merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance and Clean Governance* juga merupakan proses *legalstanding* yang bersifat adminisistratif sebagai wujud profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan 2011-2015 ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah, sehingga terbangun proses *Check and Balance* antara Eksekutive dan Legislatif.

Oleh karena itu melalui proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dari semua elemen pembangunan daerah guna tercapainya komitmen bersama yakni terwujudnya pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Disamping itu pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan (LKPJ-AMJ) janganlah hanya sebatas rutinitas belaka atau hanya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi yang lebih penting adalah kesungguhan bersama untuk menyatukan presepsi, komitmen dan konsisten seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan tahun 2011-2012 ini dibuat, untuk disampaikan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi bahan pembahasan bersama.

